



PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BADAN PUSAT STATISTIK

LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



LAKIP

2020

PUSDIKLAT BPS







PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BADAN PUSAT STATISTIK

LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



LAKIP

2020

PUSDIKLAT BPS



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pusat Statistik (Pusdiklat BPS) disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja Pusdiklat BPS sebagai penyelenggara negara atas pelaksanaan program dan kegiatan serta pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

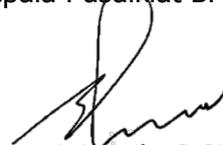
Penyusunan Laporan Kinerja Pusdiklat BPS Tahun 2020 bertujuan untuk mengevaluasi capaian kinerja sasaran Pusdiklat BPS selama tahun 2020. Selain itu pula untuk memberikan gambaran sekaligus sebagai penyampaian informasi kinerja yang terukur mengenai penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan tugas yang telah dicapai.

Dalam laporan ini tertuang capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan pada tahun 2020, perkembangan rata-rata capaian kinerja indikator sasaran terhadap tahun sebelumnya, serta capaian kinerja terhadap target Rencana Strategis (Renstra) Pusdiklat BPS tahun 2020-2024. Hasil laporan diharapkan menjadi masukan sebagai bahan evaluasi dalam upaya perbaikan berkesinambungan untuk mencapai kinerja yang lebih optimal pada tahun mendatang.

Pimpinan Pusdiklat BPS mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan laporan ini. Kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

Jakarta, 17 Februari 2021

Kepala Pusdiklat BPS



Eni Lestariningsih, S.Si, MA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR LAMPIRAN	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF	viii
PENDAHULUAN.....	3
1.1. Latar Belakang.....	3
1.2. Maksud dan Tujuan.....	4
1.3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	4
1.4. Sumber Daya Manusia (SDM)	6
1.5. Potensi dan Permasalahan.....	9
1.6. Sistematika Penyajian Laporan	11
PERENCANAAN KINERJA	15
2.1. Rencana Strategis (Renstra) Pusdiklat BPS 2020-2024	15
2.2. Perjanjian Kinerja (PK) Pusdiklat BPS Tahun 2020	17
AKUNTABILITAS KINERJA.....	23
3.1. Capaian Kinerja Pusdiklat BPS Tahun 2020.....	23
3.2. Perkembangan Capaian Kinerja Pusdiklat BPS Tahun 2020 terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2019	27
3.3. Capaian Kinerja Pusdiklat BPS Terhadap Target Renstra 2020-2024	76
3.4. Kegiatan Prioritas Pusdiklat BPS Tahun 2020	78
3.5. Upaya Efisiensi di Pusdiklat BPS.....	79
3.6. Realisasi Anggaran Pusdiklat BPS Tahun 2020.....	82
PENUTUP	91
4.1. Tinjauan Umum.....	91
4.2. Tindak Lanjut.....	91
LAMPIRAN	95

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Strategis Pusdiklat BPS 2020-2024	16
Tabel 2. Perjanjian Kinerja Pusdiklat BPS Tahun 2020.....	18
Tabel 3. Kontribusi Unit Kerja Terhadap Penyusunan Target Indikator.....	19
Tabel 4. Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Pusdiklat BPS Menurut Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2020.....	24
Tabel 5. Jumlah Pegawai Pusdiklat BPS yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Tahun 2020	26
Tabel 6. Perbandingan rata-rata Capaian Indikator Sasaran Strategis Pusdiklat BPS Tahun 2017-2020	27
Tabel 7. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran Strategis 1 Tahun 2020 ..	28
Tabel 8. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran Strategis ke 2 Tahun 2020	62
Tabel 9. Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Tahun 2020	62
Tabel 10. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran Strategis ke 3 Tahun 2020.....	69
Tabel 11. Jumlah Pegawai BPS yang memperoleh Beasiswa S2 dan S3 Tahun 2020	71
Tabel 12. Jumlah Pegawai BPS yang Menempuh Pendidikan Melalui Izin Belajar Tahun 2020	75
Tabel 13. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran Strategis ke 4 Tahun 2020.....	75
Tabel 14. Perbandingan Realisasi Kinerja Pusdiklat BPS Tahun 2020 dengan Target Renstra Tahun 2020.....	77
Tabel 15. Rincian Anggaran Belanja DIPA Awal dan DIPA Akhir Tahun 2020	81
Tabel 16. Efisiensi Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kantor	81
Tabel 17. Pagu dan Realisasi Anggaran Pusdiklat BPS Dalam Program DMPTTL Menurut Sumber Dana Tahun Anggaran 2020	83
Tabel 18. Pagu dan Realisasi Anggaran Pusdiklat BPS Dalam Program DMPTTL Menurut Rincian Belanja Tahun Anggaran 2020	83
Tabel 19. Anggaran Pusdiklat BPS Tahun 2020 Menurut Sasaran Strategis	84
Tabel 20. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Realisasi Anggaran Menurut Sasaran Tahun 2020.....	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Pusdiklat BPS.....	6
Gambar 2. Distribusi SDM berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	7
Gambar 3. Distribusi SDM berdasarkan Status Jabatannya.....	8
Gambar 4. Distribusi SDM berdasarkan Kelompok Umur.....	8
Gambar 5. Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Pusdiklat BPS	17
Gambar 6. Kegiatan Pembukaan Pelatihan Dasar CPNS Golongan II.....	31
Gambar 7. Kegiatan Pembelajaran Pelatihan Dasar CPNS Golongan II.....	32
Gambar 8. Kegiatan Seminar Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS Golongan II.....	32
Gambar 9. Kegiatan Pembelajaran Agenda Sikap Perilaku Bela Negara Pelatihan Dasar CPNS Golongan III.....	33
Gambar 10. Kegiatan Seminar Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS Golongan III.....	34
Gambar 11. Kegiatan Penutupan Pelatihan Dasar CPNS Golongan III.....	34
Gambar 12. Kegiatan Pembukaan Diklatpim Tingkat IV/PKP.....	36
Gambar 13. Kegiatan Pembelajaran Diklatpim Tingkat IV.....	37
Gambar 14. Kegiatan Pembelajaran Diklatpim Tingkat IV.....	37
Gambar 15. Kegiatan Pembukaan Diklatpim Tingkat III.....	38
Gambar 16. Kegiatan Pembelajaran Diklatpim Tingkat III.....	39
Gambar 17. Kegiatan Pembelajaran Diklatpim Tingkat III.....	39
Gambar 18. Pembukaan Diklat Fungsional Statistisi Tingkat Ahli.....	43
Gambar 19. Pembelajaran di kelas Virtual Diklat Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli (PNBP).....	44
Gambar 20. Pembukaan Pelatihan Teknis Penulisan KTI oleh Kepala Pusdiklat BPS.....	45
Gambar 21. Pembukaan Pelatihan Teknis Penulisan KTI.....	46
Gambar 22. Kegiatan belajar dengan Fasilitator Bpk. Endan Suwandana.....	46
Gambar 23. Kegiatan Synchronous Zoom Meeting Diklat Teknis Administrasi Pranata Komputer Tingkat Ahli.....	47
Gambar 24. Kegiatan Zoom Meeting Pelatihan Dasar Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli Angkatan I.....	49
Gambar 25. Kegiatan Zoom Meeting Pelatihan Dasar Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli Angkatan II.....	49
Gambar 26. Pelaksanaan Pelatihan Dasar Fungsional Statistisi Tingkat Ahli secara PJJ.....	50
Gambar 27. Kegiatan Pembelajaran Pelatihan Statistik Sektoral.....	51
Gambar 28. Kegiatan Diklat Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga.....	52
Gambar 29. Pembukaan Technichal Assistance and Training on SPPI-IMF, 6 Juni 2020.....	54
Gambar 30. Narasumber Andrew Baers Senior Economist IMF.....	54
Gambar 31. Kegiatan Capacity Building on Interaction Excellence Kepala BPS Kab/Kota.....	55
Gambar 32. Kegiatan Pelatihan Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	58
Gambar 33. Tatap Muka Online (TMO) PBJ Akt.49 pada tanggal 16 November 2020 dengan Fasilitator Imam Arumsyah dari LKPP.....	59
Gambar 34. Kegiatan belajar Pelatihan PBJ Akt 49 melalui zoom meeting.....	59
Gambar 35. Tatap Muka Online (TMO) PBJ Akt.51 Senin, 23 November 2020 dengan fasilitator Tatang Rusnandar.....	60

Gambar 36. Pembukaan Diklat Pembentukan Bendahara secara online	60
Gambar 37. Rapat Koordinasi Evaluasi Kegiatan 2020, Rencana Kegiatan 2021, dan Capacity Building Tahun 2020 Pegawai Pusdiklat BPS Hari Pertama.....	65
Gambar 38. Rapat Koordinasi Evaluasi Kegiatan 2020, Rencana Kegiatan 2021, dan Capacity Building Tahun 2020 Pegawai Pusdiklat BPS Hari Kedua	65
Gambar 39. Suasana Pembelajaran oleh Narasumber dari Jhon Robert Powers Indonesia.....	66
Gambar 40. Foto Bersama Perwakilan Peserta dan Narasumber.....	66
Gambar 41. Foto Bersama Beauty Class Wardah.....	67
Gambar 42. Kegiatan Pembelajaran Beauty Class Wardah.....	67
Gambar 43. Penyerahan Hadiah Bagi Peserta yang Aktif dalam Acara Capacity Building	68
Gambar 44. Foto Bersama Pemateri dengan Peserta Capacity Building	68
Gambar 45. Monitoring, Evaluasi, dan Rencana Kerjasama Double Degree dengan Prodi Statistika Terapan dan Ilmu Komunikasi Unpad, Bandung	72
Gambar 46. Kuliah Umum Kepala Pusdiklat di Prodi S2 Ilmu Kependudukan Universitas Hasanuddin, Makasar	72
Gambar 47. Monitoring, Evaluasi, dan Rencana Kerjasama Double Degree dengan Magister Ekonomi Pembangunan Universitas Gadjah Mada.....	73
Gambar 48. Kegiatan Kerjasama Perguruan Tinggi dengan Magister Ekonomi Pembangunan Universitas Gadjah Mada	73
Gambar 49. Penyerahan Sertifikat Akreditasi oleh LAN RI.....	86
Gambar 50. Presentasi dalam rangka LAN Award Kategori Lembaga Diklat Berprestasi	87
Gambar 51. Piagam Penghargaan LAN Award Kategori Lembaga Diklat Berprestasi	87

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Renstra Pusdiklat BPS 2020-2024.....	95
Lampiran 2. Reviu Renstra Pusdiklat BPS 2020-2024.....	96
Lampiran 3. Pernyataan Perjanjian Kinerja Pusdiklat BPS 2020.....	97
Lampiran 4. Pengukuran Capaian Kinerja 2020.....	100
Lampiran 5. Indikator Kinerja Utama (IKU) Pusdiklat BPS Tahun 2020.....	100
Lampiran 6. Jumlah Pegawai Di Lingkungan Pusdiklat BPS Menurut Jenis Jabatan Satuan Organisasi Tahun 2020.....	104
Lampiran 7. Jumlah Pejabat Fungsional pada Pusdiklat BPS Keadaan Akhir Tahun 2020.....	105
Lampiran 8. Kerjasama Tugas Belajar APBN BPS Tahun 2020.....	106
Lampiran 9. Diklat yang diselenggarakan Pusdiklat BPS Tahun 2019.....	107
Lampiran 10. Kalender Diklat Pusdiklat BPS Tahun 2019.....	108
Lampiran 11. Rincian Jumlah Peserta MOOC per Kursus.....	110
Lampiran 12. Sertifikat Akreditasi.....	110
Lampiran 13. Piagam Penghargaan.....	112

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pusdiklat BPS disusun sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdiklat BPS atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja juga merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi, telah ditetapkan 2 (dua) tujuan, 4 (empat) sasaran strategis, dan 4 (empat) indikator kinerja yang harus dicapai Pusdiklat BPS pada tahun 2020.

Dari empat sasaran strategis yang telah ditentukan, secara umum diperoleh rata-rata capaian kinerja indikator sasaran strategis pada tahun 2020 sebesar 106,07 persen. Hal ini merupakan satu pencapaian yang sangat baik untuk tahun awal periode Rencana Strategis 2020-2024. Dengan angka diatas 100 persen, diperoleh gambaran bahwa capaian kinerja telah melampaui dari target yang telah ditentukan. Keberhasilan ini merupakan capaian dan kerja keras dari *teamwork* seluruh pegawai Pusdiklat BPS dan dukungan dari *stakeholder* yang terlibat dalam mewujudkan tujuan meningkatkan layanan pendidikan dan pelatihan yang adaptif dan meningkatkan kompetensi SDM.

Keberhasilan Pusdiklat BPS dalam mencapai target kinerja melebihi dari yang telah ditetapkan, tidak terlepas dari peranan masing-masing indikator kinerja yang memberikan sumbangan cukup besar dalam mencapai target yang telah ditentukan. Pada indikator sasaran strategis pertama yaitu persentase kepuasan peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat diperoleh capaian kinerja sebesar 109,58 persen.

Tahun 2020 merupakan awal masa Pandemi Covid 19, namun kendala ini dapat diatasi dengan baik dan Pusdiklat BPS tetap berusaha untuk meningkatkan mutu pelayanan diklat aparatur BPS yang prima. Hal ini dibuktikan dengan adanya perbaikan layanan terhadap peserta sehingga peserta dapat mengetahui, memahami dan menerapkan materi yang diajarkan widyaiswara/pengajar dengan baik. Perbaikan terjadi berkat kerjasama dan komitmen para penyelenggara untuk selalu memperbaiki layanan baik dari sisi teknis dalam proses pembelajaran seperti sistem pembelajaran *e-learning*, penyampaian materi oleh widyaiswara/pengajar maupun non teknis berupa sarana dan prasarana yang tersedia.

Capaian kinerja pada indikator sasaran strategis kedua yaitu persentase SDM Pusdiklat yang melakukan peningkatan kompetensi adalah sebesar 105,56 persen. Peningkatan kompetensi terhadap pegawai dilakukan dalam rangka menunjang layanan penyelenggaraan

pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara BPS, sehingga diperoleh SDM yang berkualitas dan berkompeten di bidangnya. Kegiatan yang dilakukan berupa pelatihan, workshop, seminar, dan lain-lain baik sebagai peserta, pengajar, nara sumber, maupun panitia penyelenggara. Hal ini dilakukan oleh seluruh pegawai Pusdiklat baik struktural, widyaiswara, maupun staf/pelaksana yang kegiatannya di dalam ataupun di luar Pusdiklat/lembaga lainnya.

Indikator sasaran strategis ketiga yang juga menunjukkan capaiannya lebih dari 100 persen adalah persentase kelulusan peserta tugas belajar dengan persentase sebesar 111,11 persen. Hal ini terjadi berkat terjalannya kerja sama dengan institusi pendidikan dan pelatihan dalam negeri dan luar negeri yang berkesinambungan sesuai sasaran strategis yang ingin dicapai.

Kerjasama yang dilakukan dengan Perguruan Tinggi dalam bentuk program beasiswa APBN BPS yang selama ini berjalan meliputi program studi ilmu statistik, ekonomi, kependudukan, dan teknologi. Untuk memenuhi kebutuhan ilmu lainnya dalam menunjang pekerjaan BPS telah ditambahkan program studi Ilmu Akuntansi dan Ilmu Psikologi pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 telah mengembangkan kembali ilmu lainnya yaitu Ilmu Komputer dan Ilmu Komunikasi di Universitas Indonesia dan Universitas Padjadjaran. Selain penambahan jurusan, pada tahun 2020 telah pula dijalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi lainnya yaitu Universitas Hasanuddin Makassar untuk S2 jurusan Kependudukan dan penambahan jurusan kependudukan untuk S3 di Universitas Gajah Mada.

Pada sasaran strategis yang keempat, Penguatan manajemen internal dan sumberdaya didukung oleh indikator "Hasil Penilaian SAKIP". Pada tahun 2020, hasil penilaian SAKIP belum dikeluarkan oleh Inspektorat, sehingga sementara ini masih disamakan dengan tahun 2019 yaitu sebesar 70,39 poin sedangkan target PK 2020 adalah sebesar 70 poin. Berdasarkan nilai tersebut diperoleh capaian kinerja sebesar 100,56 persen yang artinya bahwa tingkat pencapaian kinerja yang diperoleh telah melebihi dari target yang diharapkan. Angka ini sejalan dengan upaya Pusdiklat BPS dari tahun ke tahun untuk selalu memperbaiki Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Kegiatan yang menjadi prioritas Pusdiklat BPS pada tahun 2020 ini masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu pelaksanaan pelatihan dasar atau Latsar CPNS formasi penerimaan tahun 2019. Namun, karena belum terbitnya SK penugasan atau penempatan mereka di satuan kerja BPS di daerah, maka di awal tahun yaitu bulan Januari 2020 BPS mendahulukan penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan pengawas bagi para pejabat pengawas baik yang ada di pusat maupun daerah. Penyelenggaraan Latsar bagi para CPNS

baik golongan II maupun golongan III berasal dari lulusan Politeknik Statistika STIS dan beberapa lulusan Program Diploma PKN STAN telah diselenggarakan sejak bulan Juni sampai November Tahun 2020 .

Untuk kegiatan pelatihan teknis yang menjadi prioritas adalah :

- (1) Pelatihan Statistik Sektoral Kabupaten/Kota, pesertanya berasal dari BPS Kabupaten/Kota, Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik (Diskominfotik), serta Organisasi Perangkat Desa/Produsen Data;
- (2) Pelatihan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga yang pesertanya berasal dari beberapa Pusdatin, Pusdiklat, dan Organisasi Perangkat Desa/Produsen Data Kementerian/Lembaga.

Tujuan diklat teknis tersebut untuk meningkatkan kompetensi peserta pelatihan agar mampu menjalankan tugas walidata statistik sektoral di daerah dan membantu walidata dalam membina produsen data di daerahnya. Selain itu, penguatan dalam bidang statistik sektoral dilaksanakan dalam rangka Satu Data Indonesia dan *National Strategic for Development of Statistic* (NSDS).

Dalam rangka mencapai kinerja yang diharapkan, telah dialokasikan pagu anggaran Pusdiklat BPS selama tahun 2020 adalah sebanyak Rp.51.239.574.000,-. Pagu tersebut adalah pagu keadaan terakhir tahun 2020, setelah mengalami beberapa kali proses revisi dari pagu awal sebanyak Rp. 62.676.943.000,- sehingga telah terjadi efisiensi pengurangan anggaran sebesar Rp. 11.437.369.000,-. Efisiensi dilakukan pada belanja operasional perkantoran seperti lembur, biaya pemeliharaan, listrik, ATK dan *computer supply*. Selain itu pada layanan diklat terjadi efisiensi yang sangat besar terutama anggaran perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas paket meeting sehubungan adanya perubahan metode pembelajaran klasikal menjadi e-learning dalam rangkaantisipasi wabah pandemi COVID-19.

Efisiensi yang dilakukan pada beberapa pos anggaran program DMPTTL tersebut dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan lain baik yang belum diposkan anggarannya maupun kegiatan yang masih mengalami kekurangan anggaran. Beberapa pemanfaatan anggaran diutamakan untuk memenuhi kebutuhan penanganan COVID-19. Selain itu, digunakan pula untuk menambah diklat yang sangat dibutuhkan seperti Diklat Statistik Sektoral, *Training Online IMF*, Diklat Pengelola Keuangan, *Capacity Building*, dan lain-lain, serta kegiatan yang masih kekurangan anggaran yaitu pengelolaan rintisan gelar (tugas belajar) yang dibiayai APBN BPS.

Bila dilihat realisasinya , dari pagu sebanyak Rp.51.239.574.000,- telah dimanfaatkan penggunaannya sebesar 91,51 persen. Realisasi anggaran terbesar diserap oleh Sasaran Strategis ketiga yakni terjalannya kerjasama dengan institusi pendidikan dan pelatihan dalam negeri dan luar negeri yang berkesinambungan mencapai 98,46 persen. Penggunaan anggaran tersebut untuk membayar biaya pendidikan seluruh peserta tugas belajar, bantuan biaya hidup per bulan, bantuan uang buku dan referensi per tahun, bantuan riset/penelitian/seminar per tahun, biaya perjalanan pemanggilan dan pemulangan peserta tugas belajar, dan biaya perjalanan dalam rangka kerjasama perguruan tinggi. Sejalan dengan pencapaian targetnya yang melebihi nilai target yang ditentukan, dapat disimpulkan bahwa program kerjasama dengan Perguruan Tinggi menjadi hal yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM pegawai BPS. Pencapaian ini setara dengan penyerapan anggaran yang terealisasi.

Sebaliknya, realisasi terendah berada di Sasaran Strategis kedua yakni terwujudnya SDM Pusdiklat BPS yang melakukan peningkatan kompetensi dengan penyerapan anggaran sebesar 75,21 persen. Bila dilihat dari pencapaian target untuk sasaran strategis kedua ini dengan indikator utama persentase SDM Pusdiklat yang melakukan peningkatan kompetensi telah melebihi target yaitu 105,56 persen. Hal ini menggambarkan bahwa SDM Pusdiklat yang melakukan peningkatan kompetensi relatif banyak, namun karena adanya pandemi COVID-19 kegiatannya dilakukan secara online sehingga tidak membutuhkan biaya yang besar.

BAB I

PENDAHULUAN

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja, yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah). Selain sebagai evaluasi atau upaya perbaikan yang berkesinambungan dalam meningkatkan kinerjanya untuk tahun yang akan datang juga menggambarkan keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan maupun sasaran, terutama indikator-indikator dalam pencapaian kinerja yang telah diraih Satuan Kerja pada Instansi Pemerintah, dalam rangka mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Setiap entitas akuntabilitas kinerja wajib menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan, hal ini seperti yang terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam Pasal 18. Realisasi dari target yang telah ditetapkan pada awal tahun akan dimonitori setiap triwulanan dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja interim (triwulanan) dan laporan kinerja tahunan pada akhir tahun anggaran.

Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan instansi pemerintah non kementerian yang memiliki struktur organisasi di bidang teknis, sekretariat dan pengawasan. Struktur bidang sekretariat terdiri dari biro perencanaan, administrasi keuangan, pengembangan sumber daya manusia (SDM) BPS, biro umum, hubungan masyarakat maupun kepegawaian dan hukum.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pusat Statistik (Pusdiklat BPS) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengembangkan kompetensi SDM BPS seluruh Indonesia, sebagai satuan kerja (satker)/perangkat organisasi seperti di dalam Peraturan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS, pada Bab X Pasal 393 menyebutkan bahwa Pusdiklat BPS mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan dan kepemimpinan, serta teknis dan fungsional.

Pusdiklat BPS adalah unsur pelaksana BPS berperan penting dalam meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara di bidang pendidikan dan pelatihan (Diklat) dalam hal ini

pegawai di lingkungan BPS maupun pemangku kepentingan (*stakeholder*) BPS secara umum. Selain itu juga mengelola tugas belajar dan izin belajar serta mengadakan seminar/workshop yang berkaitan dengan statistik dan teknologi informasi.

Pedoman penyusunan Laporan Kinerja bagi setiap instansi pemerintah tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Pusdiklat BPS Tahun 2020 disusun dengan maksud sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Pusdiklat BPS kepada Kepala BPS atas pelaksanaan program/kegiatan serta pengelolaan anggaran dan barang milik Negara dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan penyusunan adalah untuk mengevaluasi capaian kinerja tujuan dan sasaran Pusdiklat BPS selama tahun 2020.

1.3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2008 tentang Badan Pusat Statistik yang dijabarkan dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik dan Peraturan Kepala BPS Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi, maka tugas, fungsi dan struktur organisasi Pusdiklat BPS adalah sebagai berikut:

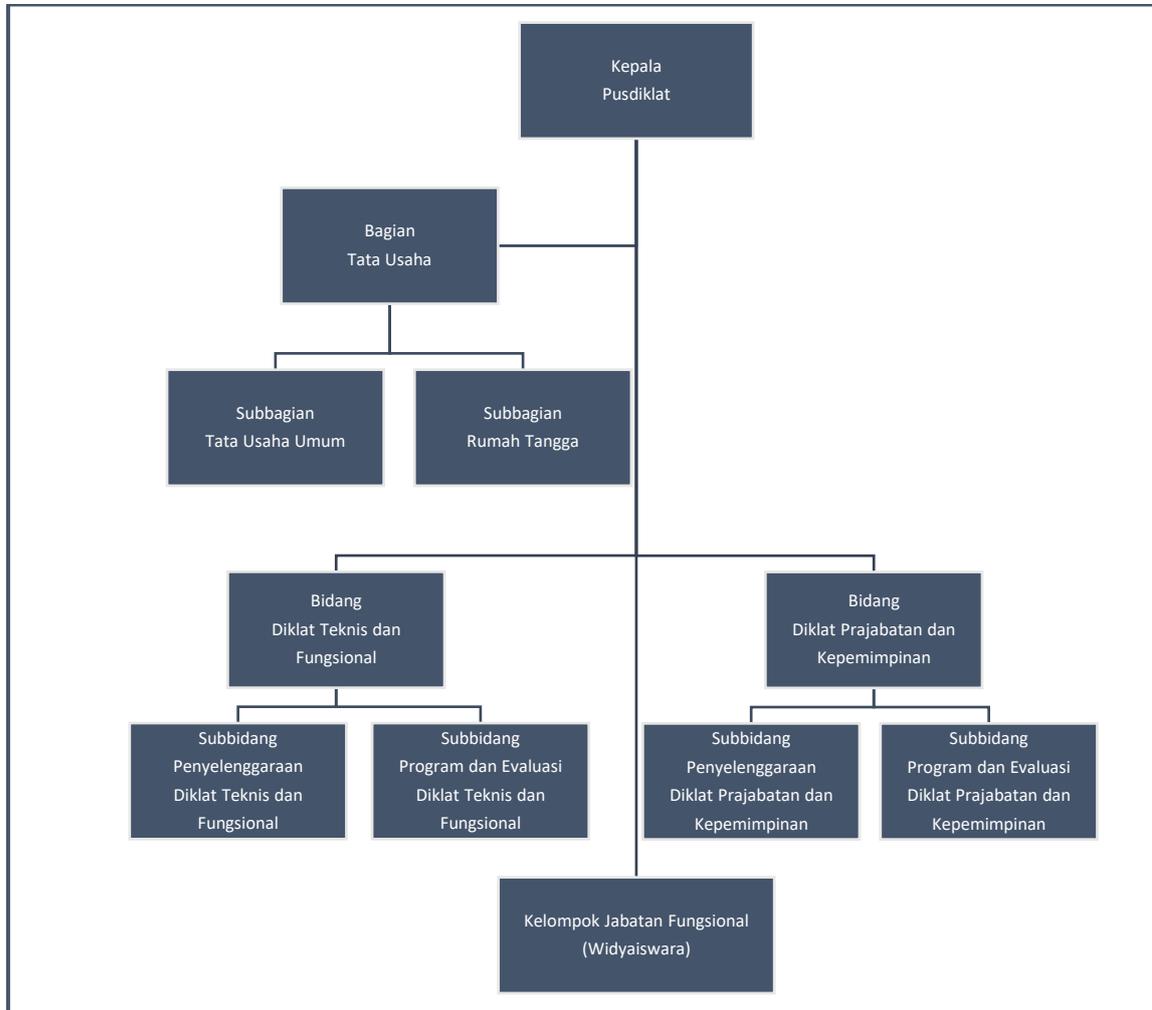
1. Kedudukan
Pusdiklat merupakan unit kerja setingkat Eselon II pada BPS yang berlokasi di Jalan Raya Jagakarsa No. 70. Jakarta Selatan 12620.
2. Tugas
Pusdiklat mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan dan kepemimpinan serta pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional.
3. Fungsi
Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang dimaksud di atas, pusdiklat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan tata usaha
 - b. Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan dan kepemimpinan
 - c. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional.
4. Struktur Organisasi
- Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, struktur organisasi Pusdiklat adalah sebagai berikut:
1. Kepala
Kepala Pusdiklat BPS adalah pejabat Eselon IIa
 2. Bagian Tata Usaha
Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang pejabat Eselon IIIa, yaitu Kepala Bagian Tata Usaha yang membawahi dua Kepala Subbagian setingkat Eselon IVa yaitu:
 - a. Subbagian Tata Usaha Umum; dan
 - b. Subbagian Rumah Tangga
 3. Bidang Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan
Bidang ini dipimpin oleh seorang pejabat Eselon IIIa, yaitu Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Kepemimpinan yang membawahi dua Kepala Subbidang setingkat Eselon IVa yaitu:
 - a. Subbidang Penyusunan Program dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Kepemimpinan; dan
 - b. Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Kepemimpinan
 4. Bidang Diklat Teknis dan Fungsional
Bidang ini dipimpin oleh seorang pejabat Eselon IIIa, yaitu Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional yang membawahi dua Kepala Subbidang setingkat Eselon IVa yaitu:
 - a. Subbidang Penyusunan Program dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional; dan
 - b. Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional yaitu Jabatan Fungsional Widyaiswara.

Bagan Struktur Organisasi Pusdiklat BPS dapat dilihat pada gambar 1.

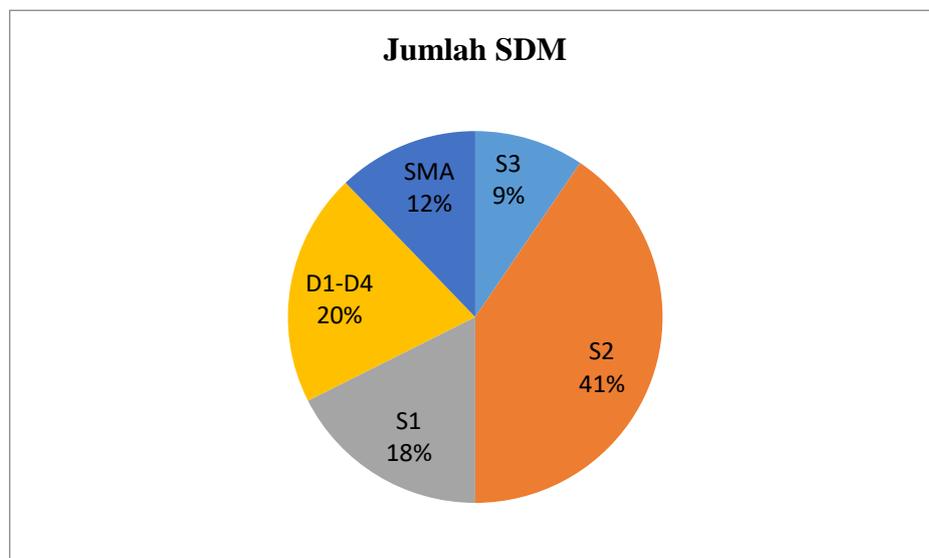


Gambar 1. Struktur Organisasi Pusdiklat BPS

1.4. Sumber Daya Manusia (SDM)

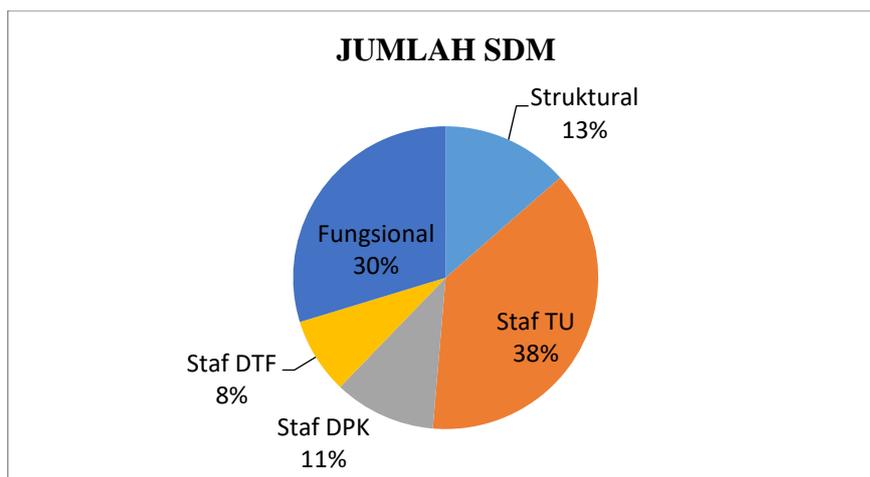
Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Pusdiklat BPS didukung dengan adanya Sumber Daya Manusia sebanyak 74 PNS aktif yang terdiri dari 63% laki-laki dan 37% perempuan. SDM Pusdiklat tergolong memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Mayoritas SDM Pusdiklat BPS berpendidikan S2 (42%), bahkan sudah ada yang berpendidikan S3 mencapai 9%, selainnya berpendidikan SMA, D1, D3, D4 dan S1. Dari sisi kepangkatan, sebagian besar SDM juga sudah mencapai pangkat sebagai Penata (Golongan III) sebanyak 48 orang, dan Pembina (Golongan IV) sejumlah 24 orang.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Pusdiklat BPS didukung dengan adanya Sumber Daya Manusia sebanyak 74 PNS aktif yang terdiri dari 63% laki-laki dan 37% perempuan. SDM Pusdiklat tergolong memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Mayoritas SDM Pusdiklat BPS berpendidikan S2 (42%), bahkan sudah ada yang berpendidikan S3 mencapai 9%, selainnya berpendidikan SMA, D1, D3, D4 dan S1. Keadaan ini dapat menjadi kekuatan bagi Pusdiklat BPS dalam pengembangan organisasi untuk mencapai VISI dan Misinya. Dari sisi kepangkatan, sebagian besar SDM juga sudah mencapai pangkat sebagai Penata (Golongan III) sebanyak 48 orang, dan Pembina (Golongan IV) sejumlah 24 orang.



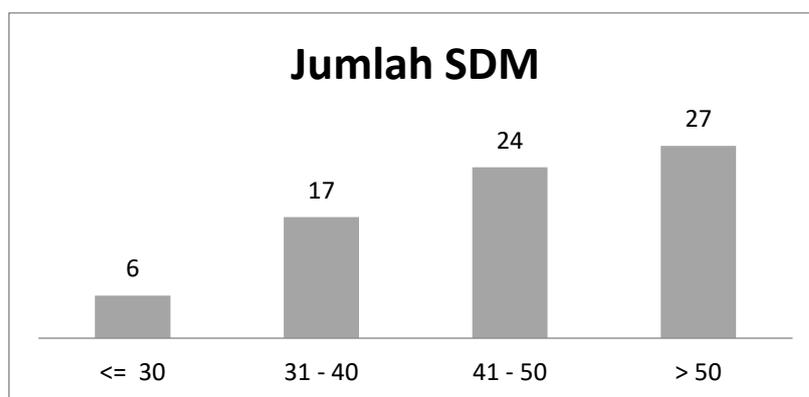
Gambar 2. Distribusi SDM berdasarkan Tingkat Pendidikan

Sejalan dengan tingkat pendidikan, untuk melaksanakan fungsi sebagai lembaga diklat didukung oleh staf fungsional sebanyak 22 orang yang berperan sebagai fasilitator/widyaiswara yang siap melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memfasilitasi proses belajar mengajar. Sedangkan tenaga administrasi di bagian TU mencapai 28 orang yang mampu membantu dalam mewujudkan lembaga diklat yang akuntabel.



Gambar 3. Distribusi SDM berdasarkan Status Jabatannya.

Jika dilihat komposisi umurnya, maka Pusdiklat BPS memiliki potensi SDM dari generasi milenial (usia kurang dari 40 tahun) sekitar sepertiganya. Hal ini merupakan potensi untuk mengembangkan Pusdiklat yang adaptif di era transformasi industri. Sedangkan sekitar sepertiganya terdiri dari SDM yang cukup pengalaman dengan usia diatas 50 tahun sehingga bisa dioptimalkan dalam sharing pengalaman untuk pengembangan diklat.



Gambar 4. Distribusi SDM berdasarkan Kelompok Umur.

Selain SDM yang memiliki status PNS, Pusdiklat juga didukung oleh SDM yang masih berstatus Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 32 orang. Dukungan ini diperlukan untuk membantu kegiatan kebersihan dan taman oleh juru bersih dan juru taman, pelayanan tamu oleh resepsionis, transportasi oleh pengemudi, kesehatan oleh perawat, keamanan oleh satpam dan administrasi oleh tenaga ilmu komunikasi, hukum dan arsiparis. Kualifikasi Pendidikan PPNPN sangat bervariasi mulai dari SD sampai tamat S1 sesuai dengan keahlian yang diperlukan. Dengan dukungan PPNPN ini menjadi mempermudah dan memperlancar kegiatan pelayanan yang diberikan Pusdiklat kepada *stakeholdernya*.

1.5. Potensi dan Permasalahan

Beberapa hal yang dapat dipetakan sebagai potensi dan permasalahan di pusdiklat BPS adalah sebagai berikut:

1.5.1. Potensi yang Dimiliki

Potensi yang merupakan kekuatan dan peluang yang dapat dikembangkan di Pusdiklat BPS adalah sebagai berikut:

1. Ketersediaan SDM yang berkualitas.

Pusdiklat BPS memiliki SDM yang berkualitas baik sebagai pengelola (Pejabat Struktural), pengajar/fasilitator (Widyaiswara) dan panitia pelaksana diklat. Berkualitas karena sebagian besar para pengelola telah mengikuti diklat MOT (*Management of Training*), para pengajar/fasilitator telah mengikuti diklat TOT (*Training of Trainers*) dan para panitia telah mengikuti diklat TOC (*Training of Officer Course*). Selain itu hampir semua komponen penyelenggara diklat telah mengikuti TOF (*Training of Officer Facilitator*) yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN-RI).

Khusus untuk pengelolaan TI, di Pusdiklat BPS tersedia SDM yang mampu membuat program, mengelola jaringan serta memiliki kemampuan dalam membuat LMS (*Learning Management System*) untuk pelaksanaan Diklat jarak jauh berbasis *web*.

2. Tersedianya infrastruktur/sarana prasarana diklat yang memadai.

Pusdiklat BPS didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai, seperti peralatan dan perlengkapan perkantoran untuk keperluan operasional dalam menunjang kegiatan diklat, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium komputer, sarana prasarana olah raga dan seni, mushola, dan lain-lain yang memberi kenyamanan bagi peserta diklat. Di samping itu Pusdiklat BPS memiliki sarana prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang sudah cukup memadai.

3. BPS sebagai lembaga pembina jabatan Fungsional Statistisi dan Pranata Komputer

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Statistisi Dan Angka Kreditnya Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa: "Instansi Pembina Jabatan Fungsional Statistisi adalah Badan Pusat Statistik (BPS)".

Selanjutnya pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 66/Kep/M.Pan/7/2003 Tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer Dan Angka Kreditnya Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa: "Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Komputer adalah Badan Pusat Statistik". Dengan adanya kedua peraturan ini, maka Pusdiklat BPS selain sebagai penyelenggara diklat Fungsional Statistisi dan diklat Fungsional Pranata Komputer, juga mempunyai wewenang untuk mengakreditasi lembaga diklat lain yang ingin menyelenggarakan kedua jenis diklat tersebut.

4. Mampu melaksanakan diklat berskala internasional.

Pusdiklat BPS telah mampu beberapa kali melaksanakan diklat berskala internasional bekerjasama dengan beberapa lembaga internasional seperti JICA (*Japan International Cooperation Agency*) dan UNSIAP (*United Nations Statistical Institute for Asia and the Pacific*).

5. Pusdiklat BPS berpeluang menciptakan diklat-diklat baru.

Peluang ini berkenaan dengan banyaknya permintaan kerjasama dari *stakeholders* untuk menyelenggarakan diklat teknis baru. Untuk menciptakan sebuah diklat baru dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu pembuatan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD), penyusunan Kurikulum dan pembuatan modul. Pusdiklat BPS telah beberapa kali membuat diklat baru seperti diklat Teknis Statistik Sektoral dan Diklat Teknis Administrasi Pranata komputer. Semua diklat baru tersebut juga telah diselenggarakan dengan baik.

6. Pusdiklat BPS berpeluang untuk menyelenggarakan diklat teknis statistik sektoral bagi aparat BPS dan aparat K/L/D/I.

Penyelenggaraan diklat pengelolaan statistik sektoral adalah peluang baru bagi pusdiklat dalam implementasi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) dalam hal peningkatan kompetensi penyelenggaraan statistik sektoral dalam kerangka Satu Data Indonesia. Penyelenggaraan diklat sektoral ini di dilakukan melalui koordinasi dengan *subject matter* di BPS.

1.5.2. Permasalahan yang Dihadapi

Pusdiklat BPS telah mengidentifikasi sejumlah permasalahan, baik itu kelemahan yang bersumber dari dalam organisasi, maupun tantangan yang bersumber dari luar organisasi. Adapun beberapa tantangan/permasalahan tersebut adalah:

1. Keterbatasan fasilitas/sarana ruang kelas untuk pelatihan tatap muka;
2. Belum optimalnya tenaga pengajar dan fasilitator;

3. Masih terdapat Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang disebabkan peserta tugas belajar yang tidak lulus;
4. Sarana prasarana yang mendukung tugas dan fungsi Bagian/Bidang yang adaptif;
5. Perubahan struktur birokrasi;
6. Adanya pandemi virus corona (Covid-19) di Indonesia;
7. Peraturan penyelenggaraan diklat yang terus berkembang;
8. Perkembangan TIK di era digital.

1.6. Sistematika Penyajian Laporan

Mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan kinerja Pusdiklat BPS tahun 2020 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I. **Pendahuluan**, pada bab ini disajikan latar belakang; maksud dan tujuan; tugas, fungsi, dan susunan organisasi; sumberdaya manusia (SDM); potensi dan permasalahan; serta sistematika penyajian laporan.
- Bab II. **Perencanaan Kinerja**, pada bab ini berisi Rencana Strategis (Renstra) Pusdiklat BPS 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja (PK) Pusdiklat BPS 2020.
- Bab III. **Akuntabilitas Kinerja**, pada bab ini berisi Capaian Kinerja Pusdiklat BPS 2020; Capaian Kinerja Pusdiklat BPS terhadap Target Renstra 2020-2024; Kegiatan Prioritas Pusdiklat BPS 2020; Upaya Efisiensi Pusdiklat BPS 2020; Realisasi Anggaran tahun 2020; dan Penghargaan tahun 2020
- Bab IV. **Penutup**, pada bab ini berisi tinjauan umum dan tindak lanjut perbaikan untuk tahun berikutnya.

BAB II

PERENCANAAN

KINERJA

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis (Renstra) Pusdiklat BPS 2020-2024

Berdasarkan Peraturan Kepala BPS Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024, Pusdiklat BPS menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Renstra tersebut dijadikan sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja seluruh aparat Pusdiklat BPS dalam menjalankan tugas dan fungsi pelaksanaan pembangunan statistik, utamanya dalam hal pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Sejalan dengan tugas dan fungsinya sebagai instansi yang menyelenggarakan diklat, Renstra Pusdiklat BPS 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang berkontribusi untuk pengembangan SDM. Visi yang disusun Pusdiklat BPS untuk mewujudkan kontribusi tersebut sebagaimana tercantum dalam Renstra 2020-2024 adalah:

“Menjadi Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Unggul dan Adaptif”

Visi Pusdiklat BPS tersebut searah dengan visi Sekretariat Utama BPS yaitu: “Menyediakan dan mengembangkan SDM yang unggul dan adaptif dalam rangka menghasilkan statistik yang berkualitas”.

Pengejawantahan nilai-nilai organisasi Badan Pusat Statistik, yakni profesional, berintegritas dan amanah (PIA) menjadi sangat penting diwujudkan dalam rangka pembangunan bidang SDM.

Profesional

“Dalam menyelenggarakan kegiatan statistik, insan statistik yang harus memiliki kapasitas dan kapabilitas yang diperlukan untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas”.

Integritas

“Insan statistik yang menyelenggarakan kegiatan statistik harus memiliki integritas yaitu memiliki sikap dan perilaku dalam melaksanakan profesi/tugasnya seperti dedikasi (pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban), disiplin (melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan), konsisten (satunya kata dengan perbuatan), terbuka

(menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik-kritik dari berbagai pihak), dan akuntabel (bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur)".

Amanah

"Amanah merujuk kepada sikap yang selalu mengedepankan kejujuran di dalam melaksanakan kegiatan statistik".

Dengan Visi Pusdiklat BPS 2020-2024, eksistensi Pusdiklat BPS sebagai pusat pendidikan dan pelatihan statistik menjadi semakin penting, karena sangat berperan dalam pembangunan bidang SDM guna menunjang upaya BPS meningkatkan penyediaan data yang berkualitas. Selain itu, visi Pusdiklat BPS juga memberikan ruang bagi berbagai pihak untuk ikut serta dan berperan aktif di bidang statistik melalui keikutsertaan aparaturnya dalam pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan Pusdiklat BPS.

Visi tersebut dicapai dengan misi sebagai berikut:

1. Mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan yang terintegrasi dan berkesinambungan dalam mewujudkan BPS Corporate University.
2. Mengelola dan mengembangkan kompetensi SDM yang relevan dengan kebutuhan terkini.
3. Mengelola dan mengembangkan layanan pendidikan dan pelatihan serta sarana prasarana yang modern dan akuntabel.

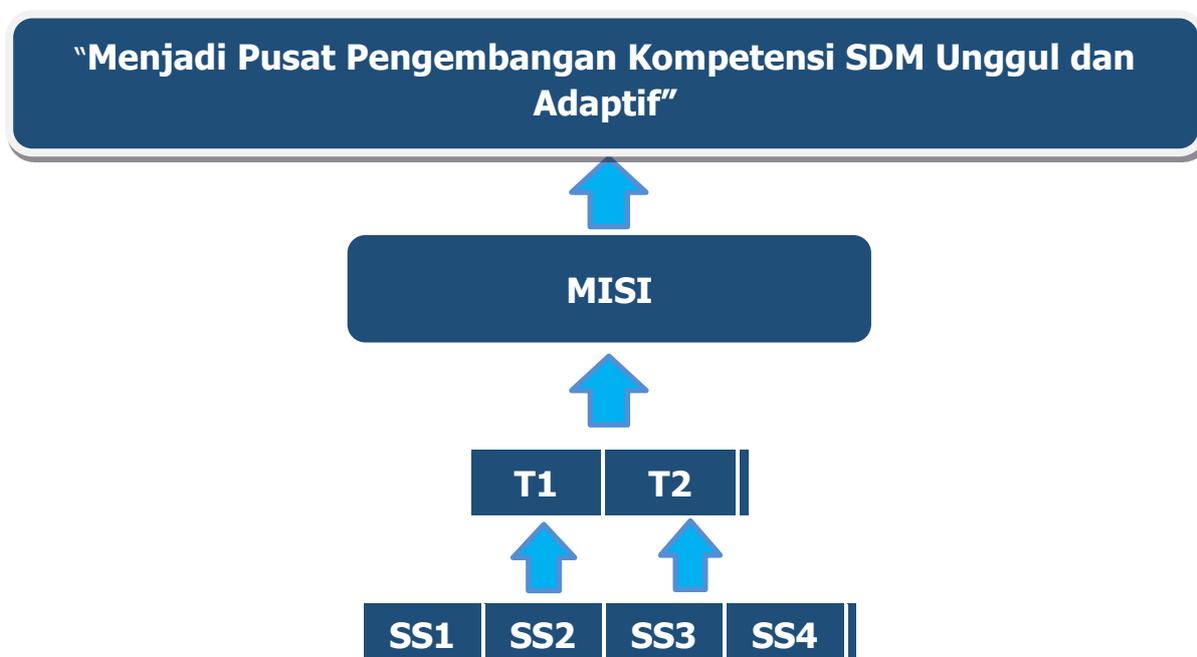
Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pusdiklat BPS 2020-2024, maka ditetapkan tujuan yang harus dicapai. Berdasarkan Renstra tersebut, tujuan dan sasaran strategis dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Strategis Pusdiklat BPS 2020-2024

Tujuan	Sasaran Strategis
T1. Meningkatkan layanan pendidikan dan pelatihan yang adaptif	SS1. Terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi mutakhir, dan aturan yang berlaku
T2. Meningkatkan kompetensi SDM	SS2 Terwujudnya SDM Pusdiklat BPS yang melakukan peningkatan kompetensi

	SS3 Terjalannya kerja sama dengan institusi pendidikan dan pelatihan dalam negeri dan luar negeri yang berkesinambungan
	SS4 Terwujudnya sarana dan prasarana yang <i>agile</i> dan modern, dalam mendukung peningkatan kinerja yang akuntabel

Berdasarkan Tabel 1 diatas, Pusdiklat BPS mempunyai dua tujuan dan empat sasaran strategis yang masing-masing memiliki indikator yang terukur sehingga dapat diketahui sejauh mana tingkat pencapaian kerjanya. Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Pusdiklat BPS dapat dilihat pada gambar 5 berikut:



Gambar 5. Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Pusdiklat BPS

2.2. Perjanjian Kinerja (PK) Pusdiklat BPS Tahun 2020

Pada awal tahun ditetapkan target dari masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang harus dicapai selama setahun. Target yang telah ditetapkan menjadi acuan capaian atau realisasi kinerja instansi. Penetapan target tersebut tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Target Perjanjian Kinerja Pusdiklat BPS pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2 berikut.

Di dalam Perjanjian Kinerja Pusdiklat BPS, target yang ditetapkan berasal dari beberapa indikator kinerja yang dapat mewakili hasil kinerja dari masing-masing sasaran strategis. Realisasi dari target perjanjian kinerja tersebut akan dimonitor setiap triwulanan, kemudian dilaporkan menjadi laporan interim (triwulanan) dan pada akhir tahun dilaporkan menjadi laporan kinerja.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Pusdiklat BPS Tahun 2020

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Tujuan 1. Meningkatkan layanan pendidikan dan pelatihan yang adaptif			
Terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi mutakhir, dan aturan yang berlaku	Persentase kepuasan peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat	Persen	85
Tujuan 2. Meningkatkan kompetensi SDM			
Terwujudnya SDM Pusdiklat BPS yang melakukan peningkatan kompetensi	Persentase SDM Pusdiklat yang melakukan peningkatan kompetensi	Persen	90
Terjalannya kerja sama dengan institusi pendidikan dan pelatihan dalam negeri dan luar negeri yang berkesinambungan	Persentase kelulusan peserta tugas belajar	Persen	90
Penguatan manajemen internal dan sumberdaya	Hasil penilaian SAKIP	Poin	70

Perjanjian Kinerja yang disusun selanjutnya diturunkan ke dalam perjanjian kinerja pada tingkat unit kerja Eselon III dan Eselon IV. Karena itu setiap unit kerja mempunyai

kontribusi terhadap penyusunan target kinerja Pusdiklat BPS. Peranan unit kerja Eselon III pada setiap penyusunan target indikator dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Kontribusi Unit Kerja Terhadap Penyusunan Target Indikator

Sasaran/Indikator	Bagian Tata Usaha	Bidang DPK	Bidang DTF
(1)	(2)	(3)	(4)
Sasaran Strategis 1. Terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi mutakhir, dan aturan yang berlaku			
Persentase kepuasan peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat	★	★	★
Sasaran Strategis 2. Terwujudnya SDM Pusdiklat BPS yang melakukan peningkatan kompetensi			
Persentase SDM Pusdiklat yang melakukan peningkatan kompetensi	★	★	★
Sasaran Strategis 3. Terjalinnnya kerja sama dengan institusi pendidikan dan pelatihan dalam negeri dan luar negeri yang berkesinambungan			
Persentase kelulusan peserta tugas belajar	★	★	★
Sasaran Strategis 4. Penguatan manajemen internal dan sumberdaya			
Hasil penilaian SAKIP	★	★	★

Keterangan:  : Penanggung Jawab ★ : Kontributor

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Pusdiklat BPS Tahun 2020

Capaian kinerja Pusdiklat BPS tahun 2020 diperoleh berdasarkan pencapaian dari indikator-indikator kinerja sasaran strategis selama tahun 2020. Pengukuran capaian kinerja dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan target indikator kinerja pada masing-masing sasaran. Indikator kinerja yang dimaksud merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki target pada Perjanjian Kinerja 2020 dan data realisasinya dapat diperoleh sesuai kegiatan yang dilakukan.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Pusdiklat BPS. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, begitu pula sebaliknya.

Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis

Tahun 2020 merupakan tahun pertama dari rencana strategis untuk lima tahun ke depan. Pada tahun ini Pusdiklat BPS mempunyai dua tujuan capaian kinerja yaitu (1) **Meningkatkan Layanan Pendidikan Dan Pelatihan Yang Adaptif** dan (2) **Meningkatkan Kompetensi SDM**. Tujuan pertama dicapai dengan satu sasaran strategis, yaitu: Terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi mutakhir, dan aturan yang berlaku. Sementara itu, untuk tujuan kedua dicapai dengan tiga sasaran strategis, yaitu: (1) Terwujudnya SDM Pusdiklat BPS yang melakukan peningkatan kompetensi, (2) Terjalinnya kerja sama dengan institusi pendidikan dan pelatihan dalam negeri dan luar negeri yang berkesinambungan, (3) Penguatan manajemen internal dan sumberdaya. Capaian kinerja dari indikator yang mengukur beberapa sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel 4.

Dari empat sasaran strategis yang telah ditentukan, secara umum diperoleh rata-rata capaian kinerja indikator sasaran strategis pada tahun 2020 sebesar 106,07 persen (Tabel 4). Dengan angka diatas 100 persen, diperoleh gambaran bahwa capaian kinerja telah melampaui dari target yang telah ditentukan. Keberhasilan ini merupakan capaian dan kerja keras dari *teamwork* seluruh pegawai Pusdiklat BPS dan dukungan dari *stakeholder* yang

terlibat dalam mewujudkan tujuan meningkatkan layanan pendidikan dan pelatihan yang adaptif dan meningkatkan kompetensi SDM.

Tabel 4. Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Pusdiklat BPS Menurut Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2020

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
T1: Meningkatkan Layanan Pendidikan Dan Pelatihan Yang Adaptif				
SS1: Terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi mutakhir, dan aturan yang berlaku				
Persentase kepuasan peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat	Persen	85	93,14	109,58
T2: Meningkatkan kompetensi SDM				
SS2: Terwujudnya SDM Pusdiklat BPS yang melakukan peningkatan kompetensi				
Persentase SDM Pusdiklat yang melakukan peningkatan kompetensi	Persen	90	95	105,56
SS3: Terjalinnnya kerja sama dengan institusi pendidikan dan pelatihan dalam negeri dan luar negeri yang berkesinambungan				
Persentase kelulusan peserta tugas belajar	Persen	90	100	111,11
SS4: Penguatan manajemen internal dan sumberdaya				
Hasil penilaian SAKIP	Poin	70	70,39	100,56
Rata-rata Capaian Indikator Sasaran 2020				106,07
Rata-rata Capaian Indikator Sasaran 2019				103,65

Bila diperhatikan pada Tabel 4, keberhasilan Pusdiklat BPS dalam mencapai target kinerja melebihi dari yang telah ditargetkan, tidak terlepas dari peranan masing-masing indikator kinerja yang memberikan sumbangan cukup besar dalam mencapai target yang telah ditentukan. Pada indikator sasaran strategis pertama yaitu persentase kepuasan peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat diperoleh capaian kinerja sebesar 109,58 persen.

Salah satu hal yang dapat digunakan untuk mengetahui kepuasan penyelenggaraan diklat adalah evaluasi diklat. Evaluasi diklat dapat digunakan untuk mengetahui efektivitas diklat. Evaluasi yang dilakukan pada saat diklat berlangsung secara umum adalah evaluasi peserta terhadap pengajar, sarana dan prasarana ruang kelas, ruang laboratorium, ruang kamar/asrama, konsumsi peserta, dan lain-lain yang menunjang pembelajaran. Namun,

karena pada tahun 2020 dengan adanya Pandemi Corona Virus (COVID-19) terdapat perubahan metode pembelajaran dari tatap muka menjadi online (jarak jauh). Untuk itu evaluasi dilakukan berbeda pada umumnya, yaitu (1) Evaluasi terhadap Widyaiswara/Pengajar; (2) Evaluasi terhadap penyelenggaraan, bahan dan materi pelatihan, serta LMS; dan (3) Evaluasi terhadap penguji, coach, dan mentor. Kriteria terhadap penilaian tersebut adalah kurang, baik, memuaskan, dan sangat memuaskan.

Berdasarkan evaluasi peserta pada akhir pelatihan, Peserta menyatakan secara umum widyaiswara/pengajar/fasilitator mendapatkan nilai 91,95 yang berarti sudah masuk kategori sangat baik. Untuk evaluasi terhadap penyelenggaraan, bahan dan materi pelatihan, serta LMS menunjukkan bahwa sebesar 2 persen menyatakan kurang, 24 persen menyatakan baik, 47 persen menyatakan memuaskan, dan 27 persen menyatakan sangat memuaskan. Sedangkan untuk evaluasi peserta bagi penguji, coach, dan mentor adalah sebagai berikut, sebesar 2 persen menyatakan baik, 19 persen menyatakan memuaskan, dan sebesar 79 persen menyatakan sangat memuaskan.

Selain evaluasi terhadap penyelenggaraan diklat, diperlukan juga Evaluasi Pasca Diklat (EPD). EPD merupakan alat untuk mendiagnosis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan diklat. Dengan EPD, keberhasilan dan kekurangan diklat dapat dianalisis lebih lanjut. Hasil EPD akan menjadi masukan (*feedback*) yang sangat penting dalam memperbaiki kualitas diklat dan menjaga keberlanjutan organisasi penyelenggara diklat. EPD menjadi alat ukur serta merupakan proses evaluasi diklat yang komprehensif untuk menangkap adanya kontribusi pengembangan SDM. Hasilnya akan memberikan data penting kepada semua pemangku kepentingan yang dapat dijadikan alat komunikasi bagi pengembangan SDM kepada organisasi.

Hasil dari kegiatan EPD menunjukkan bahwa tingkat kinerja alumni Diklatpim dan Latsar CPNS Golongan III secara umum memuaskan. Implementasi proyek perubahan alumni Diklatpim III dan Diklatpim IV dalam jangka menengah dan panjang masih sangat rendah, sedangkan kesinambungan aktualisasi substansi alumni Latsar CPNS Golongan III berjalan dengan baik serta bermanfaat untuk meningkatkan kinerja di unit kerja. Rekomendasi yang penting dilakukan dalam penyelenggaraan Diklatpim adalah melakukan monitoring secara berkala terhadap implementasi proyek perubahan jangka menengah dan panjang serta perlunya variasi bentuk inovasi dalam proyek perubahan dimana selama ini didominasi oleh bentuk aplikasi program komputer. Sedangkan untuk penyelenggaraan Latsar diantaranya peningkatan disiplin peserta tidak hanya saat Diklat namun sampai kembali di unit kerja.

Capaian kinerja pada indikator sasaran strategis kedua yaitu persentase SDM Pusdiklat yang melakukan peningkatan kompetensi adalah sebesar 105,56 persen. Peningkatan kompetensi terhadap pegawai dilakukan dalam rangka menunjang layanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Aparatur Negara BPS, sehingga diperoleh SDM yang berkualitas dan berkompeten di bidangnya. Kegiatan yang dilakukan berupa pelatihan, workshop, seminar, dan lain-lain baik sebagai peserta, pengajar, nara sumber, maupun panitia penyelenggara. Hal ini dilakukan oleh seluruh pegawai Pusdiklat baik struktural, widyaiswara, maupun staf/pelaksana yang kegiatannya di dalam ataupun di luar Pusdiklat/lembaga lainnya seperti pada Tabel 5.

Tabel 5. Jumlah Pegawai Pusdiklat BPS yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Tahun 2020

No	Penyelenggara	Jumlah peserta	Peran	
			Pengajar/Nara sumber/Pembicara	Peserta
1	Kementerian/Lembaga/Instansi luar Pusdiklat BPS	40	14	26
2	Pusdiklat BPS	98	0	98
	Total	138	14	124

Indikator sasaran strategis ketiga yang juga menunjukkan capaiannya lebih dari 100 persen adalah persentase kelulusan peserta tugas belajar dengan persentase sebesar 111,11 persen. Hal ini terjadi berkat terjalinnya kerja sama dengan institusi pendidikan dan pelatihan dalam negeri dan luar negeri yang berkesinambungan sesuai sasaran strategis yang ingin dicapai.

Penyelenggaraan program beasiswa APBN BPS merupakan salah satu wujud layanan Pusdiklat untuk mengakomodir pegawai BPS melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sehingga akan diperoleh SDM yang lebih berkualitas. Pada tahun 2020, dari target jumlah penerimaan peserta tugas belajar sebanyak 120 pegawai, terealisasi 158 pegawai mengikuti tugas belajar yang dibiayai BPS. Hal ini dikarenakan ada tambahan jurusan pada S2 yaitu jurusan Ilmu Komunikasi dan Ilmu Komputer di Universitas Indonesia dan Universitas Padjadjaran, serta pada S3 yaitu jurusan Kependudukan di Universitas Gadjah Mada.

3.2. Perkembangan Capaian Kinerja Pusdiklat BPS Tahun 2020 terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2019

Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan yang tertuang dalam indikator kinerja.

Dalam rangka mewujudkan visi Pusdiklat BPS yaitu **"Menjadi Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Unggul dan Adaptif"**, telah ditetapkan dua tujuan capaian kinerja dan empat indikator sasaran strategis seperti yang sudah dijelaskan pada sub bab 3.1. Bila dilihat perkembangannya bahwa rata-rata capaian indikator sasaran strategis mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, seperti pada Tabel 6. Hal ini menggambarkan bahwa perbaikan kinerja terus-menerus dilakukan secara berkesinambungan oleh seluruh pegawai dalam mewujudkan visi dan misi Pusdiklat BPS.

Tabel 6. Perbandingan rata-rata Capaian Indikator Sasaran Strategis Pusdiklat BPS Tahun 2017-2020

No.	Tahun	Rata-rata Capaian Indikator Sasaran (%)
1.	2017	95,43
2.	2018	103,61
3.	2019	103,65
4.	2020	106,07

Berkaitan dengan adanya perubahan visi, misi, tujuan, serta indikator sasaran dalam kurun waktu lima tahunan pada Renstra 2015-2019 dengan Renstra 2020-2024, sehingga perbandingan dilakukan hanya berdasarkan capaian rata-rata indikator sasaran, dan beberapa indikator yang terdapat pada tahun 2019 dan 2020.

Sasaran 1 : Terwujudnya Layanan Pendidikan dan Pelatihan yang Sesuai dengan Perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi Informasi Mutakhir, dan Aturan yang Berlaku

Pengembangan sumber daya manusia (*human resources development/HRD*) merupakan bagian dari proses bisnis sebuah organisasi. Bagi organisasi publik, untuk menciptakan sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi dan profesionalitas

yang tinggi, diperlukan peningkatan mutu dan pengembangan wawasan pegawainya. Upaya yang telah ditempuh oleh Pemerintah dalam peningkatan mutu profesionalisme dan pengembangan wawasan Aparatur Sipil Negara adalah melalui program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat).

Sejalan dengan hal tersebut di atas, Pusdiklat BPS dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara diklat, ingin mewujudkan layanan diklat yang sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi mutakhir, dan aturan yang berlaku sesuai dengan sasaran strategis pertama pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Dalam mewujudkan keberhasilan sasaran tersebut, capaian kinerja diukur melalui indikator persentase kepuasan peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat.

Tabel 7. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran Strategis 1 Tahun 2020

IKU	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian (%)	Realisasi 2019	Perubahan terhadap realisasi 2019 (%) ((3)/(5)*100)-100
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Persentase Kepuasan Peserta Diklat terhadap Penyelenggaraan Diklat	85	93,14	109,58	85,20	9,32

IKU 1: Persentase Kepuasan Peserta Diklat terhadap Penyelenggaraan Diklat

Penyelenggaraan diklat dapat terlaksana dengan baik karena adanya kerjasama antara penyelenggara, peserta diklat, dan pengajar/widyaiswara. Dalam upaya pelaksanaan diklat yang lebih baik dan peningkatan mutu penyelenggaraan diklat, perlu diketahui seberapa jauh kemampuan para peserta dalam menyerap materi, kemampuan dan kualitas tenaga pengajar/widyaiswara terhadap materi yang diberikan di kelas, serta pelayanan penyelenggara dan sarana prasarana yang memadai. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat pelayanan penyelenggara terhadap kegiatan diklat yang diadakan oleh Pusdiklat BPS, peserta diminta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan melalui saran-saran dan komentar, baik terhadap pengajar maupun penyelenggara. Melalui evaluasi tersebut dapat diketahui kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan diklat.

Kepuasan peserta diklat merupakan salah satu yang dijadikan indikator capaian kinerja untuk memenuhi sasaran terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan. Tinggi rendahnya capaian kinerja yang diperoleh menjadi salah satu acuan bagi Pusdiklat BPS agar dapat

meningkatkan mutu pelayanan diklat ke arah yang lebih baik di masa mendatang. Untuk mengetahui capaian kinerja dari indikator tersebut dapat dilihat melalui besarnya realisasi terhadap target Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2020. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik.

Berdasarkan tabel 7 dapat dilihat bahwa capaian kinerja pada indikator kepuasan peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat adalah sebesar 109,58 persen. Angka tersebut diperoleh dari realisasi sebesar 93,14 persen dibandingkan target PK 2020 sebesar 85 persen. Tingkat capaian yang diperoleh lebih tinggi dari yang ditargetkan. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang sebesar 85,20 persen, maka terjadi kenaikan sebesar 9,32 persen.

Kenaikan capaian kinerja tersebut merupakan kabar yang menggembirakan, dan sebagai pendorong ke arah yang lebih baik lagi dalam melakukan layanan diklat. Perbaikan terjadi berkat kerjasama dan komitmen para penyelenggara dan pengajar untuk selalu memperbaiki layanan berdasarkan masukan dari peserta.

Widyaiswara/pengajar sebagai ujung tombak dalam mentransfer ilmu kepada peserta diklat dapat menyampaikan materi dengan baik. Hal ini tentunya atas semangatnya dengan terus mengembangkan kompetensi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang berlaku serta teknologi dan informasi menuju era digitalisasi.

Dalam rangka menunjang era digitalisasi terutama untuk memfasilitasi metode pembelajaran secara *online* telah dilakukan penyempurnaan sarana dan prasarana kebutuhan diklat terutama yang berkaitan dengan teknologi dan informasi. Sarana prasarana pendukung pembelajaran dalam bentuk *learning management system* dan pendukung administrasi dalam bentuk *smart office*.

Di sisi lain untuk menunjang kenyamanan peserta dalam mengikuti diklat tatap muka, telah dilakukan pembenahan fasilitas-fasilitas seperti kamar asrama, kelas, laboratorium, dan fasilitas lainnya melalui pemeliharaan bangunan dan gedung. Untuk meningkatkan sarana diklat di bidang kesehatan dan hiburan, Pusdiklat BPS menyediakan fasilitas alat-alat fitness, kursi pijat elektrik, dan alat musik karaoke yang berada di ruang khusus di gedung basement. Sarana tersebut diharapkan dapat menambah fasilitas peserta sebagai penunjang kesehatan dan hiburan di sela-sela kesibukan mengikuti diklat. Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan sarana prasarana diklat tersebut juga merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan diklat.

Target dan realisasi persentase kepuasan peserta dihitung berdasarkan penyelenggaraan diklat, baik diklat prajabatan dan kepemimpinan maupun diklat teknis dan fungsional. Pembinaan pegawai melalui diklat prajabatan dan kepemimpinan dilakukan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM baik dari sisi kemampuan teknis maupun manajerial untuk mendukung kelancaran tugas sebagai Aparatur Sipil Negara. Sementara itu, diklat teknis dan fungsional diselenggarakan untuk menghasilkan SDM yang memiliki kompetensi di bidang teknis dan peningkatan kompetensi pada pegawai yang menduduki jabatan fungsional.

Informasi tentang diklat-diklat yang telah diselenggarakan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Bidang Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan

1.1. Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS)

Sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), ditetapkan jenis diklat secara umum adalah Diklat Prajabatan dan Diklat dalam Jabatan. Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III mulai tahun 2017 Diklat Prajabatan berubah nomenklatur menjadi Pelatihan Dasar (Latsar) Calon PNS Golongan III.

Latsar CPNS merupakan syarat pengangkatan CPNS menjadi PNS. Pelatihan ini dilaksanakan untuk menghasilkan PNS profesional yang berkarakter dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa.

Latsar CPNS merupakan salah satu jenis Pelatihan yang strategis pasca UU ASN dalam rangka pembentukan karakter PNS dan membentuk kemampuan bersikap dan bertindak profesional mengelola tantangan dan masalah keragaman sosial kultural dengan menggunakan perspektif *whole of government* atau *one government* yang didasari nilai-nilai dasar PNS berdasarkan kedudukan dan peran PNS dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada setiap pelaksanaan tugas jabatannya sebagai pelayan masyarakat sebagai wujud nyata bela negara seorang PNS.

Penyelenggaraan Latsar yang dilakukan sejak Juni sampai November pada Tahun 2020 dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 yang direncanakan semula secara klasikal maka berubah metode menjadi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Hal ini, berdasarkan Surat

Sestama dengan Nomor B-221/BPS/2000/04/2020 dan Surat Edaran dari Lembaga Administrasi Negara RI (LAN RI) dengan Nomor 19/K.1/HKM.02.3/2020 tentang Perencanaan Kegiatan Pelatihan dengan Metode Pembelajaran Jarak Jauh (*Distance Learning*).

1.1.1. Pelatihan Dasar CPNS Golongan II

Pada tahun 2020, Pusdiklat BPS melaksanakan Pelatihan Dasar CPNS Golongan II. Berdasarkan Peraturan LAN RI Nomor 12 Tahun 2018, pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS Golongan II dilaksanakan selama 51 hari kerja atau 511 Jam Pelatihan (JP), dengan perincian 21 hari kerja atau setara dengan 191 JP untuk pembelajaran klasikal dan 30 hari kerja atau setara dengan 320 JP untuk pembelajaran non klasikal atau aktualisasi di tempat kerja. Akan tetapi, dengan adanya pandemi Covid-19, maka seluruh kegiatan pelatihan yang biasanya dilaksanakan secara klasikal kemudian dirubah menjadi pembelajaran jarak jauh (PJJ).



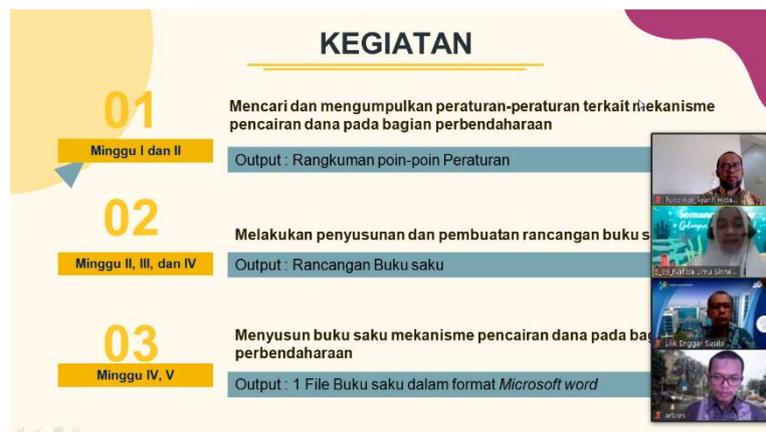
Gambar 6. Kegiatan Pembukaan Pelatihan Dasar CPNS Golongan II

Struktur kurikulum Pelatihan Dasar CPNS Golongan II terbagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu Kurikulum Pembentukan Karakter PNS dan Kurikulum Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas. Kurikulum pembentukan karakter PNS, terdiri dari 4 (empat) Agenda, yaitu Agenda Sikap Perilaku Bela Negara, Agenda Nilai-nilai Dasar PNS, Agenda Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI, dan Agenda Habitiasi. Sedangkan kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas terdiri dari 2 (dua), yaitu Kompetensi teknis administratif dan Kompetensi teknis substantif.



Gambar 7. Kegiatan Pembelajaran Pelatihan Dasar CPNS Golongan II

Metode pembelajaran yang digunakan dalam Pelatihan Dasar CPNS Golongan II ini adalah ceramah yang dikombinasi dengan tanya jawab, diskusi kelompok, permainan, pendalaman materi, dan seminar. Pada tahun 2020 Pusdiklat BPS melaksanakan Pelatihan Dasar CPNS Golongan II sebanyak 3 angkatan yaitu Angkatan III s.d. V dengan peserta sebanyak 124 orang.



Gambar 8. Kegiatan Seminar Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS Golongan II

1.1.2. Pelatihan Dasar CPNS Golongan III

Pada tahun 2020, Pusdiklat BPS melaksanakan Pelatihan Dasar CPNS Golongan III. Berdasarkan Peraturan LAN RI Nomor 12 Tahun 2018, pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS Golongan III dilaksanakan selama 51 hari kerja atau 511 Jam Pelatihan (JP), dengan perincian 21 hari kerja atau setara dengan 191 JP untuk pembelajaran klasikal dan 30 hari kerja atau setara dengan 320 JP untuk pembelajaran non klasikal atau aktualisasi di tempat kerja. Akan tetapi, dengan adanya pandemi Covid-19, maka seluruh kegiatan pelatihan yang biasanya dilaksanakan secara klasikal kemudian dirubah menjadi pembelajaran jarak jauh (PJJ).



**Gambar 9. Kegiatan Pembelajaran Agenda Sikap Perilaku Bela Negara
Pelatihan Dasar CPNS Golongan III**

Struktur kurikulum Pelatihan Dasar CPNS Golongan III terbagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu Kurikulum Pembentukan Karakter PNS dan Kurikulum Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas. Kurikulum pembentukan karakter PNS, terdiri dari 4 (empat) Agenda, yaitu Agenda Sikap Perilaku Bela Negara, Agenda Nilai-nilai Dasar PNS, Agenda Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI, dan Agenda Habitiasi. Sedangkan kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas terdiri dari 2 (dua), yaitu Kompetensi teknis administratif dan Kompetensi teknis substantif.



Gambar 10. Kegiatan Seminar Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS Golongan III

Metode pembelajaran yang digunakan dalam Pelatihan Dasar CPNS Golongan III ini adalah ceramah yang dikombinasi dengan tanya jawab, diskusi kelompok, permainan, pendalaman materi, dan seminar. Pada tahun 2020 Pusdiklat BPS melaksanakan Pelatihan Dasar CPNS Golongan III sebanyak 13 angkatan (7 *batch*) yaitu Angkatan XLVII s.d. LIX dengan peserta sebanyak 467 orang.



Gambar 11. Kegiatan Penutupan Pelatihan Dasar CPNS Golongan III

Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan Latsar CPNS, baik Golongan II maupun Golongan III, yaitu terdapat peserta yang lulus tunda karena belum berhasil menyelesaikan kegiatannya sehingga yang bersangkutan diberikan waktu tambahan untuk menyelesaikan dan menyempurnakan hasil aktualisasinya. Selain itu, terdapat peserta yang sakit sehingga tidak dapat maksimal dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Namun, yang bersangkutan berhasil menyelesaikan kegiatan pelatihan walaupun dengan hasil yang tidak optimal. Kendala teknis yang lain yang dialami selama pelatihan adalah dalam penerbitan Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP). Saat ini untuk penerbitan STTP oleh LAN disediakan sebuah aplikasi yang bernama *smartbangkom*. Karena

aplikasi ini baru sehingga masih terdapat beberapa penyesuaian-penyesuaian terkait penggunaan aplikasi. Selain itu, masih adanya *error* dalam sistem juga menghambat dalam penerbitan STTP. Namun, dengan kerja sama yang baik antara pihak Pusdiklat BPS dan LAN RI, maka masalah yang terjadi terkait dengan penerbitan STTP dapat diatasi. Selain itu, dengan sistem pembelajaran jarak jauh, jaringan internet dan listrik di daerah juga menjadi suatu kendala. Seperti halnya pada saat pembelajaran, ada peserta yang tidak bisa *full* mengikuti pembelajaran karena jaringan internet terputus. Bahkan saat seminar harus mencari tempat yang dirasa jaringan internetnya baik, walaupun jauh dari lokasi kantor atau tempat tinggal. Salah satu solusinya, peserta yang memang berasal dari wilayah yang jaringan internetnya sulit, memilih pindah lokasi kerja/belajar ke kota provinsi atau kabupaten terdekat yang memiliki jaringan internet bagus.

1.2. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) bertujuan membentuk moral, kompetensi, dan sikap PNS untuk menduduki jabatan eselon tertentu. Pada tahun 2020, Pusdiklat BPS menyelenggarakan Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) tingkat IV dan tingkat III.

Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara (Perka LAN) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (Kepka LAN) Nomor 1005/K.1/PDP.07/2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, maka sejak Tahun 2020 Diklatpim Tingkat IV berubah nomenklatur menjadi Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP). Sedangkan berdasar pada Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara (Perka LAN) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (Kepka LAN) Nomor 1007/K.1/PDP.07/2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator, maka sejak Tahun 2020 Diklatpim Tingkat III berubah nomenklatur menjadi Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA).

1.2.1. Diklatpim Tingkat IV (Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, PKP)

Diklatpim tingkat IV/PKP bertujuan membentuk kompetensi kepemimpinan operasional dan membentuk pemimpin perubahan pada pejabat struktural eselon IV yang akan berperan dan melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di instansinya masing-masing. Melalui PKP diharapkan setiap peserta pelatihan memiliki kemampuan melaksanakan pelayanan publik pada sektor yang menjadi tanggung jawabnya. Selain itu, melalui pelatihan ini

diharapkan terwujudnya kesamaan visi dan misi, serta dapat melaksanakan dan meningkatkan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dalam menjalankan pelayanan terhadap masyarakat.



Gambar 12. Kegiatan Pembukaan Diklatpim Tingkat IV/PKP

Proses kegiatan pelatihan dilakukan dengan pendekatan proses belajar orang dewasa (andragogi). Berdasarkan pendekatan ini maka metode yang digunakan adalah ceramah/kuliah, diskusi, seminar, praktek, simulasi, studi kasus, dan studi lapangan. Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara (Perka LAN) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (Kepka LAN) Nomor 1005/K.1/PDP.07/2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, maka sejak Tahun 2020 Diklatpim Tingkat IV berubah nomenklatur menjadi Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP).

PKP terbagi dalam 4 agenda pembelajaran, yaitu Agenda Kepemimpinan Pancasila (Agenda 1), Agenda Kepemimpinan Pelayanan (Agenda 2), Agenda Pengendalian Pekerjaan (Agenda 3), dan Agenda Aktualisasi Kepemimpinan (Agenda 4). Untuk Agenda 1 sampai dengan 4 dilakukan secara *on campus* dengan jumlah JP sebanyak 290 JP atau 36 hari pelatihan. Sedangkan implementasi aksi perubahan kinerja pelayanan publik yang dilaksanakan di tempat kerja atau *off campus* dengan jumlah JP sebanyak 540 JP atau 60 hari kalender.



Gambar 13. Kegiatan Pembelajaran Diklatpim Tingkat IV

Pada tahun anggaran 2020, BPS bekerja sama dengan LAN RI telah melaksanakan PKP sebanyak 4 angkatan yaitu Angkatan ke-1 sampai dengan Angkatan ke-4 dengan jumlah peserta sebanyak 140 orang pada bulan Januari sampai Juli. Dikarenakan adanya Pandemi Covid-19, maka pelaksanaan pelatihan tidak bisa dilaksanakan secara klasikal secara keseluruhan.

Untuk PKP Angkatan ke-1 s.d. 3, kegiatan pembelajaran dapat dilaksanakan secara klasikal, kecuali pada Seminar Rancangan PKP Angkatan ke-3 dilaksanakan secara virtual karena sudah diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan adanya kebijakan *Work From Home* (WFH). Sedangkan untuk PKP Angkatan ke-4 yang baru berjalan secara klasikal selama 2 minggu di Pusdiklat BPS, akhirnya dihentikan dan seluruh peserta dikembalikan ke unit kerjanya. Selanjutnya, Pusdiklat BPS melakukan persiapan pelaksanaan PJJ kurang lebih 1 minggu. Kemudian, pembelajaran dilanjutkan dengan metode *distance learning* dimana peserta berada di unit kerjanya di masing-masing daerah. Hal ini, berdasarkan Surat Edaran dari Lembaga Administrasi Negara RI (LAN RI) dengan Nomor: 19/K.1/HKM.02.3/2020 tentang Perencanaan Kegiatan Pelatihan dengan Metode Pembelajaran Jarak Jauh (*Distance Learning*). Untuk kegiatan Seminar Implementasi Aksi Perubahan PKP Angkatan ke-1 s.d. 4 dilaksanakan secara virtual.



Gambar 14. Kegiatan Pembelajaran Diklatpim Tingkat IV

1.2.2. Diklatpim Tingkat III (Pelatihan Kepemimpinan Administrator, PKA)

Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) tingkat III/PKA bertujuan meningkatkan kompetensi kepemimpinan pejabat struktural eselon III yang akan berperan dan melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di instansinya masing-masing. Melalui Diklatpim diharapkan setiap peserta diklat memiliki kemampuan melaksanakan pelayanan publik pada sektor yang menjadi tanggung jawabnya. Selain itu, melalui pelatihan ini diharapkan terwujudnya kesamaan visi dan misi, serta dapat melaksanakan dan meningkatkan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dalam menjalankan pelayanan terhadap masyarakat.



Gambar 15. Kegiatan Pembukaan Diklatpim Tingkat III

Proses kegiatan Diklat dilakukan dengan pendekatan proses belajar orang dewasa (andragogi). Berdasarkan pendekatan ini maka metode yang digunakan adalah ceramah/kuliah, diskusi, seminar, praktek, simulasi, studi kasus dan observasi lapangan. Seperti halnya Diklatpim Tingkat IV/PKP, PKA juga terbagi dalam 4 agenda pembelajaran, yaitu Agenda Kepemimpinan Pancasila dan Nasionalisme (Agenda 1), Agenda Kepemimpinan Kinerja (Agenda 2), Agenda Manajemen Kinerja (Agenda 3), dan Agenda Aktualisasi Kepemimpinan (Agenda 4). Untuk Agenda 1 sampai dengan 4 dilakukan secara *on campus* dengan jumlah JP sebanyak 257 JP atau 31 hari pelatihan. Sedangkan implementasi aksi perubahan kinerja pelayanan publik yang dilaksanakan di tempat kerja atau *off campus* dengan jumlah JP sebanyak 540 JP atau 60 hari kalender.



Gambar 16. Kegiatan Pembelajaran Diklatpim Tingkat III

Pada Tahun 2020 dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 penyelenggaraan PKA pada bulan Juni sampai November, maka pelaksanaan pelatihan yang biasanya dilaksanakan secara klasikal berubah metode menjadi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Hal ini, berdasarkan Surat Sestama dengan Nomor B-221/BPS/2000/04/2020 dan Surat Edaran dari Lembaga Administrasi Negara RI (LAN RI) dengan Nomor 19/K.1/HKM.02.3/2020 tentang Perencanaan Kegiatan Pelatihan dengan Metode Pembelajaran Jarak Jauh (*Distance Learning*).



Gambar 17. Kegiatan Pembelajaran Diklatpim Tingkat III

Saat perencanaan, peserta yang akan mengikuti PKA Angkatan I sebanyak 40 orang yang berasal dari unit kerja BPS baik di pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Mereka adalah para pejabat administrator yang telah bertugas dan/atau dilantik sebagai Kepala Bagian, Kasubdit, Kepala Bidang maupun Kepala BPS Kabupaten/Kota. Namun, saat pembelajaran baru berlangsung kurang lebih 1 minggu, salah seorang peserta yang berasal dari BPS provinsi Papua menderita sakit malaria dan menurut dokter yang berwenang dinyatakan tidak bisa melanjutkan pelatihan. Berdasarkan hal tersebut, akhirnya Pusdiklat BPS memutuskan untuk memberhentikan peserta tersebut dari kegiatan PKA. Sehingga

output dari Diklatpim Tk III/PKA Angkatan I yaitu Alumni Peserta Diklat sejumlah 39 peserta.

1.2.3. Diklatpim Tingkat I dan II (Pelatihan Kepemimpinan Nasional, PKN Tk. I dan II)

Dalam penyelenggaraan Diklatpim Tingkat II seperti ini, peserta dituntut untuk menunjukkan kinerjanya dalam merancang perubahan di unit kerjanya, memimpin perubahan tersebut hingga menimbulkan hasil yang signifikan. Kemampuan memimpin perubahan ini kemudian menentukan keberhasilan peserta tersebut dalam penyelenggaraan Diklatpim Tingkat II. Dengan demikian, pembaharuan Diklatpim Tingkat II ini diharapkan dapat menghasilkan alumni yang tidak hanya memiliki kompetensi, tetapi juga mampu menunjukkan kinerjanya dalam memimpin perubahan.

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah diharapkan dapat menghasilkan alumni yang tidak hanya memiliki kompetensi, tetapi juga mampu menunjukkan kinerjanya dalam memimpin perubahan. Selain itu, tujuan lainnya adalah meningkatkan kompetensi kepemimpinan pejabat struktural Eselon II dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pada Tahun 2020, telah dikirimkan pejabat struktural Eselon II untuk mengikuti PKN Tingkat II di Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI sebanyak 8 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 5 orang mengikuti di LAN RI DKI Jakarta, 2 orang di LAN RI Jawa Tengah, dan 1 orang di LAN RI Jawa Timur. Selain itu untuk PKN Tingkat I juga diikuti sebanyak 2 orang di LAN RI DKI Jakarta. Kegiatan PKN I dan II diikuti secara *blended* yaitu pembelajaran secara online dan seminar melalui tatap muka. Output dari PKN tersebut adalah Alumni Peserta Diklat.

1.3. Evaluasi Pasca Diklat (EPD)

Pengembangan sumberdaya manusia (*human resources development/HRD*) merupakan bagian dari proses bisnis sebuah organisasi. Bagi organisasi publik, untuk menciptakan sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi dan profesionalitas yang tinggi, diperlukan peningkatan mutu dan pengembangan wawasan pegawainya. Upaya yang telah ditempuh oleh Pemerintah dalam peningkatan mutu profesionalisme dan pengembangan wawasan Pegawai Negeri Sipil adalah melalui program Pelatihan dan Pelatihan (Diklat).

Diklat merupakan sebuah proses untuk dapat meningkatkan kinerja organisasi sebagai nilai balikan investasi (*return on investment*) dari program pengembangan pegawai. Sejalan dengan tujuan tersebut, BPS melalui Pusdiklat berupaya untuk selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas Diklat setiap tahunnya. Diharapkan dengan Diklat tersebut ada peningkatan kompetensi pegawai baik kompetensi teknis maupun manajerial.

EPD merupakan alat untuk mendiagnosis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat keberhasilan diklat. Dengan EPD, keberhasilan dan kekurangan diklat dapat dianalisis lebih lanjut. Hasil EPD akan menjadi masukan (*feedback*) yang sangat penting dalam memperbaiki kualitas diklat dan menjaga keberlanjutan organisasi penyelenggara diklat. EPD menjadi alat ukur serta merupakan proses evaluasi diklat yang komprehensif untuk menangkap adanya kontribusi pengembangan SDM. Hasilnya akan memberikan data penting kepada semua pemangku kepentingan yang dapat dijadikan alat komunikasi bagi pengembangan SDM kepada organisasi.

Selain itu, mengacu pada pedoman penyelenggaraan Diklat, Evaluasi Pasca Diklat merupakan rangkaian dari penyelenggaraan diklat (Perka LAN Nomor 25/2017 untuk Pelatihan Dasar CPNS Golongan III, Perka LAN Nomor 19/2015 untuk Diklatpim III, dan Perka LAN Nomor 20/2015 untuk Diklatpim IV). EPD merupakan mata rantai dari siklus penyelenggaraan diklat yang harus dilakukan. Oleh karena itu, Pusdiklat BPS pada tahun 2020 melakukan EPD untuk Diklat-diklat yang telah diselenggarakan. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai bahan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan diklat di masa yang akan datang, melalui pengembangan/penyempurnaan tata cara penyelenggaraan yang benar-benar mengacu kepada kompetensi spesifik sesuai kebutuhan pengguna hasil diklat. Evaluasi Pasca Diklat (EPD) tahun 2020 ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh diklat terhadap kinerja alumni Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IV serta Pelatihan Dasar (Latsar) tahun 2019. Metode yang digunakan adalah survei daring untuk semua alumni dan wawancara mendalam secara sampling.

Kegiatan EPD ini meliputi survei daring untuk seluruh alumni diklat dan unit kerjanya dan survei wawancara mendalam (*indepth interviews*) terhadap sampel alumni. Respondennya adalah alumni, atasan alumni, bawahan (bagi yang mempunyai jabatan struktural) dan teman kerja alumni yang selevel. Yang dimaksud dengan alumni adalah pegawai yang telah menyelesaikan Diklatpim Tingkat III, Diklatpim Tingkat IV, dan Pelatihan Dasar CPNS Golongan III (Latsar III) pada tahun 2019.

Berdasarkan hasil Evaluasi Pasca Diklat yang dilakukan secara daring maupun wawancara mendalam, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Diklat secara umum berdampak pada peningkatan sikap dan perilaku alumni diklat sebagai ASN. Tingkat integritas dan cara berkolaborasi pimpinan eselon III dan eselon IV alumni Diklatpim dalam kategori memuaskan. Sikap dan perilaku alumni Latsar Golongan III, diantaranya akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi, *whole government* dan pelayanan publik dalam kategori memuaskan,

sementara manajemen ASN dalam kategori cukup memuaskan sehingga perlu ada perlakuan meningkatkan kondisi tersebut;

2. Tingkat kinerja alumni Diklatpim secara umum memuaskan. Tingkat kinerja alumni Latsar CPNS Golongan III masuk kategori memuaskan;
3. Implementasi proyek perubahan alumni Diklatpim III dan Diklatpim IV dalam jangka menengah dan panjang masih sangat rendah;
4. Pelaksanaan aktualisasi substansi alumni Latsar CPNS Golongan III berjalan dengan baik serta bermanfaat bagi pengembangan kepribadian alumni, meningkatkan kompetensi dan meningkatkan kinerja di unit kerja.

2. Bidang Diklat Teknis dan Fungsional

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas SDM di lingkungan Badan Pusat Statistik adalah melalui pendidikan dan pelatihan di bidang teknis. Oleh karena itu, peran Pusdiklat BPS bersama unit kerja teknis terkait sangat dibutuhkan dalam merancang jenis diklat teknis substansi yang efektif dan efisien sehingga dapat menghasilkan SDM yang memiliki kompetensi di bidang teknis.

Pusdiklat BPS menyelenggarakan juga Diklat Fungsional Statistisi dan Pranata Komputer, yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi para pejabat fungsional baik untuk pegawai BPS ataupun untuk pegawai Kementerian/Lembaga lain.

Pada tahun 2020 telah dilaksanakan 16 (enam belas) kegiatan diklat yang terdiri dari Diklat Fungsional sebanyak 4 (empat) diklat, Diklat Teknis sebanyak 12 (dua belas) diklat, Diklat Pengadaan Barang/Jasa sebanyak 16 (enam belas) diklat serta Diklat Bendaharawan sebanyak 3 (tiga) diklat. Total Peserta yang dilatih adalah sebanyak 1.461 orang. Penjelasan laporan kegiatan selengkapnya adalah sebagai berikut :

2.1. Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional

2.1.1. Diklat Fungsional Statistisi Tingkat Ahli

Diklat fungsional statistisi tingkat ahli adalah diklat yang bertujuan untuk memberikan pemahaman serta pelatihan kepada PNS yang berminat untuk menduduki jabatan fungsional statistisi pada tingkat ahli. Adapun sasaran dari diklat ini adalah pegawai yang bekerja di Instansi Pemerintahan yang akan menduduki dan melaksanakan tugas pada Jabatan Fungsional Statistisi Tingkat Ahli. Kegiatan ini dibiayai dari sumber dana APBN BPS tahun 2020.

Pada tahun 2020 diklat ini dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali. Diklat Fungsional Statistisi Tingkat Ahli dilaksanakan pada tanggal 3 Februari – 4 Maret 2020 di Pusdiklat BPS

Jl. Raya Jagakarsa No. 70, Lenteng Agung, Jakarta, dengan jumlah peserta 29 orang, yang terdiri dari 17 laki-laki dan 12 perempuan. Ada sebanyak 18 peserta berasal dari BPS yang merupakan perwakilan dari BPS Pusat maupun BPS Provinsi dan sisanya 11 orang peserta non BPS yakni dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Pemerintah Kabupaten Solok, Solok Selatan, Lima Puluh Kota, Bekasi, Purworejo serta dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Jawa Timur.

Pengajar diklat adalah para pejabat struktural dan fungsional pusdiklat BPS dan BPS Pusat yang berkompeten di bidang masing-masing. Evaluasi terhadap peserta diklat adalah evaluasi nilai yang dilakukan dengan menjumlahkan seluruh unsur-unsur penilaian sesuai persyaratan nilai yang ditentukan dalam aturan pedoman penyelenggaraan diklat. Dari hasil evaluasi nilai memperlihatkan bahwa rata-rata nilai ujian seluruh peserta diklat sebesar 81,17 dengan nilai tertinggi 85,40 dan nilai terendah 78,39. Seluruh peserta Diklat Fungsional Statistisi Tingkat Ahli Tahun 2020 dinyatakan LULUS dan berhak mendapatkan sertifikat tanda kelulusan. Semua peserta berhasil menyelesaikan diklat dengan tingkat kelulusan 100 persen.



Gambar 18. Pembukaan Diklat Fungsional Statistisi Tingkat Ahli

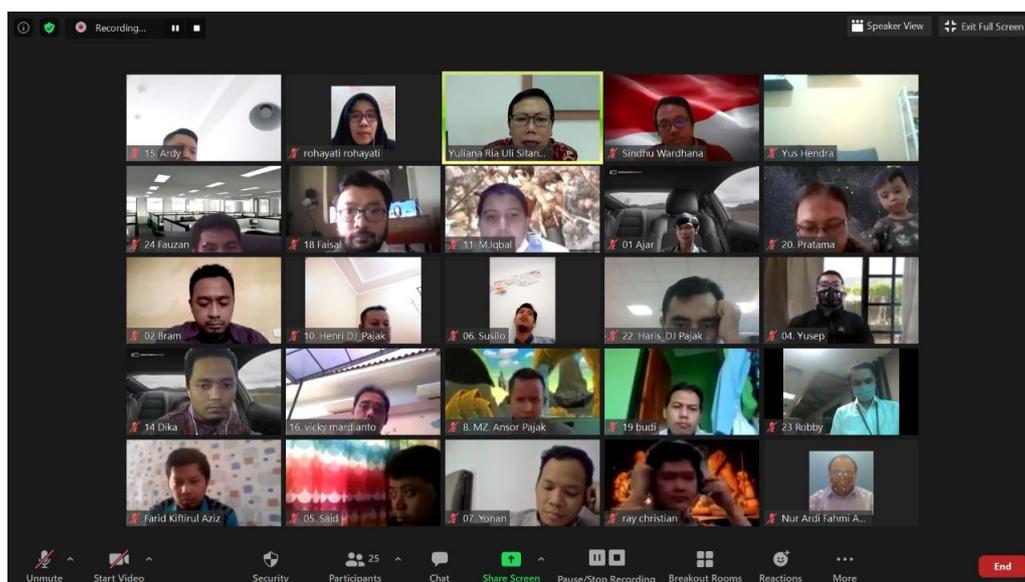
2.1.2. Diklat Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli (PNBP)

Pada tahun 2020 Pusdiklat BPS telah melaksanakan Diklat Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli PNBP. Tujuan diklat tersebut sebagai bentuk melaksanakan tugas

pokok dan fungsi BPS sebagai instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Komputer; melaksanakan tugas pokok dan fungsi pusdiklat sebagai penyelenggara diklat teknis dan fungsional selain itu; juga bertujuan untuk membentuk standar kompetensi yang perlu dimiliki oleh pejabat fungsional pranata komputer.

Sasaran diklat adalah pegawai yang bekerja di Instansi Pemerintahan di luar BPS yaitu dari Kementerian Keuangan RI yang akan menduduki dan melaksanakan tugas pada Jabatan Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli. Kegiatan diklat ini dilaksanakan dengan mekanisme PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) pada tahun 2020.

Adapun pelaksanaan diklat Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli PNPB yaitu pada tanggal 27 Juli – 9 September 2020, yang dilaksanakan dengan metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Jumlah peserta ada sebanyak 25 orang, dan keseluruhannya adalah laki-laki dan berasal dari Direktorat Data dan Informasi Perpajakan dan dari Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi.



Gambar 19. Pembelajaran di kelas Virtual Diklat Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli (PNBP)

Pengajar dalam diklat ini adalah para Pejabat struktural dan fungsional Pusdiklat BPS dan BPS Pusat yang berkompeten dibidang komputer. Evaluasi terhadap peserta diklat adalah evaluasi nilai yang dilakukan dengan menjumlahkan seluruh unsur-unsur penilaian sesuai persyaratan nilai yang ditentukan dalam aturan pedoman penyelenggaraan diklat. Hasil evaluasi nilai memperlihatkan rata-rata nilai seluruh peserta sebesar 86,88 dengan nilai tertinggi 90,01 dan nilai terendah 81,08. Dari persyaratan nilai yang ditentukan, seluruh peserta Diklat Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli Tahun 2020 dinyatakan LULUS dan berhak mendapatkan sertifikat tanda kelulusan.

2.1.3. Diklat Teknis Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI)

Pada Tahun 2020 Pusdiklat BPS menyelenggarakan Diklat Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) untuk fungsional Pranata Komputer Tahun 2020. Diklat ini bermaksud untuk meningkatkan pemahaman Pegawai BPS dalam melakukan penyusunan KTI sesuai dengan teknik-teknik yang tepat dan baik serta dapat menghindari praktek-praktek plagiarisme. Kegiatan ini dibiayai dari sumber dana APBN BPS tahun 2020.

Adapun pelaksanaan Diklat Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) pada tanggal 12 Oktober - 12 Desember 2020 secara *on line* dengan metode *e learning*. Pembelajaran dilaksanakan selama 9 hari, dilanjutkan dengan bimbingan dan diakhiri dengan Seminar Karya Tulis Ilmiah. Jumlah peserta Diklat Teknis Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) sebanyak 41 orang peserta yang terdiri dari 27 orang laki-laki dan 14 orang perempuan. Peserta Diklat berasal dari BPS Daerah, BPS Pusat, Polstat STIS dan Pusdiklat BPS. Pengajar dalam diklat ini adalah widyaiswara dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Banten, Pusdiklat BPS dan Fungsional Pranata Komputer dari BPS Pusat. Kegiatan ini dibiayai dari sumber dana APBN BPS tahun 2020

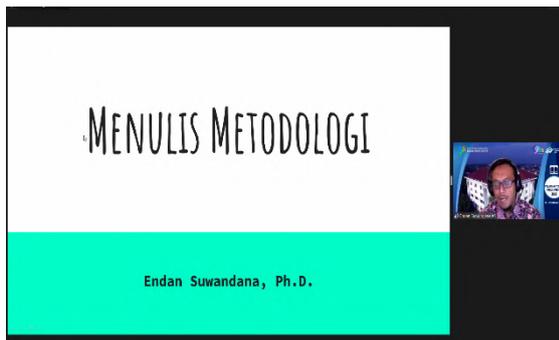
Evaluasi dilakukan melalui teknik observasi selama pembelajaran berlangsung, angket serta melalui Seminar hasil karya tulis ilmiah. Peserta Diklat Penulisan KTI Tahun 2020 diharuskan mengirimkan naskah KTI ke jurnal ilmiah. Dari 41 peserta, sebanyak 38 peserta menampilkan karya tulisnya dan 3 peserta tidak sanggup mengikuti seminar. Sehingga peserta yang dinyatakan LULUS dan berhak mendapatkan sertifikat pelatihan sebanyak 38 orang.



Gambar 20. Pembukaan Pelatihan Teknis Penulisan KTI oleh Kepala Pusdiklat BPS



Gambar 21. Pembukaan Pelatihan Teknis Penulisan KTI



Gambar 22. Kegiatan belajar dengan Fasilitator Bpk. Endan Suwandana

2.1.4. Diklat Teknis Administasi Pranata Komputer

Diklat Teknis Administrasi Pranata Komputer merupakan program yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan kognitif dan keterampilan aparatur pemerintah pejabat dan calon pejabat fungsional pranata komputer tingkat ahli yang memiliki kemampuan memahami sistem penilaian dan administrasi pranata komputer, memahami etika dan pembuatan karya tulis ilmiah sebagai bentuk pengembangan profesi pranata komputer, memahami pembuatan rekayasa sistem informasi, dan menyusun dokumentasi dan pelaporan kegiatan pranata komputer secara baik. Strategi pembelajaran yang digunakan adalah ekspositori dan inquiry dengan metode e-learning yaitu belajar mandiri, tatap muka online, tanya jawab, diskusi, dan latihan. Tujuan diklat tersebut sebagai bentuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPS sebagai instansi Pembina Jabatan Fungsional

Pranata Komputer; melaksanakan tugas pokok dan fungsi pusdiklat sebagai penyelenggara diklat teknis dan fungsional selain itu; juga bertujuan untuk membentuk standar kompetensi yang perlu dimiliki oleh pejabat fungsional pranata komputer.

Sasaran diklat adalah pegawai yang bekerja di Instansi Pemerintahan yang sudah menduduki Jabatan Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli namun belum pernah mengikuti diklat terkait fungsional pranata komputer. Kegiatan ini dibiayai dari sumber dana APBN BPS tahun 2020.

Adapun pelaksanaan Diklat Teknis Administrasi Pranata Komputer Tingkat Ahli yaitu pada tanggal 15 – 27 Juni 2020, yang dilaksanakan menggunakan metode e-learning pada *Learning Management System* Warkop Pusdiklat BPS. Jumlah peserta sebanyak 50 orang, terdiri dari 39 laki-laki dan 11 perempuan. Sebanyak 10 orang peserta berasal dari BPS dan sisanya 40 orang peserta non BPS yakni berasal dari Pusdatin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 13 orang dan Kementerian Agama sebanyak 27 orang.

Pengajar dalam diklat ini adalah para Pejabat struktural dan fungsional Pusdiklat BPS dan BPS Pusat yang berkompeten di bidang Teknologi Informasi dan bidang Jabatan Fungsional. Evaluasi terhadap peserta diklat adalah evaluasi nilai yang dilakukan dengan menjumlahkan seluruh unsur-unsur penilaian sesuai persyaratan nilai yang ditentukan dalam aturan pedoman penyelenggaraan diklat. Dari hasil evaluasi nilai memperlihatkan bahwa rata-rata nilai ujian seluruh peserta diklat sebesar 87,92 dengan nilai tertinggi 94,00 dan nilai terendah 79,90. Seluruh peserta Diklat Teknis Administrasi Pranata Komputer Tingkat Ahli Tahun 2020 dinyatakan LULUS dan berhak mendapatkan sertifikat tanda kelulusan. Semua peserta berhasil menyelesaikan diklat dengan tingkat kelulusan 100 persen.



Gambar 23. Kegiatan *Synchronous Zoom Meeting* Diklat Teknis Administrasi Pranata Komputer Tingkat Ahli

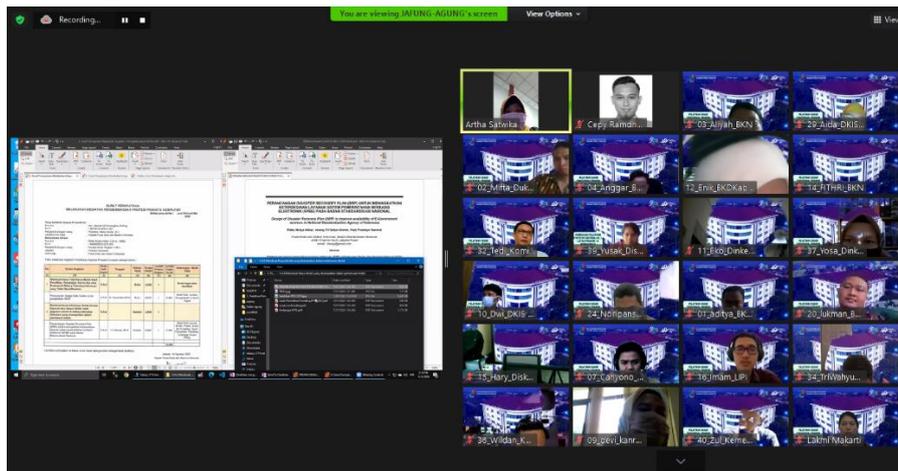
2.1.5. Pelatihan Dasar Fungsional Pranata Komputer

Pelatihan Dasar Fungsional Pranata Komputer tingkat ahli adalah diklat yang bertujuan untuk memberikan pemahaman serta pelatihan kepada PNS yang sudah menduduki jabatan fungsional pranata komputer pada tingkat ahli. Adapun sasaran dari diklat ini adalah pegawai yang bekerja di Instansi Pemerintahan yang menduduki dan melaksanakan tugas pada Jabatan Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli. Kegiatan ini dibiayai dari sumber dana APBN BPS tahun 2020.

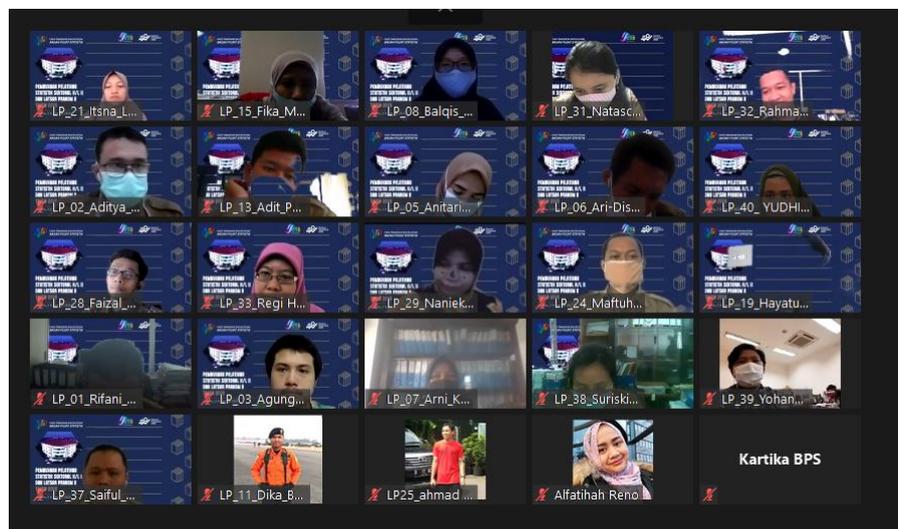
Pelatihan dasar ini dilaksanakan sebanyak 2 (dua) angkatan pada Tahun 2020 dengan metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Angkatan I dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober – 3 November 2020 dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang yang terdiri dari 26 laki-laki dan 14 perempuan. Komposisi peserta menurut instansi yaitu sebanyak 4 orang berasal dari BPS dan sebanyak 36 orang non-BPS dengan rincian 6 orang dari Kementerian, 12 orang dari Badan/Lembaga Pemerintah, dan 18 orang dari Pemerintah daerah.

Sedangkan angkatan II dilaksanakan pada tanggal 2 – 12 November 2020 dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang yang terdiri dari 23 laki-laki dan 17 perempuan. Komposisi peserta menurut instansi yaitu sebanyak 1 orang berasal dari BPS dan sebanyak 39 orang non-BPS dengan rincian 8 orang dari Kementerian, 9 orang dari Badan/Lembaga Pemerintah, dan 22 orang dari Pemerintah daerah.

Pengajar diklat adalah para pejabat struktural dan fungsional pusdiklat BPS dan BPS Pusat yang berkompeten di bidang masing-masing. Evaluasi terhadap peserta diklat adalah evaluasi nilai yang dilakukan dengan menjumlahkan seluruh unsur-unsur penilaian sesuai persyaratan nilai yang ditentukan dalam aturan pedoman penyelenggaraan diklat. Dari hasil evaluasi nilai memperlihatkan bahwa rata-rata nilai ujian peserta diklat angkatan I sebesar 85,38 dengan nilai tertinggi 90,29 dan nilai terendah 76,20, sedangkan nilai tertinggi angkatan II sebesar 84,32 dengan nilai tertinggi 89,32 dan nilai terendah 70,17. Seluruh peserta Pelatihan Latsar Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli Tahun 2020 dinyatakan LULUS dan berhak mendapatkan sertifikat tanda kelulusan. Semua peserta berhasil menyelesaikan diklat dengan tingkat kelulusan 100 persen.



Gambar 24. Kegiatan *Zoom Meeting* Pelatihan Dasar Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli Angkatan I



Gambar 25. Kegiatan *Zoom Meeting* Pelatihan Dasar Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli Angkatan II

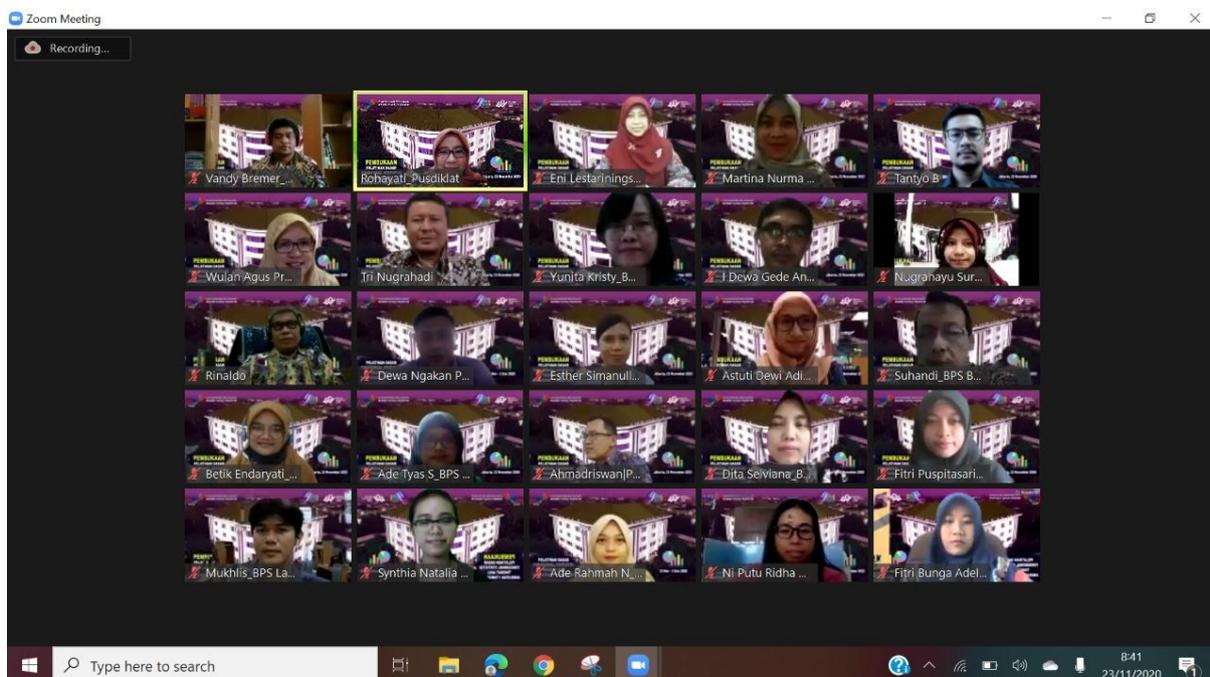
2.1.6. Pelatihan Dasar Fungsional Statistisi

Pelatihan Dasar fungsional statistisi tingkat ahli adalah diklat yang bertujuan untuk memberikan pemahaman serta pelatihan kepada PNS yang sudah menduduki jabatan fungsional statistisi pada tingkat ahli. Adapun sasaran dari diklat ini adalah pegawai yang bekerja di Instansi Pemerintahan yang menduduki dan melaksanakan tugas pada Jabatan Fungsional Statistisi Tingkat Ahli. Kegiatan ini dibiayai dari sumber dana APBN BPS tahun 2020.

Pada tahun 2020 pelatihan dasar ini dilaksanakan sebanyak 1 (satu) angkatan. Pelatihan Dasar Fungsional Statistisi Tingkat Ahli dilaksanakan pada tanggal 23 November – 2 Desember 2020 yang dilaksanakan secara Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dengan jumlah

peserta 30 orang yang berasal dari seluruh BPS Provinsi, yang terdiri dari 7 laki-laki dan 23 perempuan.

Pengajar diklat adalah para pejabat struktural dan fungsional pusdiklat BPS dan BPS Pusat yang berkompeten di bidang masing-masing. Evaluasi terhadap peserta diklat adalah evaluasi nilai yang dilakukan dengan menjumlahkan seluruh unsur-unsur penilaian sesuai persyaratan nilai yang ditentukan dalam aturan pedoman penyelenggaraan diklat. Dari hasil evaluasi nilai memperlihatkan bahwa rata-rata nilai ujian seluruh peserta diklat sebesar 82,26 dengan nilai tertinggi 90,13 dan nilai terendah 70,16. Seluruh peserta Pelatihan Latsar Fungsional Statistisi Tingkat Ahli Tahun 2020 dinyatakan LULUS dan berhak mendapatkan sertifikat tanda kelulusan. Semua peserta berhasil menyelesaikan diklat dengan tingkat kelulusan 100 persen.



Gambar 26. Pelaksanaan Pelatihan Dasar Fungsional Statistisi Tingkat Ahli secara PJJ

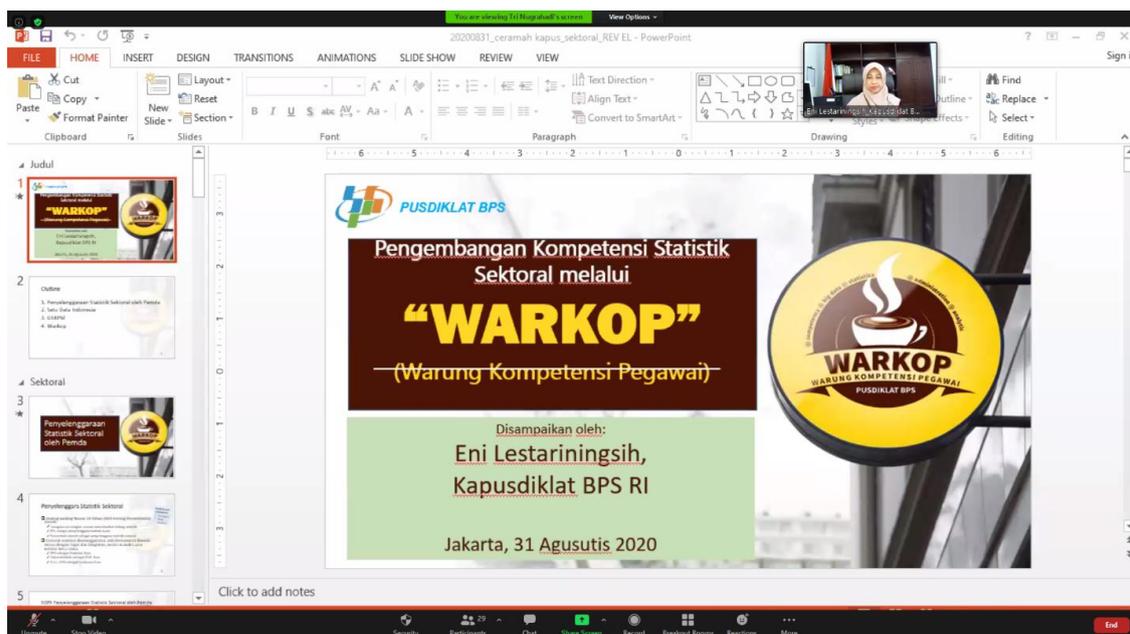
2.1.7. Diklat Statistik Sektoral Kab/Kota

Pada Tahun 2020 Pusdiklat BPS menyelenggarakan Pelatihan Teknis Statistik Sektoral Kabupaten/Kota Angkatan I – VI. Pelatihan ini ditujukan bagi para wali data pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia serta pegawai BPS Kabupaten/Kota yang bertujuan untuk “memperkenalkan” kepada peserta mengenai rencana Implementasi Statistik Nasional di Organisasi Pemerintah Daerah (OPD)

bidang Statistik, meliputi pembahasan materi RPP tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Kongruen (PUPK) sebagai dasar alur kerja yang dijalankan ketika menganalisis data-data sektoral. Kegiatan ini dibiayai dari sumber dana APBN BPS tahun 2020.

Adapun pelaksanaan Pelatihan Teknis Statistik Sektoral Angkatan I – VI, yakni Angkatan I – II dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus – 5 September 2020, Angkatan III – IV tanggal 7 – 12 September 2020 dan Angkatan V – VI tanggal 14 – 19 September 2020 yang dilaksanakan dengan metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Jumlah peserta Angkatan I – II sebanyak 68 orang, terdiri dari 34 orang laki-laki dan 34 orang perempuan. Jumlah peserta Angkatan III – IV sebanyak 62 orang, terdiri dari 30 orang laki-laki dan 32 orang perempuan. Jumlah peserta Angkatan V – VI sebanyak 81 orang, terdiri dari 48 orang laki-laki dan 33 orang perempuan. Peserta pelatihan berasal dari BPS Kabupaten/Kota serta Pemerintah Kabupaten/Kota dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan Jawa Barat.

Pengajar dalam pelatihan ini adalah para Pejabat struktural, fungsional Pusdiklat BPS dan BPS Pusat atau praktisi yang berkompeten di bidang statistik. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap peserta dapat diketahui bahwa pada Pelatihan Statistik Sektoral Angkatan I – II dan Angkatan V – VI masing-masing terdapat 3 dan 4 orang peserta tidak mengikuti keseluruhan pembelajaran sehingga peserta tersebut tidak mendapatkan sertifikat “Telah Mengikuti” pelatihan. Sedangkan pada Pelatihan Statistik Sektoral Angkatan III – IV keseluruhan peserta mendapatkan sertifikat “Telah Mengikuti” pelatihan.



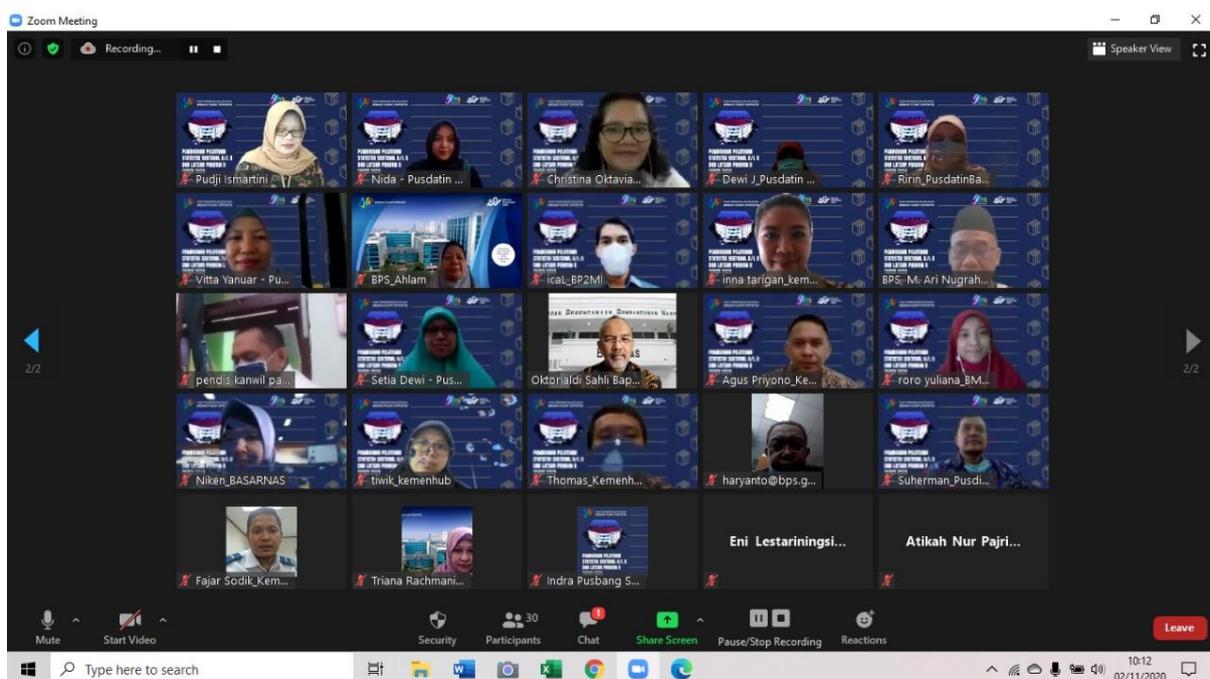
Gambar 27. Kegiatan Pembelajaran Pelatihan Statistik Sektoral

2.1.8. Diklat Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga

Diklat Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga (K/L) adalah diklat yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan wawasan mampu memahami tahapan penyelenggaraan statistik yang sesuai dengan *Generic Statistical Business Process Model* (GSBPM), Prinsip Satu Data, Standar dan Metadata, Penyusunan Daerah Dalam Angka (DDA), dan Sistem Informasi Manajemen Data Statistik Terintegrasi (SIMDASI). Kegiatan ini dibiayai dari sumber dana APBN BPS tahun 2020.

Pada tahun 2020 diklat sektoral K/L dilaksanakan sebanyak 2 (dua) angkatan yang semuanya dilaksanakan dengan metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) menggunakan *Learning Management System* (LMS) yang dimiliki Pusdiklat BPS yaitu Warkop (Warung Kompetensi Pegawai). Diklat Statistik Sektoral K/L Angkatan I dilaksanakan pada tanggal 19 – 24 Oktober 2020 dan Angkatan II pada tanggal 2 – 7 November 2020. Jumlah peserta Angkatan I sebanyak 36 orang, terdiri dari 19 orang laki-laki dan 17 orang perempuan yang berasal dari 11 Kementerian/Lembaga. Jumlah peserta Angkatan II sebanyak 21 orang, terdiri dari 9 orang laki-laki dan 12 orang perempuan yang berasal dari 12 Kementerian/Lembaga.

Pengajar/fasilitator dalam diklat ini adalah para Pejabat struktural, fungsional Pusdiklat BPS dan BPS Pusat atau praktisi yang berkompeten di bidang statistik. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap peserta dapat diketahui bahwa seluruh peserta mendapatkan Surat Keterangan dan Sertifikat "Telah Mengikuti" diklat.



Gambar 28. Kegiatan Diklat Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga

2.1.9. *Technical Assistance and Training on Developing Services Producer Price Index -IMF*

Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) bersama dengan Direktorat Statistik Harga menyelenggarakan kegiatan *Technical Assistance and Training* untuk Indeks Harga Produsen Sektor Jasa (*Producer Price Indexes for Services*) dengan mengundang narasumber dari IMF yang ahli di bidangnya.

Tujuan dari penyelenggaraan TA SPPI-IMF adalah meningkatkan pengetahuan dan kompetensi peserta dalam menguasai penghitungan Indeks Harga Produsen di lingkungan Subdit Statistik Harga Produsen, kasek Statistik Keuangan dan harga produsen BPS Provinsi seluruh Indonesia dan peserta dari *subject matter* lain yang terkait tentang konsep-konsep dalam pengumpulan data Harga Produsen sektor jasa khususnya Jasa Telekomunikasi dan Transportasi baik penumpang maupun barang. Pelaksanaan TA SPPIs-IMF ini diselenggarakan dengan mengundang Andrew Baers sebagai senior economist IMF yang ahli dalam menangani Indeks harga Produsen.

Workshop online ini diselenggarakan tanggal 6 s.d 10 Juli 2020 mulai dari pukul 08.00-11.00 WIB untuk sesi pagi dan pukul 13.00-14.30 WIB untuk sesi siang. Sesi pagi hanya diberikan 4 jam mulai jam 08.00-11.00 mengingat perbedaan waktu antara Jakarta dan Washington sebagai domisili Andrew Baer adalah 12 jam. Pelaksanaan workshop sesi pagi dilaksanakan dalam bahasa Inggris sedangkan sesi siang dalam bahasa Indonesia. Workshop online ini memanfaatkan fasilitas WARKOP Pusdiklat.

Peserta TA SPPIs-IMF diikuti oleh 65 peserta pegawai BPS Pusat dan Daerah dengan rincian sebagai berikut: 36 peserta (Kasi Statistik Keuangan dan Harga Produsen atau yang mewakili) dari BPS Provinsi, 14 peserta dari Subdit Statistik Harga Produsen, 2 orang peserta perwakilan dari Subdit Statistik Harga Konsumen, 2 orang peserta perwakilan dari Subdit Statistik Harga Perdagangan Besar, 2 orang peserta perwakilan dari Subdit Statistik Harga Pedesaan, 2 orang peserta perwakilan dari Direktorat Neraca Produksi, 2 orang peserta perwakilan dari Direktorat Neraca Pengeluaran, 2 orang peserta dari Direktorat PMSS dan 3 orang widyaiswara dari Pusdiklat BPS. Komposisi peserta yaitu sebanyak 22 orang peserta laki-laki dan 43 orang peserta perempuan.

Evaluasi dilakukan dengan mengadakan Pre Test dan Post Test. Semua Peserta mendapat Surat Telah Mengikuti Pelatihan. Output yang dihasilkan pada kegiatan ini adalah notulen dan rekaman video selama materi disampaikan untuk dapat dilihat kembali oleh peserta bila diperlukan.



Gambar 29. Pembukaan Technical Assistance and Training on SPPI-IMF, 6 Juni 2020



Gambar 30. Narasumber Andrew Baers *Senior Economist* IMF

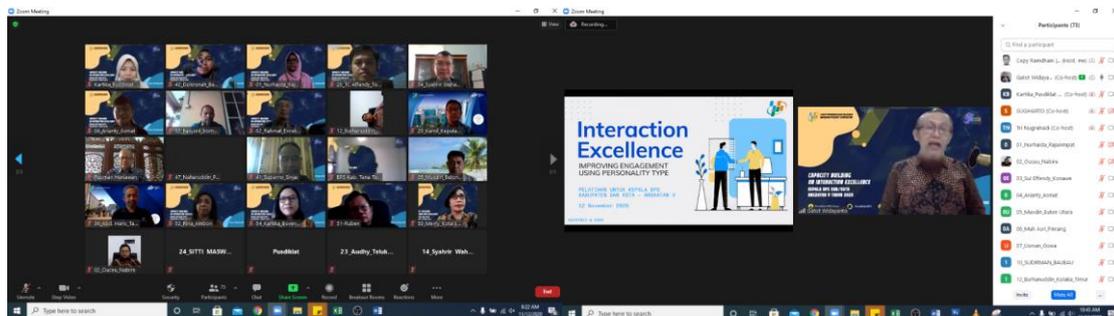
2.1.10. Capacity Building on Interaction Excellence Kepala BPS Kab/Kota

Dalam rangka meningkatkan kemampuan *Interaction Excellence* bagi Kepala BPS Kabupaten/Kota dengan metode MBTI, Pusdiklat BPS menyelenggarakan kegiatan *Capacity Building on Interaction Excellence*. *Interaction Excellence* merupakan salah satu kunci utama keberhasilan Kepala BPS Kabupaten/Kota dalam menjalin komunikasi dan koordinasi dengan para stakeholder. Kemampuan *Interaction Excellence* pada setiap pribadi dapat dikembangkan melalui pemahaman tipe kepribadian. Salah satu metode yang paling populer dalam mengukur preferensi psikologi seseorang adalah *Myers-Briggs Type Indicator* (MBTI). Kegiatan ini dibiayai dari sumber dana APBN BPS tahun 2020.

Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 5 (lima) angkatan pada Tahun 2020 dengan metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang dilakukan selama satu hari dan semua peserta adalah Kepala BPS Kabupaten/Kota. Jumlah peserta keseluruhan yaitu sebanyak 312 orang yang terdiri dari 259 orang laki-laki dan 53 orang perempuan, dengan rincian sebagai berikut:

- Angkatan I dilaksanakan pada tanggal 4 November 2020 dengan jumlah peserta sebanyak 58 orang yang terdiri dari 44 laki-laki dan 14 perempuan.
- Angkatan II dilaksanakan pada tanggal 6 November 2020 dengan jumlah peserta sebanyak 64 orang yang terdiri dari 57 laki-laki dan 7 perempuan.
- Angkatan III dilaksanakan pada tanggal 10 November 2020 dengan jumlah peserta sebanyak 59 orang yang terdiri dari 45 laki-laki dan 14 perempuan.
- Angkatan IV dilaksanakan pada tanggal 11 November 2020 dengan jumlah peserta sebanyak 67 orang yang terdiri dari 61 laki-laki dan 6 perempuan.
- Angkatan V dilaksanakan pada tanggal 12 November 2020 dengan jumlah peserta sebanyak 64 orang yang terdiri dari 52 laki-laki dan 12 perempuan.

Narasumber utama kegiatan ini adalah Bapak Gatot Widayanto yang merupakan *Change Management Expert*. Selain itu juga terdapat materi Ceramah Pimpinan yang disampaikan oleh mantan Kepala BPS yaitu Bapak Rusman Heryawan dan Bapak Suryamin.



Gambar 31. Kegiatan Capacity Building on *Interaction Excellence* Kepala BPS Kab/Kota

2.1.11. Massive Open Online Course (MOOC)

Kompetensi yang harus dimiliki oleh ASN terdiri dari 3 kompetensi yaitu : Kompetensi Managerial, Kompetensi Teknis, dan Kompetensi Sosio-Kultural. Dalam rangka meningkatkan kompetensi sosio-kultural pegawai, Badan Pusat Statistik bekerjasama dengan IndonesiaX pada tahun 2020 untuk membuat sebuah platform pelatihan online bernama warkop-ix.co.id. Pelatihan online ini sangat bermanfaat dan berguna bagi peserta untuk menambah wawasan dan mengembangkan potensi individu khususnya bidang Sosio-Kultural. Peserta diberikan pilihan kursus sebanyak 10 kursus dengan narasumber-narasumber expert di bidangnya.

Pada tahun 2020, MOOC ini dibagi menjadi 2 gelombang pelatihan yaitu : gelombang I dilaksanakan pada 6 Maret s/d 30 Juni 2020 dan gelombang II dilaksanakan pada 8 Oktober – 26 November 2020. Gelombang I dilakukan dalam 3 termin dan gelombang II dilakukan dalam 2 termin, berikut rincian jadwal lengkapnya :

Gelombang I

- Termin 1 : 06 Maret 2020 – 30 Maret 2020
- Termin 2 : 03 April 2020 – 21 Mei 2020
- Termin 3 : 15 Mei 2020 – 30 Juni 2020

Gelombang II

- Termin 1 : 08 Oktober 2020 – 09 November 2020
- Termin 2 : 09 November – 26 November 2020

Sistem pembelajaran pelatihan ini yaitu *Full E-Learning/Mandiri*, peserta belajar bahan sendiri yang berupa bahan tayang dan video pembelajaran, setelah itu baru mengikuti ujian. Sebelum dimulainya pelatihan online, peserta terlebih dahulu dikirimkan email blast tutorial tata cara mengikuti kursus supaya peserta memahami petunjuk sebelum mengerjakan.

Peserta yang mengikuti kursus ini sungguh diluar prediksi, tercatat total sebanyak 17.443 peserta yang mengikuti seluruh kursus dengan rincian 16.262 peserta berasal dari BPS dan 1.181 peserta berasal dari non BPS (satu akun bisa mengikuti lebih dari satu kursus).

2.2. Standardisasi dan Sertifikasi

Memperhatikan arahan Presiden RI dan berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Utama BPS Nomor 131 Tahun 2020 tentang Peningkatan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingkungan Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 serta Surat dari

Kepala Pusdiklat Pengadaan Barang/Jasa LKPP tentang Pemberitahuan Tindak Lanjut Pencegahan Penyebaran Infeksi Corona Virus dalam Penyelenggaraan Layanan di Pusdiklat Pengadaan Barang/Jasa, Pusdiklat BPS hanya menyelenggarakan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar dan menunda penyelenggaraan Ujian Sertifikasi.

2.2.1 Pelatihan Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah PKA dan Latsar/CPNS

Untuk membekali para calon Pejabat Administrator dan calon PNS BPS dalam keahlian pengadaan barang dan jasa pemerintah, pada tahun 2020 Pusdiklat BPS menyelenggarakan Pelatihan Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar yang terintegrasi dengan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Dasar CPNS Latsar CPNS). Tidak seperti kegiatan pelatihan-pelatihan sebelumnya yang dilanjutkan dengan ujian sertifikasi, tahun 2020 penyelenggaraannya tanpa ujian sertifikasi dikarenakan adanya pandemi Covid-19 sehingga LKPP mengambil kebijakan menunda layanan ujian sertifikasi. Pelatihannya juga menggunakan metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yaitu peserta belajar mandiri melalui LMS LKPP, Live Chat dan Tatap Muka Online (TMO).

Pelatihan PBJ Tingkat Dasar tahun 2020 terdiri dari 1 angkatan untuk peserta PKA dan 13 angkatan untuk peserta Latsar CPNS. Pelatihan PBJ Tingkat Dasar ini merupakan hasil kerja sama dengan LKPP, tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) dalam melaksanakan tugas dan jabatan sebagai pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara profesional dan beretika.

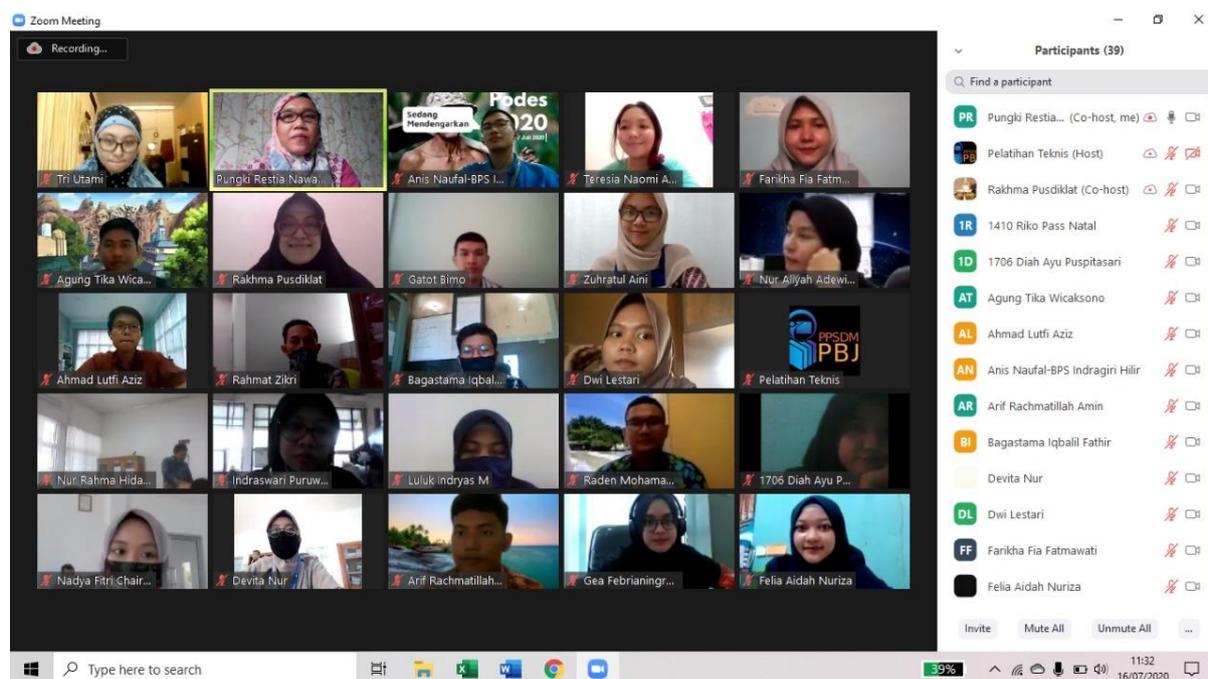
Pelatihan ini terbagi menjadi 8 gelombang, masing-masing gelombang terdiri dari 1 - 2 angkatan. Di awal gelombang yaitu gelombang 1 dan 2 pelatihan PBJ diintegrasikan dengan peserta Latsar CPNS dari 4 angkatan. Untuk gelombang 1 yaitu angkatan 35-36 dilaksanakan tanggal 5 s.d 21 Maret 2020 dengan jumlah pesertanya sebanyak 72 (tujuh puluh dua) orang. Pada tanggal 6 s.d 23 April 2020 dilaksanakan pelatihan gelombang ke-2 yaitu untuk angkatan 37-38 dengan peserta sejumlah 70 (tujuh puluh) orang. Pada gelombang ke-3 peserta pelatihan PBJ diintegrasikan dengan peserta PKA dengan jumlah 11 orang dan dilaksanakan pada tanggal 10-25 Juni 2020.

Gelombang 4 – 8 peserta pelatihan PBJ kembali terintegrasi dengan peserta Latsar CPNS. Gelombang 4 terdiri dari 2 angkatan yaitu angkatan 40-41 dengan jumlah peserta sebanyak 72 (tujuh puluh dua) orang dan dilaksanakan pada tanggal 24 Juni s.d 9 Juli 2020. Pelatihan PBJ Angkatan 42-43 dilaksanakan pada tanggal 1 s.d 16 Juli 2020 dengan peserta sejumlah 72 (tujuh puluh dua) orang, yang masuk dalam penyelenggaraan gelombang ke-5.

Pada tanggal 22 Juli s.d 6 Agustus 2020 diselenggarakan Pelatihan PBJ gelombang ke-6 (Angkatan 44-45), banyaknya peserta adalah 75 (tujuh puluh lima) orang.

Dua gelombang terakhir yaitu gelombang 7 dan 8, masing-masing terdiri dari Angkatan 46-47 dan Angkatan 48. Pelatihan PBJ Angkatan 46-47 diselenggarakan pada tanggal 29 Juli s.d 14 Agustus 2020 dengan jumlah peserta sebanyak 68 (enam puluh delapan) orang. Sedangkan angkatan 48 mempunyai jumlah peserta sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang dengan pelaksanaan pelatihan pada tanggal 27 Agustus s.d 10 September 2020.

Secara keseluruhan jumlah peserta Pelatihan PBJ Tingkat Dasar pada tahun 2020 yang terintegrasi dengan PKA sebanyak 11 orang dan Latsar CPNS sebanyak 467 orang, sehingga total pesertanya 478 orang. Pengajar pelatihan seluruhnya adalah Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Widyaiswara dan Pejabat Fungsional Umum dari LKPP. Pada metode PJJ ini, peserta memperoleh Surat Keterangan mengikuti pembelajaran online yang dapat diunduh mandiri melalui LMS LKPP.



Gambar 32. Kegiatan Pelatihan Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2.2.2 Diklat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah PNS

Untuk memenuhi kompetensi pegawai BPS dalam keahlian pengadaan barang dan jasa pemerintah, pada tahun 2019 pusdiklat menyelenggarakan Pelatihan Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdiri dari 4 angkatan yaitu angkatan 49 – 52 yang merupakan hasil kerja sama dengan LKPP. Tujuan diklat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap pengelola Pengadaan Barang/Jasa

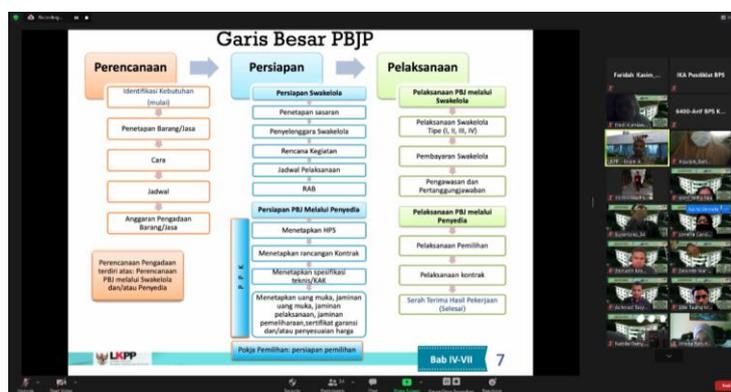
Pemerintah (PBJ) dalam melaksanakan tugas dan jabatan sebagai pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara profesional dan beretika.

Kegiatan diklat ini diikuti oleh pegawai BPS yang akan ditunjuk sebagai panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pelatihan Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Angkatan 49 dan Angkatan 50 dilaksanakan pada tanggal 5 sd. 19 November 2020. Selanjutnya, Pelatihan Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Ujian Sertifikasi Angkatan 51 dan Angkatan 52 dilaksanakan pada tanggal 12 sd. 26 November 2020. Pelatihan berlangsung selama 11 hari dengan sistem *on line*. Pelatihan terdiri dari *asynchronous* 18 JP, *synchronous live chat* 2 JP dan *synchronous zoom meeting* 17 JP. Total jam pelajaran sebanyak 35 JP.

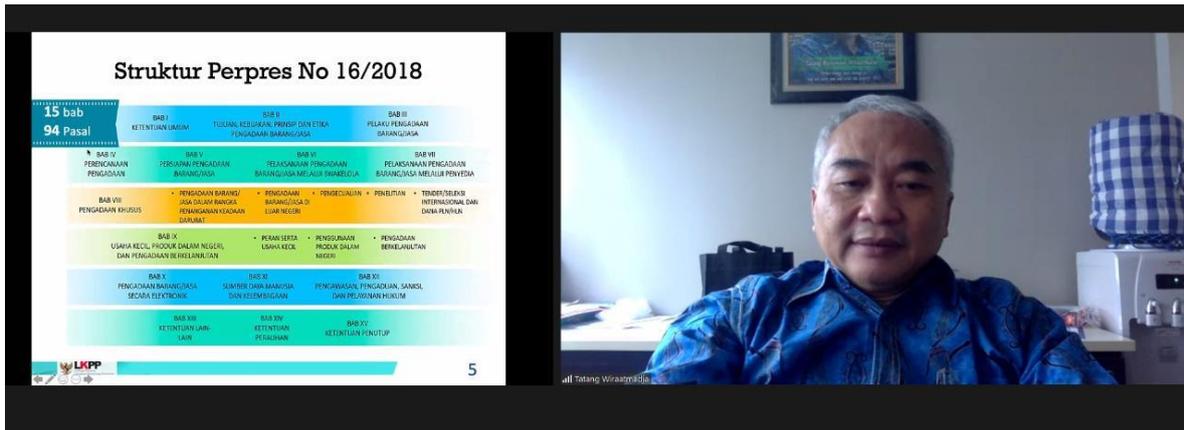
Pengajar pelatihan berasal dari LKPP dan instansi pemerintah yang telah memiliki sertifikat mengajar dari LKPP. Karena adanya pandemi covid 19 tidak memungkinkan dilaksanakan ujian sertifikasi, sehingga ujian sertifikasi ditunda pada tahun berikutnya. Semua Peserta Pelatihan mendapat Surat Keterangan Telah Mengikuti Pelatihan dari LKPP. PBJ Angkatan 49 terdiri dari 36 peserta, PBJ Angkatan 50 terdiri dari 36 peserta, PBJ Angkatan 51 terdiri dari 33 peserta dan PBJ Angkatan 52 terdiri dari 35 peserta.



Gambar 33. Tatap Muka Online (TMO) PBJ Akt.49 pada tanggal 16 November 2020 dengan Fasilitator Imam Arumsyah dari LKPP



Gambar 34. Kegiatan belajar Pelatihan PBJ Akt 49 melalui zoom meeting

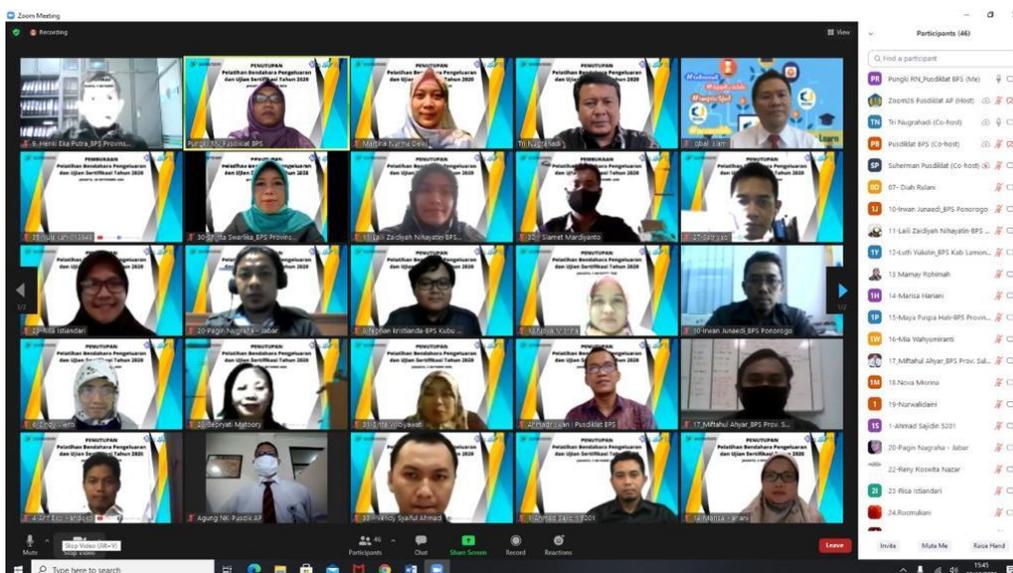


Gambar 35. Tatap Muka Online (TMO) PBJ Akt.51 Senin, 23 November 2020 dengan fasilitator Tatang Rusnandar

2.2.3 Diklat Pembentukan Bendahara dan Sertifikasi

Untuk memenuhi kompetensi pegawai BPS dan untuk meningkatkan serta menjamin pemeliharaan mutu kompetensi **Bendahara** untuk melaksanakan tugas kebhendahaan dalam rangka melaksanakan APBN agar tercapai peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara maka Pusdiklat BPS mengadakan Ujian sertifikasi bendahara bekerjasama dengan Pusdiklat AP Kementerian Keuangan RI.

Kegiatan diklat ini diikuti oleh pegawai BPS yang akan ditunjuk sebagai bendahara pengeluaran pada unit kerjanya. Diklat Bendahara ini ada 3 (tiga) Angkatan. Untuk Angkatan I dilaksanakan pada tanggal 28 September – 2 Oktober 2020, angkatan II tanggal 19 – 23 Oktober 2020, angkatan III tanggal 16 – 20 November 2020.



Gambar 36. Pembukaan Diklat Pembentukan Bendahara secara online

Pengajar diklat berasal dari Pusdiklat AP Kementerian Keuangan RI yang telah memiliki sertifikat mengajar. Setelah tahap pelatihan selesai dilanjutkan dengan ujian sertifikasi untuk mendapatkan sertifikat BNT bagi peserta yang lulus. Ujian sertifikasi dilaksanakan secara online 3. Adapun berdasarkan hasil ujian sertifikasi tingkat kelulusan peserta Diklat Sertifikasi 3 angkatan pada tahun 2020 sebesar 92,59 persen atau sejumlah 100 orang dari 108 orang peserta Diklat Pembentukan Bendahara dan Ujian Sertifikasi 3 angkatan.

SASARAN 2 : TERWUJUDNYA SDM PUSDIKLAT BPS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN KOMPETENSI

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sebagaimana yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Pada pasal 203 ayat 4 dari peraturan pemerintah tersebut menyebutkan bahwa Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit **20 (dua puluh) jam pelajaran** dalam 1 (satu) tahun.

Sejalan dengan itu, sasaran kedua pada Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2020 adalah terwujudnya SDM Pusdiklat BPS yang melakukan peningkatan kompetensi. Sasaran ini sangat strategis, selain memenuhi 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun adalah juga dalam rangka menunjang layanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara oleh Pusdiklat BPS.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Renstra Pusdiklat BPS Tahun 2020-2024 bahwa salah satu arah kebijakan dan strategis yang dilakukan untuk meningkatkan layanan penyelenggaraan diklat dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung *agile learning center* dan mengembangkan *e-learning*. Oleh karena itu, dibutuhkan tenaga pengajar yang berkualitas dan berkompeten di bidangnya sesuai dengan materi diklat yang diajarkan kepada peserta diklat. Selain itu, dibutuhkan pula penyelenggara yang mampu melayani dengan baik yang *agile* dan modern berdasarkan kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan diklat.

Pada tahun 2020, telah dilaksanakan pengembangan dan peningkatan kompetensi bagi pegawai baik struktural, widyaiswara/pengajar, maupun staf melalui penyelenggaraan diklat di Pusdiklat BPS atau Kementerian/Lembaga lain yang terkait. Selain diklat, ada pula yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi di luar Pusdiklat BPS dalam bentuk kursus, seminar, workshop, dan yang lainnya baik sebagai peserta, nara sumber, maupun

pengajar. Kegiatan tersebut ada yang diikuti melalui *online* dan ada pula melalui tatap muka.

Dalam mewujudkan keberhasilan sasaran tersebut, capaian kinerja diukur melalui indikator persentase SDM Pusdiklat BPS yang melakukan peningkatan kompetensi.

Tabel 8. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran Strategis ke 2 Tahun 2020

IKU	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian (%)	Realisasi 2019	Perubahan terhadap realisasi 2019 (%) ((3)/(5)*100)-100
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Persentase SDM Pusdiklat BPS yang melakukan peningkatan kompetensi	90	95	105,56	-	-

IKU 2 : Persentase SDM Pusdiklat BPS yang Melakukan Peningkatan Kompetensi

Capaian kinerja pada IKU Persentase SDM Pusdiklat BPS yang melakukan peningkatan kompetensi adalah sebesar 105,56 persen. Angka tersebut telah melampaui dari target yang diharapkan pada tahun 2020 yaitu dari target 90 persen telah terealisasi sebesar 95 persen. Namun realisasi ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena pada tahun 2019 tidak terdapat indikator tersebut.

Pada Tabel 9 di bawah ini ditampilkan jumlah pegawai Pusdiklat BPS yang mengikuti pengembangan kompetensi baik diselenggarakan oleh Pusdiklat BPS maupun Instansi lainnya. Kegiatan tersebut dalam bentuk diklat, seminar, workshop, dan lainnya baik melalui online maupun tatap muka.

Tabel 9. Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Tahun 2020

No.	Kegiatan yang Diikuti	Jumlah Peserta	Peran Kegiatan (peserta/nara sumber/pengajar/panitia penyelenggara)	Tempat/Penyelenggara
1.	Kepala Pusdiklat BPS sebagai salah satu pembicara pada forum UN-SIAP <i>Sixth Meeting of the Network for the Coordination of Statistical Training in Asia dan the</i>	1	Pembicara	UN-SIAP

	<i>Pacific</i> , pada tanggal 2 Desember 2020 (online)			
2.	Kepala Pusdiklat sebagai anggota dalam <i>UN-Big Data Task Team on Training, Skills, and Capacity Development (online)</i>	1	Peserta	UN
3.	Mengajar di Politeknik STIS	3	Pengajar	STIS
4.	Pelatihan Jenjang Widyaiswara Jenjang Menengah (Online)	1	Peserta	UPT Pelatihan Kesehatan Murnajati, Jawa Timur
5.	E-Trainer (Online)	6	Peserta	Pusat Pengembangan Kompetensi dan Sosial Kultural ASN LAN RI
6.	Pelatihan Microsoft Office Tingkat Lanjutan (Ms. Word dan Ms. Excell)	2	Pengajar	Pusat Pendidikan dan Pelatihan DPR RI
7.	Pelatihan Teknis penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI)	2	Peserta	Pusdiklat BPS
8.	Webinar “Corporate University: Membangun ASN Profesional dan Berkelas Dunia” (Online)	7	Peserta	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
9.	Pelatihan Dasar CPNS (Online)	1	Peserta	Pusdiklat BPS
10.	Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar (Online)	1	Peserta	Pusdiklat BPS
11.	IMF Online Training PPI for Services	3	Peserta	Pusdiklat BPS
12.	<i>Online Training (International Program) Developing and Implementing Strategic Procurement</i>	1	Peserta	Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN)
13.	Pelatihan Teknis Karya Tulis Ilmiah	4	Pengajar	Pusdiklat Tenaga Administrasi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI
14.	Workshop untuk Pengajar PKP dan PKA	1	Pengajar	Bandiklat PKN BPK
15.	Workshop Pelatihan Ekonometrika	1	Pengajar	Bank Indonesia
16.	Mengajar di Mabes TNI	1	Pengajar	Satdiklat PNS Mabes TNI
17.	Mengajar Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI	1	Pengajar	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI
18.	Workshop Data Sains dan Analisis Big Data (DSBD)	5	Peserta	Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik BPS

19.	Capacity Building Blockchain	5	Peserta	BPS RI
20.	Program Training Tatap Muka - John Robert Powers" Tema: <i>Build Your Executive Image Training</i>	60	Peserta	Pusdiklat BPS
21.	Pelatihan pengelolaan pembelajaran menggunakan LMS	30	Peserta	Pusdiklat BPS

Berikut ini dipaparkan kegiatan dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai Pusdiklat BPS yang diselenggarakan oleh Pusdiklat BPS pada tahun 2020

Rapat Koordinasi Evaluasi Kegiatan 2020, Rencana Kegiatan 2021, dan Capacity Building 2020 Pegawai Pusdiklat BPS

Dalam rangka Evaluasi Kegiatan 2020 dan Rencana Kegiatan 2021 serta meningkatkan kemampuan pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*), sikap dan perilaku (*attitude and behaviour*) bagi pegawai Pusdiklat BPS, pada tanggal 2 s.d. 5 Desember 2020 dilaksanakan rapat koordinator dengan tema "***Happiness to build a strong teamwork***" yang bertempat di Hotel Papandayan, Bandung, Jawa Barat. Jumlah peserta sebanyak 80 orang terdiri dari 70 pegawai Pusdiklat BPS dan 10 pegawai BPS Provinsi Jawa Barat serta BPS Kota Bandung.

Kegiatan ini terdiri dari arahan Kepala Pusdiklat BPS dan mengundang beberapa nara sumber sebagai berikut:

- a. Arahan Kepala Pusdiklat BPS dengan tema : Pusdiklat dan Tantangan di Era Next Normal

Road Map Pusdiklat BPS yaitu :

1. *Agile Learning Centre* (2020)
2. *Centre of Excellence for Statistical and ICT Skill Development* (2020-2021)
3. *BPS Corporate University* (2020-2024)

Framework C S S "Continue – Stop –Start":

1. Melanjutkan yg sdh berjalan baik,
2. Menghentikan yg kurang baik;
3. Memulai inisiatif baru yg inovatif

Dengan semangat: ***From Good to Great***

- b. Drs. Desi Fernanda, MSOC.SC. (Widyaiswara Ahli Utama, LAN RI) dengan tema : 'Evaluasi Model Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Era *New Normal* (Adaptasi Kebiasaan Baru) dan *Next Normal*'

- c. Agung Hartadi, S.ST, ME (Kepala BPS Kab. Bandung) dengan tema : 'Peran Pusdiklat menjadi Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Unggul dan Adaptif'
- d. Husna (Balai Bahasa, Kota Bandung) dengan tema : '*The Future of Communication*'
- e. Asep Ridrid Karana dan Iwa Sumpena (Trainer and Motivator) dengan tema : '*Capacity Building Training and Spiritual Mind Motivator*'



Gambar 37. Rapat Koordinasi Evaluasi Kegiatan 2020, Rencana Kegiatan 2021, dan Capacity Building Tahun 2020 Pegawai Pusdiklat BPS Hari Pertama



Gambar 38. Rapat Koordinasi Evaluasi Kegiatan 2020, Rencana Kegiatan 2021, dan Capacity Building Tahun 2020 Pegawai Pusdiklat BPS Hari Kedua

Program Training Tatap Muka - John Robert Powers

Kemampuan dalam berkomunikasi tentunya sangat dibutuhkan bagi personal khususnya yang berkecimpung di dalam pelaksanaan pelayanan publik, seperti bagi pegawai Pusdiklat BPS. Kegiatan yang diikuti pegawai Pusdiklat ini bertujuan peningkatan kemampuan komunikasi serta performa diri yang dibutuhkan dalam pelayanan diklat. Narasumber pada pelatihan ini berasal dari John Robert Powers yang sudah tidak diragukan lagi kemampuannya dalam mengisi dan menyelenggarakan acara seperti ini. Di akhir sesi kegiatan ini setiap peserta melakukan presentasi online selama 5 menit.

Pelatihan bersama John Robert Powers diharapkan dapat memberikan manfaat dan membantu pegawai khususnya yang terlibat dalam pelaksanaan pelayanan publik untuk dapat mengembangkan dan meningkatkan keterampilan dalam komunikasi, kepribadian, penampilan dan kehidupan sosial menjadi lebih baik lagi.

Pelatihan ini diselenggarakan dalam 2 gelombang sebanyak 4 kelas, yaitu tanggal :

- a. Gelombang I (5-7 November 2020)
- b. Gelombang II (17-18 Des 2020)



Gambar 39. Suasana Pembelajaran oleh Narasumber dari Jhon Robert Powers Indonesia



Gambar 40. Foto Bersama Perwakilan Peserta dan Narasumber

Kegiatan Pengembangan Diri `Beauty Class Wardah`

Dalam rangkaian peringatan Hari Statistik Nasional, Pusdiklat BPS menyelenggarakan *beauty class* dengan narasumber Wardah Cosmetics



Gambar 41. Foto Bersama Beauty Class Wardah



Gambar 42. Kegiatan Pembelajaran Beauty Class Wardah

Kegiatan Capacity Building

Data Triggers Innovation-Inovasi berpangkal dari 3 hal: Rasa takut (*Fear*); Imajinasi (*Fantasy*); Frustrasi. Demikian materi yang disampaikan oleh Gatot Widayanto, seorang *Strategy and Change Management Professional*. Acara Capacity Building yang diselenggarakan Pusdiklat BPS pada tanggal 11 September 2020 ini merupakan rangkaian peringatan Hari Statistik Nasional, yang bertujuan untuk meningkatkan gairah inovasi di Pusdiklat BPS melalui kolaborasi yang dibangun atas kuatnya kekeluargaan diantara Pegawai termasuk Mitra. Konsep dasarnya adalah kegiatan bersama, bertukar-pikiran semua jajaran Pegawai dan Mitra melalui diskusi terbuka secara berkelompok maupun pleno menuju Agile Learning Center.



Gambar 43. Penyerahan Hadiah Bagi Peserta yang Aktif dalam Acara Capacity Building



Gambar 44. Foto Bersama Pemateri dengan Peserta *Capacity Building*

SASARAN 3 : TERJALINNYA KERJASAMA DENGAN INSTITUSI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI YANG BERKESINAMBUNGAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan kedua Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yaitu meningkatkan kompetensi SDM, maka salah satu sasarnya diarahkan untuk mencapai terjalannya kerjasama dengan institusi pendidikan dan pelatihan dalam negeri dan luar negeri yang berkesinambungan. Salah satu kegiatan strategis yang dilakukan adalah melalui peningkatan kerjasama dengan Perguruan Tinggi penyelenggara rintisan gelar, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan rintisan gelar sangat ditentukan oleh keberhasilan peserta tugas belajar dalam menyelesaikan pendidikannya. Untuk memenuhi

pencapaian kinerja dari sasaran strategis tersebut diukur melalui indikator persentase kelulusan peserta tugas belajar.

Tabel 10. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran Strategis ke 3 Tahun 2020

IKU	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian (%)	Realisasi 2019	Perubahan terhadap realisasi 2019 (%) $((3)/(5)*100)-100$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Persentase Kelulusan Peserta Tugas Belajar	90	100	111,11	-	-

IKU 3 : Persentase Kelulusan Peserta Tugas Belajar

Dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM Aparatur Sipil Negara BPS, salah satu sarana yang disediakan adalah melalui penyediaan program beasiswa Tugas Belajar (TB). Penyelenggaraan TB merupakan salah satu tugas Pusdiklat BPS dengan kegiatan mengirim dan mengelola TB bagi pegawai BPS baik di dalam maupun luar negeri. Program TB yang dimaksud di sini mencakup untuk program pendidikan gelar S2 dan S3, sehingga tidak ada untuk program pendidikan non gelar (*short course* dan *post doctoral*). Dari sisi pembiayaan, program TB yang diselenggarakan oleh Pusdiklat terdiri dari:

1. Beasiswa APBN BPS

Program ini adalah kerjasama rintisan gelar S2 maupun S3 antara BPS dengan perguruan tinggi yang ada di dalam negeri seperti UI, ITB, IPB, UGM, UNPAD, ITS, UNAIR, UNDIP, dan UNHAS.

2. Beasiswa APBN Non BPS

Program ini berupa tawaran beasiswa dari Bappenas atau Kementerian/Lembaga lain baik untuk program S2 dalam negeri, luar negeri, maupun Double Degree dan S3.

3. Beasiswa Non APBN

Penyedia utama beasiswa non APBN adalah STUNED untuk studi di Belanda dan AAS untuk studi di Australia. Selain itu terdapat pula beberapa negara sponsor beasiswa seperti Jepang, Jerman, Belanda, dan Swiss namun tidak ditawarkan setiap tahun.

4. Individu pegawai juga dapat mencari sendiri sponsor beasiswa. Setelah mendapat izin dari atasannya (Eselon II), maka dapat diajukan ke Pusdiklat untuk mendapatkan status

TB dengan menandatangani Surat Perjanjian Tugas Belajar (SPTB) dan menerima Surat Keputusan Tugas Belajar (SKTB) dari Biro Kepegawaian.

Pelaksanaan program TB Rintisan Gelar (APBN) didahului adanya *Memorandum of Understanding* (MOU) antara BPS dengan Universitas/Perguruan Tinggi (Univ/PT), yang dilanjutkan dengan pembuatan Perjanjian Kerjasama setiap akan mengirim calon mahasiswa baru. Pusdiklat BPS juga menyusun dan mengajukan rencana biaya pendidikan, tunjangan hidup, buku, dan riset peserta Tugas Belajar APBN dan merencanakan jumlah pegawai yang akan ditugasbelajarkan.

Penyelenggaraan program beasiswa APBN BPS merupakan salah satu wujud layanan Pusdiklat BPS untuk mengakomodir pegawai BPS melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Program beasiswa APBN BPS yang selama ini berjalan meliputi program studi ilmu statistik, ekonomi, kependudukan, dan teknologi. Untuk memenuhi kebutuhan ilmu lainnya dalam menunjang pekerjaan BPS telah ditambahkan program studi Ilmu Akuntansi dan Ilmu Psikologi pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 telah mengembangkan kembali ilmu lainnya yaitu Ilmu Komputer dan Ilmu Komunikasi di Universitas Indonesia dan Universitas Padjadjaran. Selain penambahan jurusan, pada tahun 2020 telah pula dijalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi lainnya yaitu Universitas Hasanuddin Makassar untuk S2 jurusan Kependudukan dan penambahan jurusan kependudukan untuk S3 di UGM.

Dari program-program tersebut diharapkan dapat menyiapkan calon-calon pimpinan BPS yang akan menduduki jabatan struktural BPS baik di pusat maupun daerah. Disamping itu juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pejabat fungsional seperti fungsional pranata komputer, statistisi, peneliti, widyaiswara, dosen, dan sebagainya.

Jumlah pegawai yang mengikuti Tugas Belajar yang dibiayai APBN BPS pada tahun 2020 adalah sebanyak 158 orang (Tabel 11). Mereka tersebar di beberapa perguruan tinggi yaitu Institut Teknologi Bandung (ITB) program studi Informatika, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) program studi Statistika, Universitas Padjadjaran (Unpad) program studi Statistika dan Komunikasi, Universitas Indonesia (UI) program studi ketenagakerjaan, ekonomi, psikologi, komputer, dan komunikasi, Universitas Gadjah Mada (UGM) program studi Ekonomi dan Kependudukan, Universitas Airlangga (Unair) program studi ekonomi, Institut Pertanian Bogor (IPB) program studi Statistika, Universitas Diponegoro (Undip) program studi akuntansi, dan Universitas Hasanuddin (Unhas) program studi kependudukan. Selain dari APBN BPS terdapat pegawai yang memperoleh beasiswa dari Non BPS baik dalam negeri, luar negeri maupun double degree sebanyak 60 orang.

Tabel 11. Jumlah Pegawai BPS yang memperoleh Beasiswa S2 dan S3 Tahun 2020

No	Program Beasiswa	Sponsor				Jumlah Tugas Belajar
		APBN BPS	Non BPS			
			Dalam Negeri	Luar Negeri	Double Degree	
1	S2	145	44	7	6	202
2	S3	13	1	2	0	16
Jumlah		158	45	9	6	218

Capaian kinerja yang diperoleh pada indikator persentase kelulusan peserta tugas belajar adalah sebesar 111,11 persen, dimana capaiannya telah melebihi dari target yang diharapkan. Hal ini tidak terlepas dari adanya pelayanan Pusdiklat BPS yang berkinerja baik dalam menangani semua permasalahan penyelenggaraan TB baik dalam hal penanganan pemberian uang saku/biaya hidup, uang buku, uang riset, maupun biaya pendidikan. Selain itu pula kelancaran dalam hal penanganan peserta yang akan mengikuti ujian tesis baik penyediaan penguji maupun operasional lainnya.

Meskipun ada sedikit kendala dalam pengelolaan TB tahun 2020 yaitu dengan adanya Pandemi Virus Corona (COVID-19), hampir semua kampus yang bekerjasama dengan BPS ditutup total sehingga komunikasi hanya dapat dilakukan secara online. Oleh karena itu, pengelolaan Tugas Belajar APBN mengalami sedikit keterlambatan dalam proses pengurusan administrasinya antara mahasiswa, kampus, dan pembiayaan (Perjanjian Kerjasama, Surat Keterangan Lulus, kegiatan sidang, dan lain-lain). Namun hal ini tidak menyurutkan Pusdiklat BPS dalam mencapai kinerja yang lebih baik, guna mewujudkan layanan diklat sekaligus untuk peningkatan dan pengembangan SDM pegawai BPS yang berkualitas dan berkompeten di bidangnya.

Untuk perbandingan realisasi dengan tahun 2019 tidak dapat dilakukan karena berbeda indikator yang menjadi sasarannya.



Gambar 45. Monitoring, Evaluasi, dan Rencana Kerjasama Double Degree dengan Prodi Statistika Terapan dan Ilmu Komunikasi Unpad, Bandung



Gambar 46. Kuliah Umum Kepala Pusdiklat di Prodi S2 Ilmu Kependudukan Universitas Hasanuddin, Makasar



Gambar 47. Monitoring, Evaluasi, dan Rencana Kerjasama Double Degree dengan Magister Ekonomi Pembangunan Universitas Gadjah Mada



Gambar 48. Kegiatan Kerjasama Perguruan Tinggi dengan Magister Ekonomi Pembangunan Universitas Gadjah Mada

Dalam rangka peningkatan kompetensi SDM, PNS yang ingin meningkatkan kemampuan dan keahliannya dalam rangka mendukung tugas sebagai aparatur negara, dapat mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan biaya sendiri melalui jalur Izin Belajar (IB). Pendidikan melalui IB dilakukan di luar jam kerja sehingga tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan.

Pusdiklat BPS sebagai pengelola IB melakukan kegiatan pelaksanaan pemberian IB dan mengadministrasikannya bagi pegawai BPS yang ingin melanjutkan sekolah melalui jalur IB. Seluruh IB program S2 dan S3 diproses oleh Pusdiklat dengan mendapat

rekomendasi/persetujuan dari Sekretaris Utama (Sestama). Sementara itu untuk pegawai yang akan melanjutkan ke jenjang S1, bagi pegawai BPS Pusat surat IB-nya dibuat oleh Pusdiklat sedangkan bagi pegawai BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota dibuat oleh Kepala BPS Provinsi yang ditembuskan ke Pusdiklat dan Biro Kepegawaian.

Tabel 12. Jumlah Pegawai BPS yang Menempuh Pendidikan Melalui Izin Belajar Tahun 2020

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Izin Belajar
1	S1	18
2	S2	94
3	S3	7

SASARAN 4 : PENGUATAN MANAJEMEN INTERNAL DAN SUMBERDAYA

Kelancaran dan keberhasilan tugas dan fungsi pokok Pusdiklat BPS dalam mewujudkan layanan pendidikan dan pelatihan sangat dipengaruhi oleh keberhasilan dalam penguatan manajemen internal dan sumberdaya melalui akuntabilitas kinerja yang transparan. Akuntabilitas kinerja yang transparan sangat diperlukan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja.

Meningkatnya akuntabilitas kinerja yang transparan diwujudkan melalui indikator hasil penilaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dalam Perjanjian Kinerja Pusdiklat BPS tahun 2020. Sasaran tersebut dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan Pusdiklat BPS dalam mengemban tugas di bidang pendidikan dan pelatihan.

Tabel 13. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran Strategis ke 4 Tahun 2020

IKU	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian (%)	Realisasi 2019	Perubahan terhadap realisasi 2019 (%) $((3)/(5)*100)-100$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Hasil Penilaian SAKIP	70	70,39	100,56	70,39	0
Rata rata Capaian Kinerja			100,56		

7. IKU : Hasil Penilaian SAKIP

Salah satu hal yang menjadi inti dari reformasi birokrasi adalah akuntabilitas instansi pemerintah. Instansi pemerintah yang akuntabel semakin penting keberadaannya mengingat semakin tingginya ekspektasi dan tuntutan masyarakat atas pelayanan pemerintah. Pusdiklat BPS sebagai salah satu unsur dari instansi pemerintah juga harus meningkatkan akuntabilitasnya. Akuntabilitas dimaksud tidak hanya dari sisi keuangan saja, meskipun dari sisi tersebut mutlak diperlukan melainkan juga dari sisi kinerja. Dengan penguatan akuntabilitas ini, diharapkan akan memberi efek peningkatan kinerja yang pada gilirannya akan menghasilkan pelayanan prima baik kepada pegawai BPS maupun instansi lainnya.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, yang dimaksud dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Evaluasi yang dilakukan dalam rangka penilaian SAKIP ditujukan untuk menilai implementasi dan pengembangan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pusdiklat BPS dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*).

Dalam evaluasi SAKIP komponen yang dinilai terdiri atas :

1. Perencanaan Kinerja
2. Pengukuran Kinerja
3. Pelaporan Kinerja
4. Evaluasi Kinerja
5. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

Masing-masing komponen tersebut terbagi lagi ke dalam evaluasi sub komponen:

1. Perencanaan Kinerja
 - a. Perencanaan Strategis
 - 1). Pemenuhan Renstra
 - 2). Kualitas Renstra
 - 3). Implementasi Renstra
 - b. Perencanaan Kinerja Tahunan
 - 1). Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan
 - 2). Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan

- 3). Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan
2. Pengukuran Kinerja
 - a. Pemenuhan Pengukuran
 - b. Kualitas Pengukuran
 - c. Implementasi Pengukuran
3. Pelaporan Kinerja
 - a. Pemenuhan Pelaporan
 - b. Kualitas Informasi Kinerja
 - c. Pemanfaatan Informasi Kinerja
4. Evaluasi Kinerja
 - a. Pemenuhan Evaluasi
 - b. Kualitas Evaluasi
 - c. Pemanfaatan Hasil Evaluasi
5. Pencapaian Sasaran/Kinerja
 - a. Kinerja yang Dilaporkan (Output)
 - b. Kinerja yang Dilaporkan (Outcome)

Sebagai acuan dalam pencapaian sasaran penguatan manajemen internal dan sumberdaya adalah melalui indikator hasil penilaian SAKIP. Indikator tersebut dapat menggambarkan bahwa semakin tinggi realisasi penilaian SAKIP menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik.

Hasil penilaian SAKIP pada tahun 2020 belum dikeluarkan oleh Inspektorat, sehingga sementara ini masih disamakan dengan tahun 2019. Pada Tabel 13 dapat dilihat bahwa hasil penilaian SAKIP pada tahun 2020 adalah sebesar 70,39 poin sedangkan target PK 2020 adalah sebesar 70 poin. Berdasarkan nilai tersebut diperoleh capaian kinerja sebesar 100,56 persen yang artinya bahwa tingkat pencapaian kinerja yang diperoleh telah melebihi dari target yang diharapkan. Angka ini sejalan dengan upaya Pusdiklat BPS dari tahun ke tahun untuk selalu memperbaiki Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

3.3. Capaian Kinerja Pusdiklat BPS Terhadap Target Renstra 2020-2024

Rencana Strategis adalah proses pemilihan tujuan organisasi, penentuan kebijakan, dan program untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Rencana Strategis merupakan proses perencanaan jangka menengah (lima tahun) yang formal untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk mengetahui keberhasilan organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran

perlu adanya pengukuran terhadap indikator-indikator yang mewakili pencapaian kedua hal tersebut.

Tahun 2020 merupakan tahun awal pada periode Renstra 2020-2024. Berdasarkan Tabel 14, jika dibandingkan target Renstra tahun 2020, maka capaian indikator dari masing-masing tujuan dan sasaran menunjukkan hasil yang maksimal, yaitu diperoleh nilai realisasi lebih dari target yang diharapkan sehingga capaian kinerjanya melebihi dari 100 persen.

Capaian pada indikator pertama yaitu persentase kepuasan peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat dapat dikatakan berhasil dengan realisasi sebesar 93,14 persen. Angka tersebut relatif meningkat jauh dari target Renstra tahun 2020 sebesar 85 persen. Keberhasilan ini berkat upaya dan kerja keras dari seluruh pihak terkait dan diharapkan agar di masa mendatang diperoleh capaian kinerja yang lebih tinggi mengingat indikator kepuasan peserta diklat dapat dikatakan sebagai tolok ukur keberhasilan Pusdiklat BPS dalam menyelenggarakan kegiatan diklat.

Begitu pula pada capaian indikator kedua yaitu persentase SDM Pusdiklat yang melakukan peningkatan kompetensi yang berhasil melebihi target yaitu dengan target Renstra 2020 sebesar 90 persen diperoleh realisasi sebesar 95 persen sehingga capaiannya adalah sebesar 105,56 persen.

Capaian indikator ketiga yaitu persentase kelulusan peserta tugas belajar juga telah melebihi dari target Renstra 2020 yaitu dengan target Renstra 2020 sebesar 90 persen diperoleh realisasi sebesar 100 persen sehingga memperoleh capaian kinerja sebesar 109,52 persen.

Pada indikator terakhir atau keempat yaitu hasil penilaian SAKIP, memperoleh capaian sebesar 100,56 persen dari target Renstra 2020 sebesar 70 poin. Dengan capaian kinerja diatas 100 persen diperlukan penajaman target pada Renstra 2020-2024 agar pengukuran keberhasilan Pusdiklat BPS terhadap indikator-indikator tersebut lebih tergambar.

Tabel 14. Perbandingan Realisasi Kinerja Pusdiklat BPS Tahun 2020 dengan Target Renstra Tahun 2020

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2020	Realisasi	Capaian terhadap Target 2020 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
T1: Meningkatkan Layanan Pendidikan dan Pelatihan Yang Adaptif				
SS1: Terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi mutakhir, dan aturan yang berlaku				

Persentase kepuasan peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat	Persen	85	93,14	109,58
T2: Meningkatkan kompetensi SDM				
SS2: Terwujudnya SDM Pusdiklat BPS yang melakukan peningkatan kompetensi				
Persentase SDM Pusdiklat yang melakukan peningkatan kompetensi	Persen	90	95	105,56
SS3: Terjalannya kerja sama dengan institusi pendidikan dan pelatihan dalam negeri dan luar negeri yang berkesinambungan				
Persentase kelulusan peserta tugas belajar	Persen	90	100	111,11
SS4: Penguatan manajemen internal dan sumberdaya				
Hasil penilaian SAKIP	Poin	70	70,39	100,56

3.4. Kegiatan Prioritas Pusdiklat BPS Tahun 2020

Kegiatan yang menjadi prioritas Pusdiklat BPS pada tahun 2020 ini masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu pelaksanaan pelatihan dasar atau Latsar CPNS formasi penerimaan tahun 2019. Namun, karena belum terbitnya SK penugasan atau penempatan mereka di satuan kerja BPS di daerah, maka di awal tahun yaitu bulan Januari 2020 BPS mendahulukan penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan pengawas bagi para pejabat pengawas baik yang ada di pusat maupun daerah.

Setelah para CPNS bertugas dan ditempatkan di masing-masing satuan kerja baik di pusat maupun daerah, Pusdiklat BPS mengatur jadwal pelaksanaan Latsar CPNS BPS sejak bulan Juni sampai dengan November 2020. Penyelenggaraan Latsar bagi para CPNS baik golongan II maupun golongan III berasal dari lulusan Politeknik Statistika STIS dan beberapa lulusan Program Diploma PKN STAN.

Untuk kegiatan pelatihan teknis yang menjadi prioritas adalah :

- (3) Pelatihan Statistik Sektoral Kabupaten/Kota, pesertanya berasal dari BPS Kabupaten/Kota, Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik (Diskominfotik), serta Organisasi Perangkat Desa/Produsen Data.
- (4) Pelatihan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga yang pesertanya berasal dari beberapa Pusdatin, Pusdiklat, dan Organisasi Perangkat Desa/Produsen Data Kementerian/Lembaga.

Tujuan diklat untuk meningkatkan kompetensi peserta pelatihan agar mampu menjalankan tugas walidata statistik sektoral di daerah dan membantu walidata dalam membina produsen data di daerahnya.

3.5. Upaya Efisiensi di Pusdiklat BPS

Upaya efisiensi suatu kegiatan dapat diukur keberhasilannya melalui besarnya anggaran yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pelaksanaan anggaran di Pusdiklat BPS senantiasa mengacu pada prinsip 3E (efektif, efisien, dan ekonomis) dalam menghasilkan output yang berkualitas. Berdasarkan prinsip tersebut, maka selama periode tahun anggaran 2020 telah dilakukan revisi anggaran sebanyak 6 kali revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal melalui Dirjen Anggaran (DJA) dan Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta (Kanwil DJPB).

Dasar hukum dilakukannya Revisi adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.02/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020 dan DIPA Awal Nomor: SP DIPA-054.01.1.690328/2020 tanggal 12 November 2019 sebesar Rp. **62.676.943.000,-**. Revisi DIPA yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi dengan rincian sebagai berikut :

1. **Revisi ke-1** tanggal pengesahan 5 Februari 2020 dilakukan untuk menyesuaikan anggaran dari BPS Pusat. Berdasarkan Surat dari Pengguna Anggaran Nomor B-008/BPS/1000/01/2020 tanggal 8 Januari 2020 perihal Langkah-Langkah Strategis dan Persiapan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020, seluruh KPA Satker ditugaskan untuk meneliti kembali kesesuaian anggaran dengan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Pada Revisi 1 ini terdapat pengurangan anggaran pada output Layanan Sarana dan Prasarana Internal berupa Rehabilitasi Gedung Kantor (Mushola). Secara total terjadi penurunan anggaran dari anggaran awal sebesar Rp. 62.676.943.000, turun Rp. 97.000.000,- menjadi Rp. **62.579.943.000,-**
2. **Revisi ke-2** tanggal 29 April 2020 merupakan revisi ke DJA yang dilakukan sesuai surat Pengguna Anggaran BPS Nomor B-083/BPS/1000/4/2020 tanggal 16 April 2020 perihal Penghematan Anggaran Tahun 2020. Hal ini terkait kebutuhan dana yang besar dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Penghematan besar-besaran terjadi pada Output Layanan Pendidikan dan Pelatihan sebanyak Rp. 9.545.820.000,- dari anggaran sebesar Rp. 28.962.029.000,- menjadi Rp. 19.416.209.000,-. Penghematan tersebut dilakukan dengan merubah metode

pembelajaran diklat yang direncanakan dengan cara *offline* (tatap muka) diubah dengan cara *online* (jarak jauh). Hal ini untuk mengikuti protokol penanganan Covid-19 dan sesuai dengan Surat Edaran LAN RI Nomor 19/K.1/HKM.02.3/2020 tentang perencanaan kegiatan pelatihan dengan metode pembelajaran jarak jauh (*distance e-learning*). Termasuk pula kegiatan seminar diklat dilakukan secara *online*, sehingga seluruh perjalanan dinas paket meeting dalam rangka seminar dibatalkan.

Namun, pada revisi ini terjadi penambahan pada Output Layanan Sarana dan Prasarana Internal berupa pengadaan peralatan pencegahan COVID-19 seperti alat ukur suhu, alat semprot desinfektan, dan APD petugas penyemprotan. Selain itu, terdapat penambahan pula pada Output Layanan Dukungan Manajemen Satker yaitu biaya pendidikan tugas belajar pada jurusan/program studi baru penerimaan tahun 2020 dan untuk pembelian masker, hand sanitizer, dll dalam rangka pencegahan COVID-19. Sehingga secara total Revisi 2 ini mengurangi anggaran sebesar Rp. 8.821.284.000,- dari anggaran sebesar Rp. 62.579.943.000,- menjadi Rp. **53.758.659.000,-**

3. **Revisi ke-3** tanggal 7 September 2020 merupakan revisi ke DJA untuk menindaklanjuti Surat Pengguna Anggaran BPS Nomor B-532/BPS/2100/08/2020 tanggal 5 Agustus 2020 perihal Revisi Anggaran dalam rangka adaptasi Tatanan Normal Baru. Dalam revisi ini dilakukan efisiensi anggaran pada Latsar CPNS Golongan III dan Golongan II dengan metode pembelajaran jarak jauh, sehingga terjadi pengurangan pagu sebesar Rp. 2.519.085.000,- dari semula Rp. 53.758.659.000,- menjadi **Rp. 51.239.574.000,-**.
4. **Revisi ke-4** tanggal 25 September 2020 merupakan revisi yang dilakukan di Kanwil DJPB DKI Jakarta dengan tanpa merubah nilai pagu **Rp. 51.239.574.000,-**. Revisi dilakukan dalam rangka optimalisasi anggaran yang telah dilaksanakan yaitu dengan melakukan pergeseran antar keluaran (output), revisi perubahan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA, dan revisi administrasi perubahan pejabat perbendaharaan. Dasar hukum dilakukannya revisi kali ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.02/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020 dan DIPA Petikan Satker Pusklat BPS.
5. **Revisi ke-5** tanggal 2 November 2020 merupakan revisi ke DJA tanpa merubah nilai pagu **Rp. 51.239.574.000,-**. Revisi dilakukan dalam rangka menindaklanjuti arahan Sekretaris Utama pada Rapat Pimpinan Lengkap (Rapimkap) tanggal 12 Oktober 2020 tentang strategi percepatan penyerapan anggaran. Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan optimalisasi dari potensi anggaran yang tidak terserap dengan mengalihkan pada pengadaan belanja modal berupa perangkat pengolah data dan

komunikasi dalam rangka mendukung pembelajaran online dan memfasilitasi pegawai memenuhi kebijakan sistem kerja *Work From Home* (WFH).

6. **Revisi ke-6** tanggal 29 Desember 2020 dengan nilai pagu tetap sejumlah **Rp. 51.239.574.000,-** untuk Pemutakhiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) di Kanwil DJPB DKI Jakarta.

Secara total sejak DIPA Awal sampai DIPA Revisi ke-6 dilakukan terjadi efisiensi pengurangan anggaran sebesar Rp. 11.437.369.000,-.

Tabel 15. Rincian Anggaran Belanja DIPA Awal dan DIPA Akhir Tahun 2020

Uraian	2020	
	ANGGARAN AWAL (Rp)	ANGGARAN SETELAH REVISI (Rp)
BELANJA PEGAWAI	12.363.762.000,-	12.363.762.000,-
BELANJA BARANG	50.017.181.000,-	37.271.536.000,-
BELANJA MODAL	296.000.000,-	1.604.276.000,-
Jumlah Belanja	62.676.943.000,-	51.239.574.000,-

Dari sisi efisiensi penggunaan anggaran, dibanding tahun 2019, Pusdiklat BPS telah berhasil menghemat penggunaan anggaran di tahun 2020 dilihat dari segi pemanfaatannya, antara lain :

Tabel 16. Efisiensi Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kantor

No.	Kegiatan/ Pekerjaan	Nilai Realisasi Tahun 2019 (Rp)	Nilai Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Lembur Pegawai	513.784.000,-	282.308.000,-	Efisiensi penggunaan kegiatan lembur dikarenakan seluruh pegawai memaksimalkan waktu menyelesaikan pekerjaan di hari kerja. Dan memasuki triwulan II sampai akhir triwulan IV, pegawai banyak melakukan pekerjaan dari rumah dengan jadwal WFH dan WFO secara bergantian sebagai dampak pandemic covid-19.
2.	Belanja pemeliharaan kendaraan dinas dan operasional	101.836.313,-	87.026.907,-	Merawat kendaraan dinas dan operasional sehingga tidak mudah rusak dan bekerjasama dengan dealer resmi, berdampak pada efisiensi anggaran pemeliharaan dan mengurangi pengeluaran untuk service dan perbaikan, serta memudahkan pengontrolan dari segi biaya, tenaga, waktu, dan administrasinya.
3.	Biaya langganan daya dan jasa listrik	719.267.916,-	406.650.048	Penghematan listrik ditunjukkan dengan adanya efisiensi pada : <ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan peralatan listrik dan panel listrik tidak difungsikan selama pembelajaran menggunakan metode jarak jauh dan sistem bekerja WFH/WFO. - Sistem pengoperasian pompa air sudah terintegrasi (dinyalakan secara bergantian) sehingga tidak ada lagi pompa cadangan. Hal ini menjadi efisien dan menambah umur pompa. - Pengoperasian lift pada Gedung A sudah menggunakan sensor, secara otomatis lift akan tidak

				aktif dengan sendirinya sehingga penggunaan listrik lebih efisien.
4.	Pengadaan ATK dan Computer suply	387.963.470,-	208.702.810,-	Pengadaan kertas dan tinta printer menjadi lebih efisien dengan adanya diklat online dan "digitalisasi" yaitu penggunaan aplikasi untuk beberapa pekerjaan seperti peng-SPJ-an honor pengajar, administrasi surat-menyurat, dll sehingga tidak perlu lagi menggunakan hardcopy (<i>paperless</i>)

Selain efisiensi operasional perkantoran, pada layanan diklat terjadi efisiensi yang sangat besar terutama anggaran perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas paket meeting. Efisiensi yang dilakukan pada beberapa pos anggaran program DMPTTL tersebut dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan lain baik yang belum diposkan anggarannya maupun kegiatan yang masih mengalami kekurangan anggaran. Beberapa pemanfaatan anggaran diutamakan untuk memenuhi kebutuhan penanganan COVID-19. Selain itu, digunakan pula untuk menambah diklat yang sangat dibutuhkan seperti Diklat Statistik Sektoral, Training Online IMF, Diklat Pengelola Keuangan, Capacity Building, dan lain-lain.

Pemanfaatan juga dilakukan terhadap kegiatan yang masih kekurangan anggaran yaitu pengelolaan rintisan gelar (tugas belajar) yang dibiayai APBN BPS. Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, beberapa perguruan tinggi ditambah jurusan/program studinya sesuai dengan kebutuhan BPS. Dari berbagai tindakan efisiensi yang dilakukan sudah diuji, dihitung, dan terutama disetujui oleh pimpinan dengan melalui berbagai pertimbangan, sehingga anggaran tersebut benar-benar terserap dan dimanfaatkan dengan *output* yang tepat.

3.6. Realisasi Anggaran Pusdiklat BPS Tahun 2020

Pagu Anggaran Menurut Program dan Sumber Dana

Selain dari sisi SDM, keberhasilan pencapaian kinerja sangat didukung oleh anggaran yang tersedia di Pusdiklat BPS. Dukungan dana tersebut diwujudkan melalui satu program, yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas teknis Lainnya (DMPTTL) dan satu kegiatan yaitu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara (BPS). Keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggung jawab Kepala Pusdiklat BPS beserta jajarannya atas penggunaan anggaran yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mencapai kinerja yang diharapkan, telah dialokasikan pagu anggaran Pusdiklat BPS selama tahun 2020 adalah sebanyak Rp.51.239.574.000,-. Dari pagu tersebut, telah dimanfaatkan penggunaannya sebesar 91,51 persen (Tabel 17). Bila dibandingkan dengan tahun 2019 yang penyerapannya sebesar 94,88 persen (realisasi Rp.

65.135.636.905,- dari total pagu anggaran Rp. 68.649.822.000,-), penyerapan tahun 2020 merupakan prestasi yang membanggakan di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19.

Bila dilihat menurut sumber dana, pagu anggaran yang tersedia terdiri dari Rp. 50.028.894.000,- atau 97,64 persen berasal dari rupiah murni dan sisanya Rp 1.210.680.000,- atau 2,36 persen berasal dari PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak).

Tabel 17. Pagu dan Realisasi Anggaran Pusdiklat BPS Dalam Program DMPTTL Menurut Sumber Dana Tahun Anggaran 2020

Sumber Dana	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Rupiah Murni	50.028.894.000,-	46.651.181.624,-	93,25
PNBP	1.210.680.000,-	240.669.400,-	19,88
Total	51.239.574.000,-	46.891.851.024,-	91,51

Dari Tabel 17 dapat dilihat bahwa realisasi anggaran yang berasal dari PNB hanya 19,88 persen dari pagu yang tersedia. Salah satu kendala teknis yaitu adanya pandemi COVID-19 sehingga kerjasama diklat hanya dapat direalisasikan untuk 1 kelas saja dengan Pusdiklat Kementerian Keuangan dalam bentuk penyelenggaraan Diklat Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli. Namun bila dilihat dari sisi pagu penggunaannya yang sebanyak Rp. 256.500.000,- dan realisasi Rp. 240.669.400,- diperoleh penyerapan yang cukup tinggi yaitu sebesar 93,83 persen.

Tabel 18. Pagu dan Realisasi Anggaran Pusdiklat BPS Dalam Program DMPTTL Menurut Rincian Belanja Tahun Anggaran 2020

Rincian Belanja (Akun 2 Digit)	Pagu Anggaran Terakhir	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi (%)
51 Belanja Pegawai	12.363.762.000	10.869.140.943	87,90
52 Belanja Barang	37.271.536.000	34.429.199.591	92,35
53 Belanja Modal	1.604.276.000	1.593.510.490	99,33
Total	51.239.574.000	46.891.851.024	91,51

Pada Tabel 18 dapat dilihat realisasi anggaran Pusdiklat BPS selama tahun 2020 berdasarkan rincian belanja. Pencapaian realisasi pada belanja modal hampir mendekati 100 persen yaitu 99,33 persen dari pagu anggaran yang tersedia. Belanja modal yang telah

direalisasikan berupa pengadaan perangkat teknologi dan komunikasi, peralatan fasilitas perkantoran, dan rehabilitasi gedung/bangunan. Dengan tersedianya belanja modal tersebut sangat menunjang kelancaran penyelenggaraan diklat.

Pagu Anggaran menurut Sasaran Strategis

Dalam rangka menunjang pencapaian kinerja dari sasaran strategis yang tertuang pada masing-masing indikator, diperlukan anggaran yang memadai sehingga dapat tercapai sesuai tujuan yang diinginkan. Berikut adalah tabel yang memuat penjelasan terkait penganggaran tahun 2020 berdasarkan Sasaran Strategis.

Tabel 19. Anggaran Pusdiklat BPS Tahun 2020 Menurut Sasaran Strategis

Tujuan/Sasaran Strategis	Pagu Akhir	Realisasi	Sisa Anggaran	Realisasi (%)
T1. Meningkatnya Layanan Pendidikan dan Pelatihan				
SS1.1. Terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi mutakhir, dan aturan yang berlaku	10.253.381.000,-	8.210.068.199,-	2.043.312.801,-	80,07
T2. Meningkatnya Kompetensi SDM				
SS2.1. Terwujudnya SDM Pusdiklat BPS yang melakukan peningkatan kompetensi	865.512.000,-	650.929.054,-	214.582.946,-	75,21
SS2.2. Terjalinnnya kerjasama dengan institusi pendidikan dan pelatihan dalam negeri dan luar negeri yang berkesinambungan	22.947.102.000,-	22.594.731.229,-	365.043.166,-	98,46
SS2.3. Penguatan manajemen internal dan sumberdaya	16.781.837.000,-	15.118.206.850,-	1.663.630.150,-	90,09
JUMLAH	51.239.574.000,-	46.891.851.024,-	4.360.395.371,-	91,51

Berdasarkan tabel 19, dapat dilihat bahwa realisasi anggaran terbesar diserap oleh Sasaran Strategis ketiga yakni terjalinnnya kerjasama dengan institusi pendidikan dan pelatihan dalam negeri dan luar negeri yang berkesinambungan mencapai 98,46 persen. Dari pagu anggaran yang tersedia sebanyak Rp.22.947.102.000,- dapat terserap

Rp.22.594.731.229.-. Penggunaan anggaran tersebut untuk membayar biaya pendidikan seluruh peserta tugas belajar, bantuan biaya hidup per bulan, bantuan uang buku dan referensi per tahun, bantuan riset/penelitian/seminar per tahun, biaya perjalanan pemanggilan dan pemulangan peserta tugas belajar, dan biaya perjalanan dalam rangka kerjasama perguruan tinggi. Sejalan dengan pencapaian targetnya yang melebihi nilai target yang ditentukan, dapat disimpulkan bahwa program kerjasama dengan Perguruan Tinggi menjadi hal yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM pegawai BPS. Pencapaian ini setara dengan penyerapan anggaran yang terealisasi.

Sebaliknya, realisasi terendah berada di Sasaran Strategis kedua yakni terwujudnya SDM Pusdiklat BPS yang melakukan peningkatan kompetensi dengan penyerapan anggaran sebesar 75,21 persen. Bila dilihat dari pencapaian target untuk sasaran strategis kedua ini dengan indikator utama persentase SDM Pusdiklat yang melakukan peningkatan kompetensi telah melebihi target yaitu 105,56 persen. Hal ini menggambarkan bahwa SDM Pusdiklat yang melakukan peningkatan kompetensi relatif banyak, namun karena adanya pandemi COVID-19 kegiatannya dilakukan secara online sehingga tidak membutuhkan biaya yang besar.

Tabel 20. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Realisasi Anggaran Menurut Sasaran Tahun 2020

Tujuan/Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi (100 – kolom (5))
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
T1. Meningkatnya Layanan Pendidikan dan Pelatihan					
SS1.1. Terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi mutakhir, dan aturan yang berlaku	109,58	10.253.381.000,-	8.210.068.199,-	80,07	19,93
T2. Meningkatnya Kompetensi SDM					
SS2.1. Terwujudnya SDM Pusdiklat BPS yang melakukan peningkatan kompetensi	105,56	865.512.000,-	650.929.054,-	75,21	24,79
SS2.2. Terjalannya kerjasama dengan institusi pendidikan dan pelatihan dalam negeri dan luar negeri yang berkesinambungan	111,11	22.947.102.000,-	22.594.731.229,-	98,46	1,54
SS2.3. Penguatan manajemen internal dan sumberdaya	100,56	16.781.837.000,-	15.118.206.850,-	90,09	9,91

Berdasarkan data pada tabel 20, dapat dilihat bahwa secara persentase, seluruh sasaran memiliki capaian kinerja berada di atas realisasi anggarannya. Dilihat dari nilai

pencapaian kinerja untuk Sasaran Pertama sampai Sasaran Keempat dapat disimpulkan bahwa kinerja Pusdiklat BPS sudah sangat baik karena nilai capaian kerjanya rata-rata telah melebihi realisasi anggaran. Hal ini menjadi motivasi untuk tahun yang akan datang bahwa semangat kinerja yang sudah ada agar terus dipertahankan bahkan semakin ditingkatkan.

Dalam rangka mendukung peningkatan capaian kinerja, pengelolaan anggaran yang baik harus didukung pula dengan perencanaan yang matang. Hal ini masih menjadi poin penting yang perlu mendapat perhatian bukan hanya dari pimpinan tetapi juga dari masing-masing *subject matter*. Sejalan dengan aktifitas dan kegiatan diklat yang telah dijadwalkan, anggaran pun harus dikelola dan direncanakan dengan baik-baiknya, sehingga dapat terserap dengan baik pula sesuai dengan tujuan pelaksanaan kegiatan.

3.7. Penghargaan Tahun 2020

Pada tahun 2020 Pusdiklat BPS telah mendapatkan penghargaan sebagai berikut :

1. Akreditasi Diklat

Pada tahun 2019, Pusdiklat BPS memperoleh akreditasi sebagai Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Terakreditasi dalam rangka menyelenggarakan Program:

- a. Pelatihan Kepemimpinan Tk III dengan kualifikasi B
- b. Pelatihan Kepemimpinan Tk IV dengan kualifikasi A
- c. Pelatihan Dasar CPNS dengan kualifikasi A

Akreditasi ini berlaku selama lima tahun kedepan.



Gambar 49. Penyerahan Sertifikat Akreditasi oleh LAN RI

2. LAN Awards

Dalam rangka memperingati hari jadinya, Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai instansi pembina lembaga pendidikan dan pelatihan secara rutin menyelenggarakan LAN Award, dimana salah satu kategori perlombaannya yaitu "Kompetisi Lembaga Diklat Berprestasi 2020". Setelah pada tahun 2019 Pusdiklat BPS meraih penghargaan dengan mendapatkan peringkat ke-2 lembaga diklat terbaik, pada tahun 2020 Pusdiklat BPS kembali mendapat penghargaan LAN Award 2020. Pusdiklat BPS mendapatkan peringkat ke-3 Lembaga Pelatihan Berprestasi kategori Lembaga Pelatihan Pemerintah Pusat Terakreditasi Pelatihan Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar CPNS. Sedangkan untuk peringkat ke-1 tahun ini diraih oleh BBPK Ciloto Kementerian Kesehatan RI, dan peringkat ke-2 diraih oleh Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah III Jakarta Kementerian PUPR.



Gambar 50. Presentasi dalam rangka LAN Award Kategori Lembaga Diklat Berprestasi



Gambar 51. Piagam Penghargaan LAN Award Kategori Lembaga Diklat Berprestasi

BAB IV

PENUTUP

4.1. Tinjauan Umum

Seiring dengan tuntutan BPS untuk dapat menghasilkan data yang berkualitas serta pelayanan yang prima kepada pengguna data, Pusdiklat BPS juga dihadapi tantangan untuk menyediakan SDM yang lebih berkualitas melalui peningkatan layanan pendidikan dan pelatihan sesuai kompetensi yang dibutuhkan BPS. Untuk memenuhi tantangan yang dihadapi dan mempermudah pencapaiannya, Pusdiklat BPS menyusun dua tujuan capaian kinerja, empat sasaran strategis dan empat indikator kinerja yang harus dicapai pada tahun 2020.

Secara keseluruhan capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis Pusdiklat BPS telah tercapai dengan baik, dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 106,07 persen. Baik secara total maupun masing-masing sasaran memiliki nilai capaian yang lebih dari 100 persen. Hal ini merupakan satu pencapaian yang sangat baik untuk tahun awal periode Renstra 2020 - 2024.

Tingkat capaian kinerja yang telah dicapai mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Pusdiklat BPS telah sesuai program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan sekaligus telah mampu memenuhi visi dan misi Pusdiklat BPS.

Banyak hal yang telah dan terus dilengkapi serta dibenahi dalam rangka upaya peningkatan nilai SAKIP, dan hal tersebut tidak lepas dari kerja sama yang baik antara pimpinan dan seluruh pegawai serta peran penting para penanggung jawab SAKIP. Dengan target yang meningkat dari tahun 2019 dan mendapatkan nilai diatas 100 untuk realisasi tahun 2020 merupakan bukti kinerja Pusdiklat BPS yang semakin baik. Diharapkan pencapaian pada tahun depan dapat lebih meningkat lagi.

4.2. Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang dilakukan guna perbaikan kinerja di tahun mendatang adalah:

1. Dalam rangka peningkatan capaian kinerja perlu dilakukan Reviu Renstra 2020-2024 berupa penajaman indikator maupun target kinerja sehingga pengukuran terhadap tujuan dan sasaran strategis meningkat baik secara kualitas maupun relevansinya.

2. Untuk menghadapi tantangan di Era Next Normal, **Framework C S S** "**Continue – Stop –Start**" yaitu Melanjutkan yang sudah berjalan baik; Menghentikan yang kurang baik; dan Memulai inisiatif baru yang inovatif akan terus disosialisasikan dan diimplementasikan dengan lebih intens melalui pola *Team Work* sesuai dengan kegiatan yang direncanakan.
3. Dalam rangka meningkatkan capaian indikator "kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan diklat", akan terus dilakukan penyempurnaan strategi pembelajaran melalui digitalisasi perangkat komunikasi dan teknologi.
4. Meningkatkan pemasaran produk-produk inovasi yang telah dilaksanakan peserta diklat.
5. Dalam rangka meningkatkan pengembangan kompetensi pegawai, terus berupaya memperbaiki sistem pembelajaran melalui "WARKOP"(Warung Kompetensi Pegawai).
6. Melanjutkan pelaksanaan Pelatihan Statistik Sektoral dan mewujudkan "Desa Cantik" (Cinta Data Statistik).
7. Memperluas cakupan kerjasama dengan Perguruan Tinggi baik di dalam negeri maupun luar negeri melalui jurusan/program studi baru serta program *Double Degree*.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Renstra Pusdiklat BPS 2020-2024

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
T1. Meningkatkan Layanan Pendidikan dan Pelatihan yang Adaptif					
SS.1. Terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi mutakhir, dan aturan yang berlaku					
Persentase Kepuasan Peserta Diklat terhadap Penyelenggaraan Diklat	85%	90%	90%	92%	92%
T2. Meningkatkan kompetensi SDM					
SS.2. Terwujudnya SDM Pusdiklat BPS yang melakukan peningkatan kompetensi					
Persentase SDM Pusdiklat yang melakukan peningkatan kompetensi	90%	90%	90%	90%	90%
SS.3. Terjalinnnya kerjasama dengan institusi pendidikan dan pelatihan dalam negeri dan luar negeri yang berkesinambungan					
Persentase Kelulusan Peserta Tugas Belajar	90%	90%	90%	90%	90%
SS.4. Penguatan manajemen internal dan sumberdaya					
Hasil Penilaian SAKIP	70	70	70	70	70

Lampiran 2. Reviu I Renstra Pusdiklat BPS 2020-2024

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
T1. Meningkatkan Layanan Pendidikan dan Pelatihan yang Adaptif					
SS.1. Terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi mutakhir, dan aturan yang berlaku					
Persentase Kepuasan Peserta Diklat terhadap Penyelenggaraan Diklat	85%	90%	90%	92%	92%
SS.2. Terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan Statistik Sektoral dalam kerangka Satu Data Indonesia					
Persentase peserta yang telah menyelesaikan pelatihan Statistik Sektoral	-	85%	85%	85%	85%
T2. Meningkatkan kompetensi SDM					
SS.3. Terwujudnya SDM Pusdiklat BPS yang melakukan peningkatan kompetensi					
Persentase SDM Pusdiklat yang melakukan peningkatan kompetensi	90%	90%	90%	90%	90%
SS.4. Terjalinnnya kerjasama dengan institusi pendidikan dan pelatihan dalam negeri dan luar negeri yang berkesinambungan					
Persentase Kelulusan Peserta Tugas Belajar	90%	90%	90%	90%	90%
SS.5. Penguatan manajemen internal dan sumberdaya					
Hasil Penilaian SAKIP	70	70	70	70	70
Persentase pengembangan dan pembaharuan infrastruktur	-	90%	90%	90%	90%

Lampiran 3. Pernyataan Perjanjian Kinerja Pusdiklat BPS 2020

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BADAN PUSAT STATISTIK



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eni Lestariningsih S.Si, M.A
Jabatan : Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Adi Lumaksono, M.A.
Jabatan : Sekretaris Utama
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Dr. Adi Lumaksono, M.A.
NIP. 19600831 198302 1 002

Jakarta, 20 Juli 2020
Pihak Pertama

Eni Lestariningsih S.Si, M.A
NIP. 19700310 199401 2 001

Lampiran 3. Pernyataan Perjanjian Kinerja Pusdiklat BPS 2020 (Lanjutan)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Tujuan 1. Meningkatkan layanan pendidikan dan pelatihan yang adaptif			
Terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi mutakhir, dan aturan yang berlaku	Persentase kepuasan peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat	Persen	85
Tujuan 2. Meningkatkan kompetensi SDM			
Terwujudnya SDM Pusdiklat BPS yang melakukan peningkatan kompetensi	Persentase SDM Pusdiklat yang melakukan peningkatan kompetensi	Persen	90
Terjalinnnya kerja sama dengan institusi pendidikan dan pelatihan dalam negeri dan luar negeri yang berkesinambungan	Persentase kelulusan peserta tugas belajar	Persen	90
Penguatan manajemen internal dan sumberdaya	Hasil penilaian SAKIP	Poin	70

Lampiran 3. Pernyataan Perjanjian Kinerja Pusdiklat BPS 2020 (Lanjutan)

Kegiatan	Anggaran
1. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara (BPS)	Rp. 53.758.659.000,-
Jumlah	Rp. 53.758.659.000,-

Pihak Kedua



Dr. Adi Lumaksono, M.A.
NIP. 19600831 198302 1 002

Jakarta, 20 Juli 2020
Pihak Pertama



Eni Lestariningsih S.Si, M.A.
NIP. 19700310 199401 2 001

Lampiran 4. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2020

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
T1: Meningkatkan Layanan Pendidikan Dan Pelatihan Yang Adaptif				
SS1: Terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi mutakhir, dan aturan yang berlaku				
Persentase kepuasan peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat	Persen	85	93,14	109,58
T2: Meningkatkan kompetensi SDM				
SS2: Terwujudnya SDM Pusdiklat BPS yang melakukan peningkatan kompetensi				
Persentase SDM Pusdiklat yang melakukan peningkatan kompetensi	Persen	90	95	105,56
SS3: Terjalinnnya kerja sama dengan institusi pendidikan dan pelatihan dalam negeri dan luar negeri yang berkesinambungan				
Persentase kelulusan peserta tugas belajar	Persen	90	100	111,11
SS4: Penguatan manajemen internal dan sumberdaya				
Hasil penilaian SAKIP	Poin	70	70,39	100,56
Rata-rata Capaian Indikator Sasaran 2020				106,07

**Lampiran 5. Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pusdiklat BPS Tahun 2020**

LAMPIRAN VIII
PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 38 TAHUN 2020
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN 2020-2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (PUSDIKLAT)

1. Nama Unit Organisasi : Pusat Pendidikan Dan Pelatihan (Pusdiklat)
2. Tugas : Melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan dan kepemimpinan serta teknis dan fungsional.
3. Fungsi :
 - a. Pelaksanaan urusan tata usaha;
 - b. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan prajabatan dan kepemimpinan; dan
 - c. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional.
4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatkan layanan pendidikan dan pelatihan yang adaptif				
1.1	Terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan perkembangan ilmu	1.1.1 Persentase kepuasan peserta diklat terhadap penyeleng-	-Pusdiklat	Simdiklat	formula = $(x/y) \times 100\%$ x = jumlah Peserta Diklat yang puas terhadap

**Lampiran 5. Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pusdiklat BPS Tahun 2020 (Lanjutan)**

- 2 -

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	pengetahuan, teknologi informasi mutakhir, dan aturan yang berlaku	garaan diklat			penyelenggaraan diklat y = jumlah Peserta Diklat
2.	Meningkatkan kompetensi SDM				
2.1	Terwujudnya SDM Pusdiklat BPS yang melakukan peningkatan kompetensi	2.1.1 Persentase SDM Pusdiklat yang melakukan peningkatan kompetensi	Pusdiklat	Simdiklat	formula = $(x/y) \cdot 100\%$ x = jumlah pegawai pusdiklat yang melakukan peningkatan kompetensi y = jumlah pegawai pusdiklat
2.2	Terjalannya kerja sama dengan institusi pendidikan dan pelatihan dalam negeri dan luar negeri yang berkesinambungan	2.2.1 Persentase kelulusan peserta tugas belajar	Pusdiklat	Laporan Selesai Tugas Belajar	formula = $(x/y) \cdot 100\%$ x = jumlah Peserta Tugas Belajar yang Lulus y = jumlah Peserta Tugas

**Lampiran 5. Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pusdiklat BPS Tahun 2020 (Lanjutan)**

- 3 -

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					Belajar
2.3	Penguatan manajemen internal dan sumberdaya	2.3.1 Hasil penilaian SAKIP	Pusdiklat	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat	Jelas

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,


 SUHARYANTO

**Lampiran 6. Jumlah Pegawai Di Lingkungan Pusdiklat BPS
Menurut Jenis Jabatan Satuan Organisasi Tahun 2020**

No.	Unit Organisasi	Jenis Jabatan					Jumlah
		Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Fungsional	Staf	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Kepala Pusdiklat	1	-	-	-	-	1
2.	Bagian Tata Usaha	-	1	2	-	29	32
3.	Bidang Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan	-	1	2	-	7	10
4.	Bidang Diklat Teknis dan Fungsional	-	1	2	-	6	9
5.	Widyaiswara	-	-	-	20	-	20
Jumlah		1	3	6	20	42	72

**Lampiran 4. Jumlah Pejabat Fungsional pada Pusdiklat BPS
Keadaan Akhir Tahun 2020**

Jabatan Fungsional	Jenjang				Total
	Pertama	Muda	Madya	Utama	
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)
Widyaiswara	1	10	7	2	20
Jumlah	1	10	7	2	20

Lampiran 5. Kerjasama Tugas Belajar APBN BPS Tahun 2020

No	Kegiatan	Lembaga/Instansi	Data/Output yang dihasilkan	Peserta Tugas Belajar		
				Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pendidikan S2 *)						
1	Pendidikan Program Studi Magister (S2) Kependudukan Tahun 2020	Universitas Hasanuddin	Sumber Daya Manusia (SDM)	2	4	6
2	Pendidikan Program Studi Magister (S2) Statistika Terapan Tahun 2020	Universitas Padjadjaran	Sumber Daya Manusia (SDM)	3	9	12
3	Pendidikan Program Studi Magister (S2) Ilmu Komunikasi	Universitas Padjadjaran	Sumber Daya Manusia (SDM)	2		2
4	Pendidikan Program Studi Magister (S2) Akuntansi Tahun 2020	Universitas Diponegoro	Sumber Daya Manusia (SDM)	3	6	9
5	Pendidikan Program Studi Magister (S2) Ilmu Ekonomi Tahun 2020	Universitas Airlangga	Sumber Daya Manusia (SDM)	7	5	12
6	Pendidikan Program Studi Magister (S2) Ekonomi Pembangunan Tahun 2020	Universitas Gadjah Mada	Sumber Daya Manusia (SDM)	5	9	14
7	Pendidikan Program Studi Magister (S2) Teknik Elektro Jalur Pilihan LTI Tahun 2020	Institut Teknologi Bandung	Sumber Daya Manusia (SDM)	4	6	10
8	Pendidikan Program Studi Magister (S2) Psikologi Tahun 2020	Universitas Indonesia	Sumber Daya Manusia (SDM)	-	1	1
9	Pendidikan Program Studi Magister (S2) Ilmu Ekonomi Tahun 2020	Universitas Indonesia	Sumber Daya Manusia (SDM)	2	10	12
10	Pendidikan Program Studi Magister (S2) Ilmu Komputer Tahun 2020	Universitas Indonesia	Sumber Daya Manusia (SDM)	1	6	7
11	Pendidikan Program Studi Magister (S2) Statistika Tahun 2020	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	Sumber Daya Manusia (SDM)	5	4	9
12	Pendidikan Program Studi Magister (S2) Ilmu Ekonomi Kependudukan dan Ketenagakerjaan Tahun 2020	Universitas Indonesia	Sumber Daya Manusia (SDM)	2	11	13
13	Pendidikan Program Studi Magister (S2) Ilmu Ekonomi Tahun 2020	Institut Pertanian Bogor	Sumber Daya Manusia (SDM)	4	6	10
14	Pendidikan Program Studi Magister (S2) Statistika Terapan Tahun 2020	Institut Pertanian Bogor	Sumber Daya Manusia (SDM)	4	7	11
15	Pendidikan Program Studi Magister (S2) Kependudukan Tahun 2020	Universitas Gadjah Mada	Sumber Daya Manusia (SDM)	5	9	14
16	Pendidikan Program Studi Magister (S2) Ilmu Komunikasi Tahun 2020	Universitas Indonesia	Sumber Daya Manusia (SDM)	1	2	3
Pendidikan S3 *)						
17	Pendidikan Program Doktor (S3) Program Studi Ilmu Ekonomi	Universitas Indonesia	Sumber Daya Manusia (SDM)	1	1	2
18	Pendidikan Program Doktor (S3) Program Studi Statistika	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	Sumber Daya Manusia (SDM)	2	-	2
19	Pendidikan Program Doktor (S3) Program Studi Statistika	Institut Pertanian Bogor	Sumber Daya Manusia (SDM)	2	1	3
20	Pendidikan Program Doktor (S3) Program Studi Teknik Informatika	Institut Teknologi Sepuluh Bandung	Sumber Daya Manusia (SDM)	1	1	2
21	Pendidikan Program Doktor (S3) Program Studi Kependudukan	Universitas Gadjah Mada (UGM)	Sumber Daya Manusia (SDM)	4	-	4
Total				60	98	158

Catatan: *) Sistem kerjasama dilakukan dengan swakelola (BPS sebagai pemberi Swakelola/pertanggungjawaban anggaran di BPS)

Lampiran 6. Diklat yang diselenggarakan Pusdiklat BPS Tahun 2020

No	Nama Diklat	Jumlah Angkatan	Jumlah Peserta				Asal Peserta (BPS/Non BPS)
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Jumlah per Instansi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Diklat Prajabatan							
1	Latsar CPNS Golongan II	3	36	88	124	124	BPS
2	Latsar CPNS Golongan III	13	201	266	467	467	BPS
Diklat Kepemimpinan							
1	Diklatpim III (PKA)	1	30	9	39	39	BPS
2	Diklatpim IV (PKP)	4	78	62	140	140	BPS
Diklat Teknis							
1	Diklat Teknis Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI)	1	27	14	41	-	BPS
2	Diklat Teknis Administrasi Pranata Komputer	1	39	11	50	40	Non BPS
3	Diklat Statistik Sektoral Kab/Kota	6	112	99	211	211	Non BPS
4	Diklat Statistik Sektoral K/L	2	28	29	57	57	Non BPS
5	IMF Online Training on SPPI	1	22	43	65	-	BPS
6	CB on Interaction Excellence Kepala BPS Kab/Kota	5	259	53	312	-	BPS
7	Massive Open Online Course	2	-	-	1,279	-	BPS dan Non BPS
Diklat Fungsional							
1	Diklat Fungsional Statistisi Tingkat Ahli	1	17	12	29	11	Non BPS
2	Diklat Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli (PNBP-PKU)	1	25	-	25	25	Non BPS
3	Pelatihan Dasar Fungsional Pranata Komputer	2	49	31	80	75	Non BPS
4	Pelatihan Dasar Fungsional Statistisi	1	7	23	30	-	BPS
Standarisasi dan Sertifikasi							
5	Diklat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	18	339	279	618	-	BPS
6	Diklat Pembentukan Bendahara Pengeluaran dan Sertifikasi	3	36	74	110	-	BPS
Total			1,305	1,093	3,677	1,189	

Lampiran 7. Kalender Diklat Pusklat BPS Tahun 2020

KALENDER TENTATIF DIKLAT TAHUN 2020																		
NAMA DIKLAT	METODE PEMBELAJARAN	TANGGAL	Jumlah Peserta	PM	APM	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
						DPK												
I. PELATIHAN DASAR CPNS																		
1. Gol II Angkatan 3	Distance Learning	26 Ags - 12 Sep 14 Sep - 9 Okt 12 Okt - 20 Nov 23 - 24 Nov	124	Syarif	Mardi													
2. Gol II Angkatan 4	Distance Learning	2 - 19 Sep 21 Sep - 16 Okt 19 Okt - 25 Nov 26 - 28 Nov		Windy	Puput													
3. Gol II Angkatan 5	Distance Learning				Sahrum													
1. Gol III Angkatan 47	Distance Learning	5 Mar - 6 Apr 15 Jun - 10 Jul 13 Jul - 21 Ags 24 - 26 Ags	467	Syarif	Sahrum													
2. Gol III Angkatan 48	Distance Learning				Syafti													
3. Gol III Angkatan 49	Distance Learning	7 - 23 Apr 22 Jun - 17 Jul 20 Jul - 28 Ags 31 Ags - 2 Sep		Windy	Mardi													
4. Gol III Angkatan 50	Distance Learning				Bendra													
5. Gol III Angkatan 51	Distance Learning	24 Jun - 9 Jul 13 Jul - 8 Ags 10 Ags - 18 Sep 21 - 23 Sep		Syarif	Tari													
6. Gol III Angkatan 52	Distance Learning				Tina													
7. Gol III Angkatan 53	Distance Learning	1 - 16 Jul 20 Jul - 15 Ags 17 Ags - 25 Sep 28 - 30 Sep		Windy	Puput													
8. Gol III Angkatan 54	Distance Learning				Bendra													
9. Gol III Angkatan 55	Distance Learning	22 Jul - 7 Ags 10 Ags - 9 Sep 10 Sep - 21 Sep 26 - 27 Okt		Syarif	Sahrum													
10. Gol III Angkatan 56	Distance Learning				Syafti													
11. Gol III Angkatan 57	Distance Learning	29 Jul - 14 Ags 18 Ags - 16 Sep 17 Sep - 28 Okt 9 - 10 Nov		Windy	Mardi													
12. Gol III Angkatan 58	Distance Learning				Eki													
13. Gol III Angkatan 59	Distance Learning	26 Ags - 12 Sep 14 Sep - 9 Okt 12 Okt - 20 Nov 23 - 24 Nov		Syarif	Tari													
II. PELATIHAN KEPEMIMPINAN																		
1. PKP Angkatan 1	Klasikal	26 Jan - 4 Mar 5 Mar - 5 Jun 8 - 12 Juni	140	Syarif	Bendra													
2. PKP Angkatan 2	Klasikal	2 Feb - 11 Mar 12 Mar - 12 Jun 15 - 19 Juni		Windy	Puput													
3. PKP Angkatan 3	Klasikal	16 Feb - 25 Mar 26 Mar - 26 Jun 6 - 10 Juli		Syarif	Tina													
4. PKP Angkatan 4	Klasikal-DL	8 Mar - 21 Apr 22 Apr - 24 Jul 27 - 31 Juli		Windy	Tari													
1. PKA Angkatan 1	Distance Learning	10 - 25 Jun 28 Jun - 4 Ags 5 Ags - 30 Okt 2 - 6 Nov	39	Windy	Eki													

Keterangan:

- = Libur Hari Raya Idul Fitri 1438 H
- = Studi Lapangan
- = Seminar Rancangan Aksi Perubahan
- = Seminar Evaluasi Implementasi Aksi Perubahan
- = Implementasi Aksi Perubahan
- = Distance Learning Latsar Gol 3
- = Aktualisasi di unit kerja masing-masing
- = Seminar Evaluasi Aktualisasi
- = BOC
- = E-Learning PBJ
- = On Class PBJ

Lampiran 10. Kalender Diklat Pusdiklat BPS Tahun 2020 (Lanjutan)

KALENDER TENTATIF DIKLAT TAHUN 2020																	
NAMA DIKLAT	METODE PEMBELAJARAN	TANGGAL	Jumlah Peserta	PM	APM	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
DTF																	
1	Statistisi ahli	Klasikal	3 Feb - 4 Maret	29	Tika	Rita		33									
2	Barjas Angk 35/Latsar Gol III	E-learning	5 - 21 Mar	36	Herman	Aya		36									
3	Barjas Angk 36/Latsar Gol III	E-learning	5 - 21 Mar	36	Herman	Valen		36									
4	Barjas Angk 37/Latsar Gol III	E-learning	6 - 23 April	36	Tika	Pungki			36								
5	Barjas Angk 38/Latsar Gol III	E-learning	6 - 23 April	36	Tika	Rita			36								
6	Barjas Angk 39/Diklat PKA	E-learning	10 - 25 Juni	11	Tika	Ika					11						
7	Diklat Teknis Adm Prakom A	E-learning	15 - 27 Juni	50	Herman	Aya					50						
8	Barjas Angk 40/Latsar Gol III	E-learning	24 Jun - 10 Juli	36	Herman	Valen					36						
9	Barjas Angk 41/Latsar Gol III	E-learning	24 Jun - 10 Juli	36	Tika	Ika					36						
10	Barjas Angk 42/Latsar Gol III	E-learning	1 - 16 Juli	36	Tika	Pungki					36						
11	Barjas Angk 43/Latsar Gol III	E-learning	1 - 16 Juli	36	Tika	Rita					36						
12	Training IMF (PPI for Service	E-learning	6 - 10 Juli	65	Tika	Cepy/Ika					65						
13	Barjas Angk 44/Latsar Gol III	E-learning	22 Juli - 6 Agustus	37	Herman	Ika						37					
14	Barjas Angk 45/Latsar Gol III	E-learning	22 Juli - 6 Agustus	38	Herman	Rita						38					
15	Prakom Ahli PKU (PNBP)	E-learning	27 Juli - 9 September	25	Herman	Aya							25				
16	Barjas Angk 46/Latsar Gol III	E-learning	29 Jul - 14 Ags	34	Herman	Cepy							34				
17	Barjas Angk 47/Latsar Gol III	E-learning	29 Jul - 14 Ags	34	Herman	Valen							34				
18	Barjas Angk 48/Latsar Gol III	E-learning	27 Ags - 10 Sep	38	Tika	Pungki								38			
19	Statistik Sektoral Angk 1	E-learning	31 Ags - 5 Sep	42	Herman	Ika								42			
20	Statistik Sektoral Angk 2	E-learning	31 Ags - 5 Sep	27	Tika	Rita								27			
21	Statistik Sektoral Angk 3	E-learning	7 - 12 Sep	27	Herman	Ika								27			
22	Statistik Sektoral Angk 4	E-learning	7 - 12 Sep	35	Tika	Rita								35			
23	Statistik Sektoral Angk 5	E-learning	14 - 19 Sep	36	Herman	Cepy								36			
24	Statistik Sektoral Angk 6	E-learning	14 - 19 Sep	41	Tika	Aya								41			
25	Bendahara Pembentukan I	E-learning	28 Sep - 2 Okt	34	Herman	Pungki									34		
26	Penulisan KTI	E-learning	12 Okt - 2 Des	41	Herman	Ika										41	
27	Statistik Sektoral K/L I	E-learning	19 Okt - 24 Okt	36	Herman	Rita									36		
28	Bendahara Pembentukan II	E-learning	19 - 26 Okt	38	Herman	Aya									38		
29	Latsar Prakom I	E-learning	19 Okt - 3 Nov	40	Herman	Cepy									40		
30	Statistik Sektoral K/L II	E-learning	2 - 7 Nov	21	Herman	Pungki										21	
31	Latsar Prakom II	E-learning	3 - 12 Nov	40	Herman	Cepy										40	
32	Barjas Angk 49	E-learning	5 - 19 Nov	36	Herman	Aya										36	
33	Barjas Angk 50	E-learning	5 - 19 Nov	36	Herman	Ika										36	
34	Barjas Angk 51	E-learning	12 - 26 Nov	33	Herman	Pungki										33	
35	Barjas Angk 52	E-learning	12 - 26 Nov	35	Herman	Rita										35	
36	Bendahara Pembentukan III	E-learning	16 - 20 Nov	38	Herman	Cepy										38	
37	Latsar Statistisi	E-learning	23 Nov - 5 Des	30	Herman	Aya											30

Lampiran 11. Rincian Jumlah Peserta MOOC per Kursus

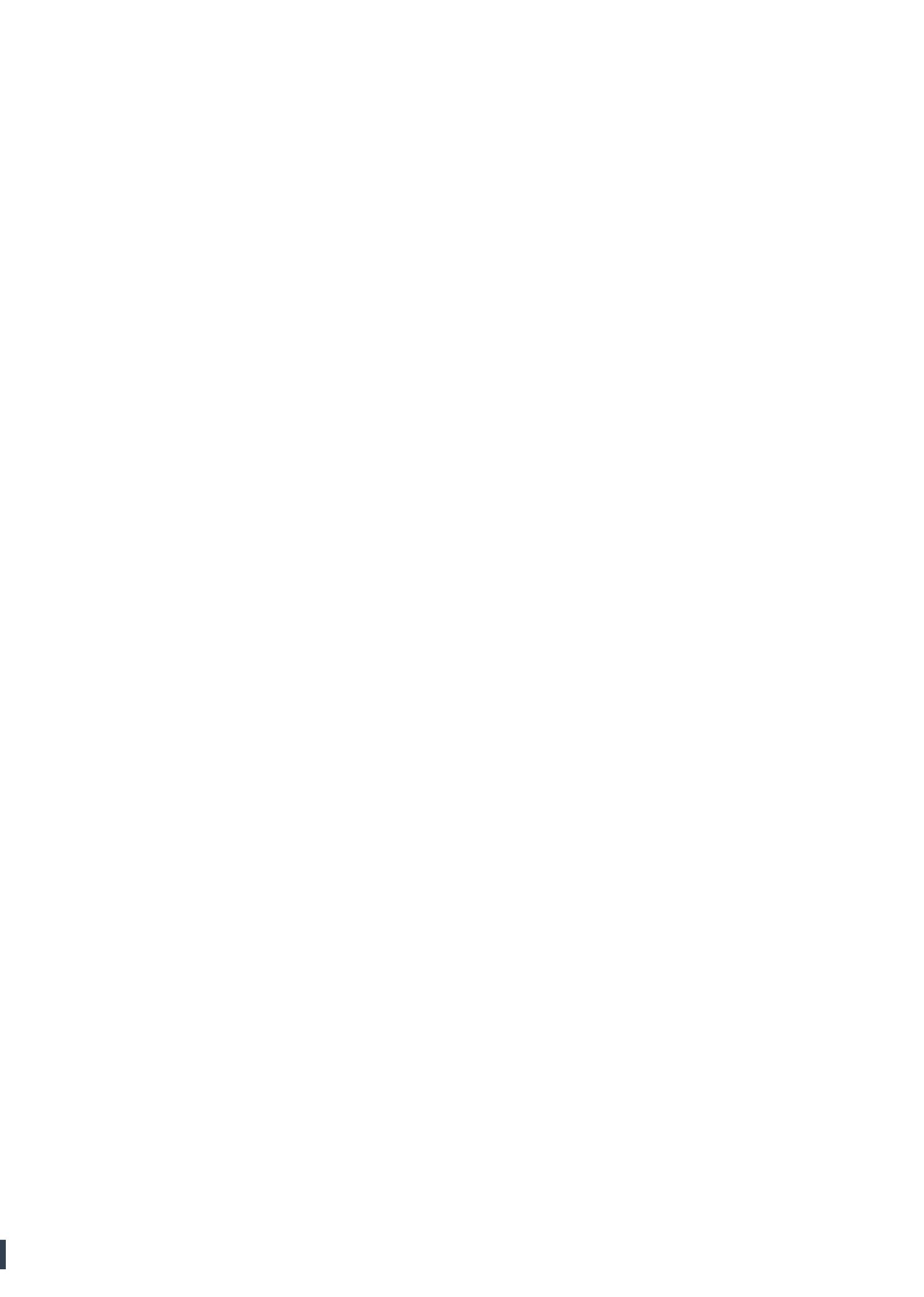
No	Nama Kursus	Peserta	
		BPS	Non BPS*)
1	Budaya dan Pembangunan Karakter Bangsa	447	
2	Digital Marketing with Social Media	1.454	
3	Digital Marketing with Social Media (Edisi HSN)	418	149
4	Hukum Siber: Hak dan Kewajiban	467	
5	Keamanan Informasi : Melindungi Informasi Anda di Era Digital	1.214	
6	Keamanan Informasi : Melindungi Informasi Anda di Era Digital (Edisi HSN)	318	149
7	Komunikasi Persuasif Untuk Negosiasi	1.339	
8	Komunikasi Persuasif untuk Negosiasi (Edisi HSN)	321	116
9	Manajemen Keuangan Untuk Non-Manajer Keuangan	1.084	
10	Manajemen Keuangan Untuk Non-Manajer Keuangan (Edisi HSN)	298	73
11	Manajemen Rantai Pasok (Edisi HSN)	277	64
12	Millenials dan Kesehatan Mental (Edisi HSN)	481	83
13	Pembangunan Berkelanjutan	1.903	
14	Pembangunan Berkelanjutan (Edisi HSN)	341	103
15	Pengenalan Cara Berpikir Kreatif (Edisi HSN)	574	144
16	Post Disruption	1.054	
17	Public Speaking	1.957	
18	Public Speaking (Edisi HSN)	472	168
19	Self Driving : Are You a Driver or a Passenger (Edisi HSN)	461	132
20	Self Driving: Are You a Driver or a Passenger?	1.382	
TOTAL		16.262	1.181

Lampiran 12. Sertifikat Akreditasi



Lampiran 13. Piagam Penghargaan Tahun 2020







**PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BADAN PUSAT STATISTIK**

LAKIP

- LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH -

LAKIP

2020

PUSDIKLAT BPS

